

Studi Diagnostik Pembelajaran Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat



Ruhmaniyati

Akhmadi

Pitriati Solihah

Saprudin

LAPORAN LAPANGAN SMERU

**Studi Diagnostik Pembelajaran Pendidikan Dasar di
Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi
Nusa Tenggara Barat**

Ruhmaniyati

Akhmadi

Pitriati Solihah

Saprudin

Editor

Wiwin Purbaningrum

The SMERU Research Institute

Maret 2020

Studi Diagnostik Pembelajaran Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Penulis: Ruhmaniyati, Akhmadi, Pitriati Solihah, dan Saprudin

Editor: Wiwin Purbaningrum
Foto Sampul: Dok. SMERU

Data Katalog-dalam-Terbitan The SMERU Research Institute

Ruhmaniyati

Laporan lapangan SMERU: Studi Diagnostik Pembelajaran Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumbawa Barat - Provinsi Nusa Tenggara Barat./ Ditulis oleh Ruhmaniyati, Akhmadi, Pitriati Solihah, Saprudin.
v; 68 hlm.; 29 cm.

ISBN 978-602-7901-56-8 (PDF)

ISBN 978-623-7492-18-4

1. Pendidikan 2. Kabupaten Sumbawa Barat
I. Judul

370.7 –ddc 23

Diterbitkan oleh:
The SMERU Research Institute
Jl. Cikini Raya No.10A
Jakarta 10330
Indonesia

Cetakan pertama, Maret 2020



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional.

Konten SMERU dapat disalin atau disebarluaskan untuk tujuan nonkomersial sejauh dilakukan dengan menyebutkan The SMERU Research Institute sebagai sumbernya. Jika tidak ada kesepakatan secara kelembagaan, format PDF publikasi SMERU tidak boleh diunggah dalam jaringan (daring) dan konten daring hanya bisa dipublikasikan melalui tautan ke situs web SMERU.

Temuan, pandangan, dan interpretasi dalam laporan ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak berhubungan dengan atau mewakili lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan The SMERU Research Institute.

Studi dalam publikasi ini sebagian besar menggunakan metode wawancara dan diskusi kelompok terfokus. Semua informasi terkait direkam dan disimpan di kantor SMERU.

Untuk mendapatkan informasi mengenai publikasi SMERU, mohon hubungi kami di nomor telepon 62-21-31936336, nomor faks 62-21-31930850, atau alamat surel smeru@smeru.or.id; atau kunjungi situs web www.smeru.or.id.

TIM PENELITIAN

Peneliti SMERU

Ruhmaniyati

Akhmadi

Peneliti Lapangan

Pitriati Solihah

Saprudin

UCAPAN TERIMA KASIH

Laporan ini dapat diselesaikan berkat dukungan berbagai pihak. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh tim Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (The Innovation for Indonesia's School Children, INOVASI) yang telah memfasilitasi dan memberi arahan teknis selama pelaksanaan penelitian ini.

Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, khususnya bupati, sekretaris daerah, kepala badan/dinas di bidang pendidikan beserta stafnya, yang telah memperlancar dan memberikan informasi berharga sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Kami juga berterima kasih kepada para informan kunci di bidang pendidikan di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa atas informasinya yang berharga. Penghargaan dan terima kasih juga kami sampaikan kepada kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua murid yang telah bersedia meluangkan waktu mereka untuk diwawancarai. Terakhir, kami berterima kasih kepada para peneliti di Kabupaten Sumbawa Barat dan peneliti tamu yang telah membantu tim peneliti SMERU dalam melakukan wawancara dan diskusi kelompok terfokus untuk mengumpulkan informasi di lapangan.

Studi Diagnostik Pembelajaran Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ruhmaniyati, Akhmadi, Pitriati Solihah, dan Saprudin

Inovasi untuk Anak Indonesia (INOVASI) dan The SMERU Research Institute (SMERU) melakukan studi diagnostik mengenai pembelajaran pada tingkat pendidikan dasar di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi capaian pembelajaran murid pada tingkat pendidikan dasar. Laporan studi ini mencakup (i) analisis ekonomi politik tentang permasalahan pendidikan, (ii) analisis tentang inovasi pada bidang pendidikan, dan (iii) pemetaan kepentingan, pengaruh, dan hubungan antarpemangku kepentingan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui metode wawancara (individu dan kelompok), FGD, dan kajian data sekunder. Temuan lapangan menunjukkan bahwa capaian pembelajaran murid pada tingkat pendidikan dasar di Kabupaten Sumbawa Barat berkaitan erat dengan rendahnya kualitas guru, rendahnya motivasi belajar murid, dan kurangnya sarana belajar mengajar. Berbagai kelompok pemangku kepentingan memperlihatkan potensi untuk berkontribusi dan kemauan yang tinggi untuk meningkatkan capaian pembelajaran murid. Akan tetapi, para pemangku kepentingan belum melakukan komunikasi rutin untuk secara khusus mendiskusikan dan mencari solusi atas masalah pembelajaran murid. Meskipun demikian, studi ini menemukan bahwa beberapa pemangku kepentingan telah secara aktif melakukan berbagai inovasi di tingkat sekolah yang secara langsung maupun tidak langsung bertujuan meningkatkan capaian pembelajaran murid.

Kata kunci: pendidikan dasar, inovasi pendidikan, Kabupaten Sumbawa Barat, kebijakan pendidikan

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	v
I. PENDAHULUAN	1
II. ANALISIS EKONOMI POLITIK PERMASALAHAN PENDIDIKAN	3
2.1 Rendahnya Motivasi Belajar Murid	3
2.2 Rendahnya Kualitas Guru dan Banyaknya Beban Administrasi	4
2.3 Kurangnya Sarana dan Prasarana Pembelajaran	5
2.4 Pemecahan Masalah	6
III. INOVASI PENDIDIKAN DASAR	8
IV. PEMETAAN KEPENTINGAN, PENGARUH, DAN HUBUNGAN ANTARPEMANGKU KEPENTINGAN	11
4.1 Potensi untuk Berkontribusi terhadap Hasil Pembelajaran	11
4.2 Kemauan dan Pengaruh Nyata Pemangku Kepentingan untuk Terlibat dalam Peningkatan Hasil Pembelajaran	12
4.3 Pentingnya Pemangku Kepentingan Dilibatkan dalam Upaya Peningkatan Hasil Pembelajaran	12
DAFTAR ACUAN	13
LAMPIRAN	14

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Ringkasan Sepuluh Isu Teratas yang Disebutkan oleh Setiap Kelompok Pemangku Kepentingan	15
Lampiran 2	Ringkasan Tiga Metode Komunikasi dan Umpan Balik yang Paling Sering Dilakukan untuk Setiap Kelompok Pemangku Kepentingan di KSB	24
Lampiran 3	Tabel A1. Daftar Mitra Potensial di Daerah untuk INOVASI dan Forum untuk Berdialog di KSB	30
Lampiran 4	Tabel A2. Matriks Nilai Pemangku Kepentingan di KSB	32
Lampiran 5	Peta Pemangku Kepentingan di Kabupaten Sumbawa Barat (Tingkat Pengaruh dan Ketertarikan)	44
Lampiran 6	Analisis Jejaring Pemangku Kepentingan	45
Lampiran 7	Tabel A3. Matriks Metode Komunikasi di Kabupaten Sumbawa Barat	46
Lampiran 8	Analisis Pohon Masalah Rendahnya Hasil Pembelajaran Murid Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumbawa Barat	56
Lampiran 9	Tabel A4. Analisis Penyelesaian Masalah di Kabupaten Sumbawa Barat	57
Lampiran 10	Tabel A5. Inovasi Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumbawa Barat	61
Lampiran 11	Tabel A6. Daftar Perolehan Data Sekunder Kabupaten Sumbawa Barat	63
Lampiran 12	Tabel A7. Diagram Proses Pemetaan Pemangku Kepentingan pada Survei Diagnostik Sistem Pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat	65

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

ABK	anak berkebutuhan khusus
APBD	anggaran pendapatan dan belanja daerah
APK	angka partisipasi kasar
APM	angka partisipasi murni
asda	asisten daerah
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BBM	Blackberry Messenger
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BP	Bimbingan dan Penyuluhan
BSM	Bantuan Siswa Miskin
CSR	<i>corporate social responsibility</i> (tanggung jawab sosial perusahaan)
dapodik	data pokok pendidikan
DFAT	Department of Foreign Affairs and Trade
diklat	pendidikan dan pelatihan
Dinas Dikbudpora	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
DPA	dokumen pelaksanaan anggaran
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
D-4	diploma empat
ELPSA	Experience, Language, Pictorial, Symbolic, and Applications
FGD	<i>focus group discussion</i> (diskusi kelompok terfokus)
GTT	guru tidak tetap
INOVASI	The Innovation for Indonesia's School Children (Inovasi untuk Anak Indonesia)
IPA	Ilmu Pengetahuan Alam
IPM	indeks pembangunan manusia
IPS	Ilmu Pengetahuan Sosial
KAK	kerangka acuan kerja
KBM	kegiatan belajar mengajar
Kemendikbud	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KIR	karya ilmiah remaja
KKG	kelompok kerja guru
KPDT	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
KSB	Kabupaten Sumbawa Barat

KTSP	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
K-13	Kurikulum 2013
K3S	kelompok kerja kepala sekolah
lakip	laporan akuntabilitas kinerja pemerintahan
LCD	<i>liquid crystal display</i>
LSM	lembaga swadaya masyarakat
MA	madrasah aliyah
MGMP	musyawarah guru mata pelajaran
MI	madrasah ibtidaiah
MKKS	musyawarah kerja kepala sekolah
MTs	madrasah sanawiah
musdus	musyawarah dusun
musrenbang	musyawarah perencanaan pembangunan
NTB	Nusa Tenggara Barat
ornop	organisasi nonpemerintah
OSN	olimpiade sains nasional
PAI	Pendidikan Agama Islam
PAUD	pendidikan anak usia dini
PDPGR	Program Daerah Pemberdayaan dan Gotong Royong
pemda	pemerintah daerah
pemkab	pemerintah kabupaten
pemprov	pemerintah provinsi
perbup	peraturan bupati
perda	peraturan daerah
Permendiknas	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
PGRI	Persatuan Guru Republik Indonesia
PKN	Pendidikan Kewarganegaraan
PNS	pegawai negeri sipil
PR	pekerjaan rumah
PTK	pendidik dan tenaga kependidikan
PT NNT	Perseroan Terbatas Newmont Nusa Tenggara
RA	<i>raudatul athfal</i>
renstra	rencana strategis
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPS	rencana pengembangan sekolah
satap	satu atap

SBK	Seni, Budaya, dan Keterampilan
SD	sekolah dasar
SDM	sumber daya manusia
SDN	sekolah dasar negeri
setda	sekretariat daerah
SKTM	surat keterangan tidak mampu
SMA	sekolah menengah atas
SMK	sekolah menengah kejuruan
SMP	sekolah menengah pertama
SMPN	sekolah menengah pertama negeri
SMS	<i>short message service</i> (layanan pesan singkat)
SPM	standar pelayanan minimal
SKPD	satuan kerja perangkat daerah
S-1	strata satu
S-2	strata dua
S-3	strata tiga
TIK	teknologi informasi dan komunikasi
TK	taman kanak-kanak
TKW	tenaga kerja wanita
ToR	<i>terms of reference</i>
tupoksi	tugas pokok dan fungsi
UKG	uji kompetensi guru
UPTD	unit pelaksana teknis daerah
YNTP	Yayasan Nusa Tenggara Pratama

I. PENDAHULUAN

Survei diagnostik atas pembelajaran pada tingkat pendidikan dasar ini dilakukan oleh The SMERU Research Institute di enam kabupaten di Nusa Tenggara Barat (NTB), yaitu Sumbawa Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Sumbawa, Dompu, dan Bima. Survei tersebut dilaksanakan setelah Provinsi NTB dipilih sebagai mitra pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia untuk Program Inovasi untuk Anak Indonesia (The Innovation for Indonesia's School Children/INOVASI).

Laporan hasil survei ini secara khusus memaparkan temuan tentang sistem pendidikan dasar di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), terutama terkait hasil pembelajaran murid (kemampuan literasi dan numerasi murid). Laporan ini mencakup (i) analisis ekonomi politik permasalahan pendidikan; (ii) analisis inovasi pada bidang pendidikan; dan (iii) pemetaan kepentingan, pengaruh, dan hubungan antarpemangku kepentingan.

Metode

Survei ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara (individu dan kelompok), *focus group discussion*/FGD (diskusi kelompok terfokus), dan kajian data sekunder. Pemangku kepentingan di KSB yang menjadi informan wawancara individu meliputi 25 pemangku kepentingan di tingkat sekolah hingga tingkat kabupaten. Sementara itu, wawancara kelompok terdiri atas empat kelompok guru, empat kelompok orang tua murid, empat kelompok murid perempuan, serta empat kelompok murid laki-laki sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). FGD dilakukan di tingkat kabupaten dengan mengundang semua pemangku kepentingan yang telah diwawancarai.

Lokasi dan Waktu Survei

Sekolah yang disurvei berada di tiga kecamatan, yaitu satu sekolah dasar negeri (SDN) di Kelurahan 1 dan Kelurahan 2 di Kecamatan Taliwang, satu sekolah menengah pertama negeri (SMPN) di Kecamatan Jereweh, dan satu SMPN di Kecamatan Maluk. Berdasarkan informasi awal, salah satu SD berada di Kelurahan Dalam. Namun, karena ada pemekaran wilayah beberapa tahun lalu, SD sampel tersebut masuk ke dalam wilayah administratif Kelurahan 2. Pengumpulan data survei dilakukan pada 8–20 Agustus 2016 oleh tiga orang peneliti SMERU dan seorang peneliti daerah.

Gambaran Umum Kondisi Pembelajaran di KSB

Secara administratif, KSB merupakan kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Sumbawa. Pembentukan kabupaten baru ini diatur oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perkembangan pembangunan wilayahnya meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2015, KSB dinyatakan sebagai kabupaten maju setelah sebelumnya dimasukkan ke dalam daftar 183 kabupaten tertinggal di Indonesia pada akhir 2014 oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT).

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) di KSB juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Indeks pembangunan manusia (IPM) KSB pada 2015 mencapai 69, meningkat 2,04 poin jika dibandingkan dengan situasi pada 2010 yang hanya 66,96. Capaian tersebut berada di atas IPM NTB (68,46) dan menempati peringkat pertama di antara kabupaten se-NTB, serta peringkat ke-3 di antara kabupaten dan kota se-NTB (setelah Kota Mataram dan Kota Bima).

Kondisi pendidikan di KSB juga menunjukkan perkembangan yang baik. Sekolah tingkat pendidikan dasar telah tersebar, bahkan telah mencapai wilayah perdesaan yang cukup jauh dari ibu kota kabupaten. Saat ini masyarakat sudah dapat mengakses SD dengan jarak kurang dari 3 km dari tempat tinggalnya. Hal ini berarti bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menyekolahkan anak-anaknya—terlihat dari angka partisipasi kasar (APK) 2015 yang mencapai lebih dari 100%, baik untuk tingkat SD (109,08%) maupun SMP (111,21%). Angka partisipasi murni (APM) SD juga telah mencapai 100% dan APM SMP mencapai 99,9%.

II. ANALISIS EKONOMI POLITIK PERMASALAHAN PENDIDIKAN

Persoalan pada tingkat pendidikan dasar di KSB yang teridentifikasi dapat dikelompokkan menjadi tiga komponen, yaitu murid, guru, serta sarana dan prasarana pembelajaran. Sebagian besar informan menilai bahwa beberapa murid memiliki motivasi belajar yang rendah yang pada akhirnya berdampak pada hasil pembelajaran yang rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya minat baca murid, minimnya dukungan orang tua, dan buruknya perilaku murid. Sementara itu, masalah guru disebabkan oleh rendahnya kualitas pengajaran dan adanya beban administrasi sekolah, khususnya di SD yang tidak memiliki staf tata usaha. Permasalahan sarana dan prasarana sekolah disebabkan terutama oleh kurangnya ketersediaan buku pelajaran, kurangnya alat peraga, terbatasnya fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan tidak sesuainya rencana pengembangan sekolah (RPS) dengan kebutuhan. Diagram analisis pohon masalah disajikan pada Lampiran 8.

2.1 Rendahnya Motivasi Belajar Murid

Walaupun pendidikan dasar di KSB cukup baik,¹ sebagian besar informan menyatakan bahwa motivasi belajar murid masih rendah. Rendahnya motivasi belajar murid ini disebabkan oleh, antara lain, faktor lingkungan. Mereka terpengaruh teman-temannya sehingga berperilaku buruk seperti merokok, melakukan tindak kriminal, berrubuk-mabukan (meminum *air ubi*² atau obat Komix berlebihan). Rendahnya motivasi murid juga dipengaruhi oleh penggunaan telepon pintar dan permainan dalam jaringan (*daring*) yang berlebihan. Perilaku tersebut menyebabkan murid malas belajar dan membaca; hal ini berpengaruh terhadap proses belajar mengajar sehingga hasil belajar mereka rendah.

Keluarga juga menjadi faktor yang menentukan perilaku murid. Kesibukan orang tua yang bekerja dari pagi hingga tengah malam menyebabkan murid lebih senang bergaul dengan teman sebayanya untuk mencari jati diri daripada belajar atau mengerjakan pekerjaan rumah (PR). Orang tua, khususnya yang bekerja sebagai petani, pedagang, dan penambang emas *totok batu*, terkadang meninggalkan rumah untuk beberapa hari atau lebih dari satu minggu, bahkan berbulan-bulan bagi mereka yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri. Hal ini menyebabkan mereka tidak sempat memperhatikan apa yang dilakukan anak mereka di sekolah/lingkungannya.

Berdasarkan informasi dari beberapa informan guru, media massa, dan komite sekolah, kesibukan orang tua juga menjadi akar masalah kurang harmonisnya atau retaknya hubungan keluarga. Hal ini selanjutnya berdampak pada kurangnya kesadaran dan perhatian orang tua akan pendidikan anaknya. Rendahnya kesadaran orang tua juga disebabkan oleh kurang berperannya komite sekolah dalam menjembatani orang tua dan sekolah.

¹Hal ini terbukti dari APM dan APK tingkat SD maupun SMP di KSB yang mencapai 100%, tingkat kelulusan murid SD dan SMP yang juga mencapai 100%, dan nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) siswa SD dan SMP yang menduduki peringkat pertama di antara kabupaten-kabupaten se-NTB serta peringkat ketiga kabupaten dan kota se-NTB (peringkat kedua setelah Kota Mataram).

²Sejenis minuman keras lokal yang memabukkan.

2.2 Rendahnya Kualitas Guru dan Banyaknya Beban Administrasi

Jumlah guru di KSB sebenarnya sudah mencukupi kebutuhan. Jumlah guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) memang masih kurang, tetapi kekurangan ini dikompensasi oleh banyaknya guru non-PNS. Rasio jumlah murid dan guru per kelas adalah 23:1 untuk tingkat SD dan 22:1 untuk tingkat SMP. Hal ini menunjukkan bahwa masih mungkin bagi guru untuk membina murid dengan baik. Dukungan pemerintah daerah (pemda) bagi guru juga cukup baik. Terdapat peraturan daerah (perda) yang dibuat untuk memberikan penghargaan bagi guru yang berprestasi, yaitu Peraturan Bupati (Perbup) Sumbawa Barat No. 5 Tahun 2007 tentang Pemberian Penghargaan kepada Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi.

Namun, masih muncul permasalahan terkait guru yang ditemukan di lapangan. Permasalahan utama guru yang disebutkan oleh sebagian besar informan adalah masih rendahnya kualitas guru. Selain itu, adanya beban administrasi berlebih bagi guru, khususnya guru SD, berimplikasi pada kurang terfokusnya guru dalam mengajar.

Masih rendahnya kualitas guru disebabkan oleh ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan guru dan mata pelajaran yang diajarkan. Hal ini didorong oleh adanya syarat pendidikan minimal guru yang diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Dosen dan Guru. Aturan ini menetapkan bahwa guru harus berpendidikan minimal strata satu (S-1) atau diploma empat (D-4). Untuk memenuhi syarat tersebut, ada guru yang mengambil kelas jarak jauh yang kualitasnya belum tentu baik. Beberapa informan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) menyebutkan bahwa beberapa tahun lalu muncul banyak universitas yang kualitasnya kurang baik. Hal ini juga merupakan dampak dari adanya kebijakan pemda yang menggratiskan biaya kuliah bagi mahasiswa S-1 hingga strata 3 (S-3). Selain itu, rendahnya kualitas guru disebabkan oleh kurangnya kontrol dari kepala sekolah, kurangnya ruang guru untuk berkreasi, dan minimnya penguasaan metode pembelajaran.

Ketidakesuaian antara latar belakang pendidikan guru dan mata pelajaran yang diajarkan disebabkan oleh distribusi guru yang tidak merata. Penyebabnya adalah adanya mutasi guru yang tidak mempertimbangkan kebutuhan dan kompetensi guru. Sebagian guru, terutama yang dekat dengan pejabat pemerintahan atau merupakan pendukung bupati terpilih, lebih mudah dalam mendapatkan kesempatan untuk mengajar di wilayah perkotaan atau wilayah yang dekat dengan tempat tinggalnya.

Penyebab kurangnya ruang kreasi guru adalah kurang aktifnya kelompok kerja guru (KKG) di tingkat SD ataupun kurang aktifnya musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) di tingkat SMP karena faktor lemahnya dukungan regulasi. Di dalam satu wilayah, ada KKG yang sangat aktif, tetapi lebih banyak ditemukan KKG yang tidak aktif. Forum KKG yang aktif digunakan oleh para guru untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang pembelajaran. Kegiatan ini memperkaya pengetahuan guru tentang metode dan kreativitas guru dalam pembelajaran. Di KSB, salah satu KKG yang aktif³ merupakan binaan pemerintah provinsi (pemprov) dan mendapatkan bantuan dari Perseroan Terbatas Newmont Nusa Tenggara (PT NNT). Kondisinya jauh berbeda daripada KKG yang tidak mendapatkan dana dari pihak mana pun. Namun, di salah satu SD sampel yang gugus KKG-nya tidak aktif, guru-guru dan kepala sekolah berinisiatif membentuk KKG di tingkat sekolah kendati pengalaman dan pengetahuan para guru tersebut terbatas hanya pada lingkup sekolah mereka.⁴

³KKG gugus 4 Kecamatan Taliwang.

⁴Kondisi ini ditemukan di SDN B.

Minimnya penguasaan guru akan metode pembelajaran disebabkan oleh kurangnya pelatihan atau penataran tentang metode pembelajaran. Saat ini sudah ada guru SMP sampel yang mengikuti pelatihan Experience, Language, Pictorial, Symbolic, and Applications (ELPSA) untuk meningkatkan motivasi murid dalam mempelajari Matematika; pelatihan ini diselenggarakan oleh University of Canberra dan IKIP Mataram. Namun, pelatihan ini terbatas hanya untuk beberapa guru yang telah ditunjuk.⁵ Selain itu, penguasaan guru akan TIK yang berkaitan dengan pembelajaran masih rendah. Hal ini terutama terjadi pada guru-guru lama yang merasa nyaman dengan metode pembelajaran yang selama ini digunakan. Di sisi lain, pembelajaran dengan menggunakan TIK disukai oleh para murid sehingga metode ini mampu menggugah keingintahuan dan semangat murid untuk mengikuti pelajaran. Kurangnya pelatihan/penataran dan kemampuan guru dalam hal TIK ini disebabkan oleh kurangnya tutor yang berkualitas di KSB, kurikulum yang sering berubah, dan RPS yang minim kegiatan pengembangan kapasitas untuk guru. Berdasarkan informasi dari peserta FGD kabupaten, setiap perubahan kurikulum biasanya diikuti dengan penataran/pelatihan mendalam. Namun, perubahan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ke Kurikulum 2013 (K-13) tidak disertai penataran. Meskipun demikian, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas guru. Salah satunya dilakukan PT NNT melalui pemberian bantuan kepada guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan baik oleh PT NNT maupun pihak luar.

Terkait beban administrasi, guru SD mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menuntut pencatatan dan pelaporan dengan jadwal yang ditentukan secara ketat oleh pengelola program. Selain itu, sistem K-13 yang menuntut guru lebih aktif melakukan evaluasi terhadap murid telah menyita sebagian waktu guru untuk mempersiapkan materi pengajaran.

2.3 Kurangnya Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Masalah sarana dan prasarana yang dialami sekolah mencakup, antara lain, kurangnya buku mata pelajaran, kurangnya alat peraga, terbatasnya sarana TIK, dan adanya RPS yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Masalah kurangnya buku mata pelajaran terjadi di beberapa SDN dan SMPN sampel. Kepala sekolah, guru, dan pengawas di sekolah tersebut menyatakan bahwa satu buku pelajaran digunakan oleh dua hingga tiga murid; keterbatasan itu menyulitkan mereka dalam belajar. Kesulitan tersebut terjadi terutama pada saat para murid mengerjakan PR di rumah, sementara jarak rumah antarmurid berjauhan (kasus di SDN sampel). Guru di SDN sampel tersebut menyatakan bahwa buku yang jumlahnya belum mencukupi adalah buku pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Seni Budaya.

Beberapa peserta FGD menyebutkan bahwa, selain hilangnya atau rusaknya buku, perubahan kurikulum juga berkontribusi menyebabkan kurangnya buku pelajaran di sekolah karena buku yang digunakan pada kurikulum baru berbeda dengan buku pada kurikulum sebelumnya. Faktor lain adalah kurangnya toko buku di KSB dan adanya target standar pelayanan minimal (SPM) 2017 yang cukup tinggi. Guru di salah satu SDN sampel bahkan menyadari bahwa masalah kurangnya ketersediaan buku tersebut disebabkan oleh dana BOS yang terbatas. Berbagai permasalahan tersebut membuat murid terpaksa mengeluarkan biaya sendiri untuk memfotokopi buku pelajaran. Untuk sekolah-sekolah yang berada di lingkaran tambang, sebagian permasalahan ini telah teratasi karena, antara lain, adanya bantuan buku dari PT NNT.

Keterbatasan sarana TIK disebabkan terutama oleh terbatasnya ketersediaan *liquid crystal display* (LCD) yang masih sangat dibutuhkan dalam pembelajaran di tingkat SMP. Selain itu, kurangnya jaringan internet berpengaruh terhadap pelaporan pembelajaran karena penyampaian data pokok

⁵Salah satu guru tersebut ada di SMPN B, Kecamatan Maluk, KSB, yang merupakan salah satu SMP sampel studi.

pendidikan (dapodik), data kompetensi, dan SPM dilakukan secara daring. Sementara itu, ketidaksesuaian RPS dengan kebutuhan terjadi karena selama ini, pengisian RPS dilakukan oleh operator yang tidak sepenuhnya mengetahui kebutuhan sekolah.

2.4 Pemecahan Masalah

Untuk menyelesaikan permasalahan pembelajaran di KSB, diperlukan dukungan dari berbagai lembaga. Lembaga-lembaga tersebut pada dasarnya memiliki kapasitas untuk menyelesaikan permasalahan pembelajaran. Namun, kapasitas itu perlu didukung dengan kemauan atau kepedulian untuk memecahkan masalah pembelajaran. Diagram analisis pemecahan masalah disajikan pada Lampiran 9.

Untuk mengatasi masalah rendahnya motivasi belajar murid, diperlukan peran berbagai pemangku kepentingan, seperti guru, komite sekolah, orang tua, Dewan Pendidikan, media, perusahaan, dan LSM. Penyelesaian permasalahan rendahnya kualitas guru perlu melibatkan guru, kepala sekolah, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), perusahaan, dan LSM. Sementara itu, penyelesaian masalah sarana dan prasarana pembelajaran perlu melibatkan komite sekolah, orang tua, Bappeda, perusahaan, dan LSM.

Pemecahan masalah rendahnya motivasi murid dapat dilakukan dengan mendorong guru untuk menggunakan metode pembelajaran yang menarik. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah membekali guru dengan pelatihan pembuatan PPT. Peran komite sekolah juga sangat dibutuhkan dalam memecahkan masalah rendahnya motivasi murid. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong komite sekolah untuk secara nyata mendekati orang tua murid. Komite sekolah perlu memotivasi orang tua untuk membimbing anaknya di rumah dan mendorong partisipasi mereka dalam menyediakan sarana pembelajaran, baik fisik maupun nonfisik. Selama ini peran orang tua dan komite sekolah hanya terbatas pada bantuan fisik berupa infrastruktur sekolah, padahal yang diperlukan adalah bantuan fisik berupa buku dan bantuan nonfisik yang dapat memotivasi murid untuk belajar. Selain peran komite sekolah dan orang tua, diperlukan peran LSM⁶ dan perusahaan dalam perluasan koleksi buku dan pendirian rumah baca untuk menyelesaikan masalah sarana dan prasarana.

Dinas Dikbudpora dan Dewan Pendidikan dapat saling mendukung dalam penyediaan sarana pelatihan dan insentif bagi guru. Pelatihan bagi guru harus dilakukan oleh tutor yang berkualitas berdasarkan kriteria yang diberikan oleh Dewan Pendidikan yang sekaligus mengevaluasi kebijakan program penyelenggaraan dan hasil pendidikan. Dinas Dikbudpora juga dapat bekerja sama dengan pihak media dalam memaksimalkan penyediaan informasi dan sosialisasi program pendidikan kepada masyarakat. Selain itu, LSM dan perusahaan bisa lebih banyak berperan dalam mengadvokasi peran orang tua, menambah koleksi buku pelajaran dan buku bacaan untuk memperlancar proses pembelajaran, serta menyediakan bantuan lainnya di bidang pendidikan.

Penyelesaian masalah rendahnya kualitas guru dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal, rendahnya kualitas guru dapat diatasi dengan mengikutkan guru dalam berbagai pelatihan, melatih guru untuk melakukan improvisasi terkait metode pembelajaran, dan melatih kreativitas guru dalam pengajaran dengan memaksimalkan kondisi sarana yang terbatas. Perbaikan dari sisi kepala sekolah dapat dilakukan dengan menggiatkan fungsi supervisi dan manajerial kepala sekolah, serta memberikan dukungan bagi guru sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan

⁶LSM yang menjadi sampel studi ini memiliki rumah baca di salah satu desa (Desa Dasan Anyar) di Kecamatan Jereweh.

Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 13 Tahun 2007. Secara eksternal, permasalahan guru dapat diselesaikan dengan dukungan Dinas Dikbudpora melalui penyediaan berbagai pelatihan dan kerja sama dengan berbagai lembaga. PGRI perlu berperan dalam meningkatkan kesadaran, sikap, dan kemampuan guru dalam mengajar. LSM dan perusahaan perlu memperbaiki pola pendampingan dan menyediakan fasilitas untuk peningkatan mutu guru, serta memberikan dukungan bagi guru dalam menghadapi uji kompetensi guru (UKG). Untuk menunjang hal-hal tersebut, Bappeda perlu merencanakan dan menganggarkan kebutuhan-kebutuhan tersebut dalam berbagai rencana pembangunan daerah, seperti rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Berbagai upaya pemecahan masalah tersebut sangat kuat dipengaruhi kepedulian bupati terpilih. Untuk memajukan pendidikan di KSB, diperlukan peningkatan kecerdasan intelektual dan kecerdasan karakter para pemangku kepentingan—sebagaimana semboyan yang cukup terkenal di kalangan masyarakat setempat, “Boleh saja emas Newmont habis, tetapi kita harus menanamkan emas di dalam otak generasi muda.” Kepedulian bupati ditunjukkan dengan, antara lain, program pendidikan gratis, wajib belajar 12 tahun, bantuan seragam gratis, dan gerakan masyarakat mengaji.

III. INOVASI PENDIDIKAN DASAR

Pemda KSB telah melakukan beberapa inovasi dalam rangka memajukan pendidikan di KSB, khususnya pendidikan dasar. Semua inovasi yang dilakukan merupakan program Pemda KSB yang teridentifikasi pada 2005–2016. Selain dari pemerintah, inovasi juga berasal dari pihak internal sekolah dan pihak lain, yaitu PT NNT dan LSM.

Berikut adalah beberapa di antara inovasi-inovasi Pemda KSB pada tingkat pendidikan dasar.

a) Program pendidikan gratis

Program ini mulai dilaksanakan pada 2006 berdasarkan Perbup No. 11 Tahun 2006 tentang Pendidikan Gratis di KSB. Program ini berupa bantuan operasional sekolah untuk tingkat taman kanak-kanak (TK)/raudatul atfal (RA), SD/madrasah ibtidaiah (MI), SMP/madrasah sanawiah (MTs), dan SMA/madrasah aliah (MA)/sekolah menengah kejuruan (SMK). Bantuan diberikan langsung kepada sekolah, dan jumlahnya disesuaikan dengan jumlah murid yang terdaftar. Program ini merupakan andalan Pemda KSB karena bertujuan meringankan beban orang tua dan memotivasi mereka untuk terus mendorong anak-anaknya bersekolah, bahkan hingga tingkat perguruan tinggi. Akan tetapi, program pendidikan gratis ini banyak dikeluhkan oleh pihak sekolah dan guru. Selain dananya yang tidak terlalu besar bagi sekolah penerima bantuan (Rp5.000 untuk SD dan SMP, Rp40.000 untuk SMA/MA, dan Rp50.000 untuk SMK, per murid per bulan),⁷ persepsi sekolah “gratis” membuat partisipasi orang tua menjadi rendah dalam membantu penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Program ini berhenti pada 2015 karena adanya pergantian bupati. Beberapa ungkapan informan terkait pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis adalah sebagai berikut.

[Orang tua] jadi senang ada bantuan, tapi ujungnya orang tua sulit mengeluarkan uang karena sudah ada bantuan, dan ini akan kita balik di periode [selanjutnya]. Orang tua [harus sadar] bahwa partisipasi orang tua harus tetap ada. (Bappeda KSB, laki-laki, 8 Agustus 2016)

Dampak bagi masyarakat yang tidak mampu, menjadi tidak ada hambatan lagi dalam menyekolahkan anaknya. (Dewan Pendidikan KSB, laki-laki, 9 Agustus 2016)

b) Program subsidi pendidikan tinggi

Kebijakan subsidi pendidikan tinggi dimulai sejak 2007 sesuai Perbup No. 4 Tahun 2007 tentang Pemberian Subsidi SPP kepada Mahasiswa S-1 dan Strata 2 (S-2) di KSB. Dengan adanya kedua perbup tersebut, banyak penduduk asli maupun pendatang yang tinggal di KSB melanjutkan pendidikan ke jenjang S-1 dan S-2, baik di dalam maupun di luar KSB. Salah satu informan menyatakan bahwa dia telah mendapatkan manfaat dari program pendidikan gratis dan subsidi pendidikan tinggi. Dia mengatakan, “Saya ini produknya; kalau tidak ada itu, saya belum tentu bisa kuliah.”

c) Program wajib belajar 12 tahun

Pada 2007, bupati KSB mencanangkan program wajib belajar 12 tahun berdasarkan Perda No. 23 Tahun 2008 tentang Program Wajib Belajar 12 Tahun di KSB. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak, KSB merupakan kabupaten pertama di Indonesia yang mencanangkan program wajib belajar 12 tahun, bahkan pada saat Pemerintah Pusat masih mencanangkan wajib belajar 9 tahun. Kebijakan ini merupakan bagian dari tujuan pemda agar pendidikan yang lebih tinggi bisa diakses oleh setiap warga.

⁷Dana tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional sekolah. Khusus untuk tingkat SD dan SMP, dana tersebut juga merupakan tambahan dana operasional dari dana BOS pusat.

d) Pemberlakuan jam belajar malam

Program ini diciptakan oleh bupati pada 2014. Peran pemda (dalam hal ini, Dinas Dikbudpora), orang tua, dan masyarakat sangat penting dalam memantau dan mengawasi anak untuk belajar di rumah pada malam hari. Namun, program ini tidak berjalan karena Pemda KSB tampaknya belum siap dengan mekanisme untuk mengontrol efektivitas pelaksanaan program.

e) Pembentukan forum komunikasi komite sekolah per kecamatan

Forum komunikasi komite sekolah per kecamatan dibentuk oleh Dewan Pendidikan KSB pada Juni 2016. Forum ini merupakan perpanjangan tangan Dewan Pendidikan, dan pengurus forum bertanggung jawab untuk mengakomodasi semua komite sekolah yang ada di tiap kecamatan. Anggota forum ini berjumlah lima orang per kecamatan. Meski forum ini baru dibentuk, koordinasi antara Dewan Pendidikan dan pihak komite sekolah telah dilakukan. Informan komite sekolah dari salah satu SMPN sampel menyatakan bahwa dia telah cukup sering berkomunikasi secara langsung dengan pengurus forum komite sekolah dan membicarakan hal-hal terkait permasalahan sekolah.

f) Program seragam gratis

Pada 2016, bupati baru memprogramkan bantuan dua setel seragam gratis kepada murid baru di tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK. Pada saat penelitian ini dilakukan, program ini sudah ditenderkan dan sedang dalam tahap penjahitan. Pihak sekolah hanya perlu mengirimkan ukuran baju setiap murid baru di sekolahnya kepada perusahaan penjahit.

Hanya ada tiga inovasi yang diprakarsai oleh sekolah. Berikut adalah tiga inovasi tersebut.

a) Pendampingan bagi murid kelas 3 yang berkemampuan kurang dalam literasi dan numerasi

Inovasi ini ditemukan di salah satu SDN sampel.⁸ Hal ini dilatarbelakangi keluhan guru kelas 3 yang mengalami kesulitan dalam menghadapi anak didiknya pada proses belajar mengajar. Melalui rapat sekolah, kepala sekolah memutuskan untuk secara bersama-sama melakukan pendampingan murid kelas 3 tersebut dengan sistem satu guru satu murid.

b) Pelaksanaan KKG di lingkungan internal sekolah

Di SDN sampel lainnya, inovasi yang dilakukan kepala sekolah adalah pelaksanaan kegiatan KKG di lingkungan internal sekolah. Kegiatan ini dirasa perlu karena kegiatan KKG di tingkat gugus (gugus 3) tidak aktif. KKG di sekolah ini diisi dengan kegiatan berbagi pengalaman dan pengetahuan antarguru kelas di sekolah tersebut.

c) Penggunaan media Quipper School⁹ dalam pembelajaran

Inovasi ini dilakukan oleh salah satu guru di SMPN sampel (guru Bahasa Inggris¹⁰). Dengan media ini, cukup banyak hal yang bisa dilakukan oleh guru dan murid untuk menunjang pembelajaran. Namun, saat ini guru menggunakannya hanya untuk memberikan tugas, PR, atau ujian harian kepada para murid. Di sekolah, guru mempersilakan murid datang ke ruang laboratorium komputer untuk mengakses soal tugas/ujian melalui komputer sekolah yang terhubung dengan internet. Di luar sekolah, murid juga diminta untuk mengaksesnya dengan menggunakan

⁸Inovasi ini ditemukan di SDN A.

⁹Quipper School merupakan platform gratis yang memungkinkan guru mengelola kelas dan melihat perkembangan murid secara daring. Melalui Quipper School, guru dapat mengirim tugas dan ujian, membuat konten edukasi, melihat dan melakukan analisis perkembangan murid, serta bekerja sendiri atau bersama-sama. Selain itu, wadah ini juga memudahkan guru dalam mengelola kelasnya sendiri ataupun berkolaborasi dengan guru lain.

¹⁰Inovasi ini dilakukan oleh salah satu guru Bahasa Inggris di SMPN B, Kecamatan Maluk, yang mengajar murid kelas 8.

internet di rumah mereka masing-masing ataupun di warung internet. Hal ini memudahkan guru karena mereka tidak perlu menuliskan atau memperbanyak soal untuk murid.

Sementara itu, inovasi dari perusahaan dan LSM dibedakan menjadi inovasi yang ditujukan bagi sekolah, guru, dan murid. Inovasi bagi sekolah berupa pembebasan lahan dan pembangunan sekolah oleh PT NNT, khususnya sekolah-sekolah yang berada di lingkaran tambang seperti kedua SMPN sampel. Hingga 2015, kepedulian PT NNT ini ditunjukkan melalui pemberian bantuan pembangunan fisik bagi 79 sekolah di tingkat TK, SD, SMP, dan SMA di NTB; 56 sekolah di antaranya berada di lingkaran tambang.

Inovasi bagi sekolah juga dilakukan oleh sebuah LSM, khususnya inovasi yang bertujuan meningkatkan minat baca anak. Kegiatan yang dilakukan adalah pelatihan bagi pustakawan, studi banding, dan penambahan koleksi perpustakaan sekolah pada 2007. Selain itu, sejak 2012 LSM tersebut juga mendirikan rumah baca di salah satu desa dampingan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi rendahnya minat baca murid. Namun, baik pihak LSM maupun sekolah mengakui bahwa program-program tersebut masih belum berdampak besar pada minat baca murid.

Beberapa inovasi juga dilakukan oleh pihak selain sekolah, yaitu PT NNT dan sebuah LSM, baik yang ditujukan kepada murid maupun guru. PT NNT memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru dan memberikan beasiswa melalui sekolah kepada murid berprestasi dan murid dari keluarga miskin (1998–2014). Saat ini beasiswa diberikan atas pengajuan langsung oleh murid kepada perusahaan. Sementara itu, LSM tersebut memberikan pendampingan bagi guru pembimbing dan murid yang akan mengikuti olimpiade sains pada 2015. Pada 2009–2013, LSM ini juga mengadakan berbagai perlombaan antarsekolah bagi para murid, seperti lomba mendongeng, karya ilmiah remaja (KIR), dan karikatur. Secara terperinci, semua inovasi, baik inovasi pemda, sekolah, perusahaan, maupun LSM, disajikan pada lampiran 10.

Ada juga inovasi yang tidak secara langsung berhubungan dengan bidang pendidikan. Bupati terpilih di KSB memiliki inisiatif untuk membentuk forum Program Daerah Pemberdayaan dan Gotong Royong (PDPGR). Pada forum ini, perkembangan dan permasalahan yang muncul di tengah masyarakat dapat disampaikan. Forum ini menampung informasi terkait perkembangan dan permasalahan yang muncul di setiap desa. Hal ini dilakukan dengan mengundang perwakilan desa untuk bertatap muka dengan bupati beserta satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Kegiatan ini terus berjalan sehingga dalam satu bulan, semua perkembangan dan permasalahan yang ada di kabupaten dapat disampaikan, dikeluhkan, dan dibicarakan bersama. Forum PDPGR ini merupakan kelanjutan dari program sekretaris daerah, yaitu Malam *Yasinan*, yang diadakan setiap Kamis malam. Forum ini juga ada dalam bentuk sebuah grup Whatsapp yang berfungsi menampung aspirasi warga yang bergabung di dalamnya. Menurut seorang informan, grup Whatsapp ini memiliki lebih dari 100 anggota dari berbagai kalangan, termasuk bupati.

Koordinasi informal antar-SKPD terjalin dengan diberlakukannya kegiatan salat Zuhur dan salat Asar berjemaah bagi semua pegawai di lingkungan Pemda KSB sejak 2016. Kegiatan ini merupakan pengembangan dari peraturan bupati tentang pengaturan jam kerja pegawai di lingkungan Pemda KSB. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bappeda, kegiatan ini menciptakan silaturahmi yang lebih kuat dan komunikasi antarsektor yang lebih intensif karena adanya kegiatan makan siang bersama setelah salat Zuhur. Perincian inovasi di bidang pendidikan di KSB disajikan pada Lampiran 10.

IV. PEMETAAN KEPENTINGAN, PENGARUH, DAN HUBUNGAN ANTARPEMANGKU KEPENTINGAN

4.1 Potensi untuk Berkontribusi terhadap Hasil Pembelajaran

Tinggi atau rendahnya hasil pembelajaran di KSB sangat dipengaruhi tingkat pengaruh dan ketertarikan berbagai pemangku kepentingan dalam bidang pembelajaran. Dari 17 pemangku kepentingan di KSB, hanya 8 yang memiliki pengaruh dan ketertarikan sangat tinggi (Kuadran 1). Kedelapan pemangku kepentingan tersebut adalah bupati KSB, Dinas Dikbudpora, guru (beserta sekolah dan kepala sekolahnya), PT NNT, pengawas sekolah, Bappeda, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan unit pelaksana teknis daerah (UPTD). Dari delapan pemangku kepentingan tersebut, hanya guru (beserta sekolah dan kepala sekolahnya) yang berpengaruh langsung terhadap hasil pembelajaran murid. Pemangku kepentingan lainnya memiliki pengaruh dan ketertarikan tidak langsung yang biasanya berbentuk kebijakan/peraturan, bantuan beasiswa, bantuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat), serta pemantauan dan evaluasi.

Guru di KSB sangat signifikan menentukan hasil pembelajaran murid pendidikan dasar. Walaupun hasil pembelajaran di KSB cukup baik di tingkat NTB, masih ditemukan permasalahan seperti rendahnya kualitas guru dan besarnya beban guru dalam urusan administrasi sekolah. Kualitas guru yang rendah disebabkan oleh minimnya pengetahuan guru tentang metode pembelajaran, rendahnya kualitas lembaga pendidikan asal guru, ketidaksesuaian latar belakang pendidikan guru dengan mata pelajaran yang diajarkan, dan kurangnya kreativitas guru dalam mengajar. Hal-hal tersebut sangat signifikan memengaruhi kemampuan mengajar guru yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya motivasi belajar murid. Faktor lain yang memengaruhi motivasi pembelajaran murid adalah kurangnya minat baca murid, perilaku negatif murid, dan rendahnya dukungan orang tua.

Di KSB, Dinas Dikbudpora dan pengawas sekolah secara langsung mengawasi dan membina guru-guru di wilayahnya. Dinas Dikbudpora, terutama seksi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), berperan sangat besar dalam upaya peningkatan mutu guru melalui pendidikan dan pelatihan. Hasil pengawasan ini dijadikan, antara lain, bahan pertimbangan oleh Dinas Dikbudpora untuk memberikan pelatihan yang diperlukan guru dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas mereka dalam proses pembelajaran. Namun, upaya ini terbentur rendahnya kualitas pemberi pelatihan (tutor) sehingga tujuan peningkatan kualitas guru belum tercapai secara maksimal.

Bupati berpengaruh tinggi terhadap hasil pembelajaran karena merupakan pihak yang menciptakan visi, misi, dan kebijakan bidang pembelajaran. Visi dan misi ini kemudian diejawantahkan oleh SKPD, dalam hal ini Dinas Pendidikan, ke dalam program atau kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran. Janji-janji bupati pada saat kampanye dituangkan ke dalam visi dan misi, dan SKPD tingkat kabupaten membuat kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan janji kampanye tersebut yang pada akhirnya memengaruhi hasil pembelajaran. Sebagai contoh, kebijakan pendidikan gratis di KSB berdampak positif sekaligus negatif bagi pembelajaran. Bappeda dan DPRD juga memiliki pengaruh tinggi, tetapi keduanya tidak memiliki pengaruh langsung terhadap proses dan hasil pembelajaran.

4.2 Kemauan dan Pengaruh Nyata Pemangku Kepentingan untuk Terlibat dalam Peningkatan Hasil Pembelajaran

Semua pemangku kepentingan memiliki kemauan untuk terlibat dalam peningkatan hasil pembelajaran. Guru dan kepala sekolah memiliki keterlibatan langsung dan pengaruh nyata dalam peningkatan pembelajaran. Namun, beberapa pemangku kepentingan mengkhawatirkan keberlanjutan posisinya sekarang karena bupati yang baru bisa saja melakukan perguliran jabatan (mutasi).

Guru menjadi aktor utama dalam peningkatan hasil pembelajaran. Kepala sekolah yang merupakan pengelola sekolah memiliki pengaruh penting dalam proses dan sistem belajar mengajar di tingkat sekolah. Di KSB, kepala sekolah hanya melaksanakan fungsi atau kompetensi yang berkaitan dengan manajerial sekolah. Sementara itu, empat fungsi atau kompetensi lainnya, yaitu kepribadian, kewirausahaan, supervisi, dan kompetensi sosial, masih jarang dilakukan.

Selain dipengaruhi kepala sekolah, kualitas guru juga dipengaruhi pengawas sekolah. Terdapat dua jenis pengawasan terhadap sekolah, yaitu pengawasan akademik dan pengawasan manajerial. Pengawasan akademik menekankan pembinaan, penilaian, dan pengembangan kemampuan profesional guru, sedangkan pengawasan manajerial menekankan aspek pengelolaan dan administrasi yang mendukung terlaksananya pembelajaran. Meskipun mendapatkan pengawasan dari pengawas sekolah, guru juga tetap berkoordinasi dengan PGRI dan komite sekolah, serta bekerja sama dengan media, LSM, dan perusahaan (PT NNT). Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas dan kualitas guru dipantau, diawasi, dan dievaluasi. Oleh karena itu, guru sebagai tenaga profesional seharusnya bisa meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya agar proses dan hasil pembelajaran dapat meningkat. Diagram analisis jejaring pemangku kepentingan disajikan pada Lampiran 6.

4.3 Pentingnya Pemangku Kepentingan Dilibatkan dalam Upaya Peningkatan Hasil Pembelajaran

Berbagai pemangku kepentingan sangat penting dilibatkan dalam upaya peningkatan pembelajaran. Mereka adalah guru, Dinas Dikbudpora, orang tua, dan komite sekolah, serta Dewan Pendidikan. Guru terlibat langsung dalam peningkatan hasil pembelajaran sehingga peningkatan kualitas guru sangat penting. Upaya peningkatan kualitas guru dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan yang berkaitan dengan pembelajaran, misalnya pelatihan pembuatan slide PowerPoint. Orang tua penting dilibatkan agar mereka dapat memberikan motivasi, pendampingan, dan bimbingan dalam pembelajaran kepada anak-anaknya.

Dinas Dikbudpora berperan langsung dalam peningkatan mutu guru serta pengawasan terhadap guru dan sekolah. Hal ini dilakukan dengan merujuk pada hasil pemetaan kualitas guru yang ada di wilayahnya dari hasil pelaporan sekolah. Komite sekolah lebih banyak didorong untuk mengoordinasikan sekolah dan orang tua tidak hanya dalam hal pembangunan fisik, tetapi juga dalam pengawasan sebagai upaya untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Komite sekolah selama ini lebih banyak terlibat dalam hal-hal yang bersifat fisik terkait pengadaan sarana dan prasarana. Peran tersebut masih bisa dikembangkan menjadi lebih luas agar pembelajaran murid, terutama di luar sekolah, bisa ditingkatkan lagi melalui, misalnya, pengetatan atau pengawasan jam belajar pada malam hari. Peran Dewan Pendidikan dalam melakukan pemantauan dan pemberian usulan perbaikan atas pelaksanaan pembelajaran perlu dimaksimalkan. Hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan forum komite sekolah di tingkat kecamatan yang baru terbentuk secara lebih aktif. Secara terperinci, penilaian terhadap peran berbagai pemangku kepentingan dapat dilihat pada Lampiran 4, sedangkan hubungan antara ketertarikan dan pengaruh antarpemangku kepentingan disajikan pada Lampiran 5.

DAFTAR ACUAN

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bupati Sumbawa Barat No. 11 Tahun 2006 tentang Pendidikan Gratis di Kabupaten Sumbawa Barat.

Peraturan Bupati Sumbawa Barat No. 4 Tahun 2007 tentang Pemberian Subsidi SPP kepada Mahasiswa Strata 1 dan Strata 2 di Kabupaten Sumbawa Barat.

Peraturan Bupati Sumbawa Barat No. 5 Tahun 2007 tentang Pemberian Penghargaan kepada Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi.

Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2008 tentang Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Sumbawa Barat.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Dosen dan Guru.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Ringkasan Sepuluh Isu Teratas yang Disebutkan oleh Setiap Kelompok Pemangku Kepentingan

Terdapat 41 jenis pemangku kepentingan yang diwawancarai dalam Studi Diagnostik Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), baik yang diwawancarai secara mandiri (perorangan) maupun berkelompok. Para pemangku kepentingan tersebut dibagi menjadi empat kelompok berdasarkan perannya dalam memengaruhi hasil pembelajaran murid.

- a) Kelompok pembuat kebijakan terdiri atas empat pemangku kepentingan, yaitu Dinas Dikbudpora, Bappeda, sekretariat daerah (setda), dan DPRD.
- b) Kelompok pelaksana kebijakan terdiri atas 13 pemangku kepentingan, yaitu UPTD, dua pengawas SD, satu pengawas SMP, dua kepala sekolah SDN sampel, dua kepala sekolah SMPN sampel, empat kelompok guru (satu kelompok guru dari masing-masing dua SDN sampel dan dua SMPN sampel), dan salah satu ketua yayasan pendidikan di KSB.
- c) Kelompok pendukung terdiri atas 16 pemangku kepentingan, yaitu perwakilan LSM, Dewan Pendidikan, PGRI, salah satu ketua gugus/KKG, pemerintah kelurahan (dua kelurahan), perusahaan (PT NNT), dua ketua komite sekolah dari SDN sampel, dua komite sekolah dari SMPN sampel, dan empat kelompok orang tua murid (satu kelompok orang tua dari tiap SDN dan SMPN sampel).
- d) Kelompok sasaran terdiri atas delapan kelompok murid, yaitu empat kelompok murid laki-laki dari tiap SDN dan SMPN sampel (masing-masing satu kelompok per tingkatan sekolah) dan empat kelompok murid perempuan (masing-masing satu kelompok per tingkatan sekolah).

Pengelompokan para pemangku kepentingan tersebut dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam mengetahui beberapa hal spesifik terkait hasil pembelajaran yang disampaikan oleh tiap kelompok pemangku kepentingan.

a) Kelompok Pembuat Kebijakan

Semua pemangku kepentingan dalam kelompok ini menyebutkan bahwa **masih rendahnya kualitas guru** sangat memengaruhi hasil pembelajaran murid di sekolah. Bahkan, pihak Bappeda dan setda menganggap ini merupakan permasalahan paling penting yang memengaruhi mutu pendidikan secara umum. Meski data hasil tes kompetensi guru menunjukkan bahwa kemampuan guru KSB di tingkat kabupaten/kota se-NTB berada di urutan kedua teratas setelah Kota Mataram, tetapi posisinya masih jauh dari standar nasional. Hal ini membuat informan Bappeda merasa bahwa meski secara kuantitas tingkat kelulusan murid SD dan SMP telah mencapai 100%, capaian ini belum menunjukkan keberhasilan yang sebenarnya karena harus dilihat pula kualitas murid, dan ini sangat tergantung pada kualitas gurunya.

Masalah kedua adalah **kurangnya dukungan orang tua terhadap pendidikan anak**. Informan Bappeda menyampaikan bahwa saat ini banyak orang tua yang menyerahkan urusan belajar anak-anaknya pada guru di sekolah sementara mereka sibuk bekerja. Padahal, sekolah sangat mengharapkan peran serta orang tua untuk membimbing anak-anaknya di rumah. Belum maksimalnya fungsi komite sekolah sebagai mediator antara pihak sekolah dan orang tua dalam memotivasi anak untuk belajar menjadi salah satu penyebab permasalahan ini. Terkait dengan hal tersebut, Dinas Dikbudpora menyatakan bahwa saat ini sedang dilakukan konsolidasi peran komite

sekolah oleh Dewan Pendidikan dengan dibentuknya forum komite sekolah di tiap kecamatan. Pada masa depan, komite sekolah diharapkan lebih berperan dalam mendorong orang tua untuk lebih memperhatikan pembelajaran anaknya dan tidak hanya berperan dalam memenuhi keperluan administrasi sekolah.

Masalah ketiga adalah **masih minimnya penguasaan guru dalam metode pengajaran**. Sebagian besar guru masih menerapkan metode mengajar konvensional, seperti ceramah dan mencatat, sehingga kurang menarik minat murid untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Informan setda mencoba membandingkan metode pengajaran di sekolah-sekolah swasta. Mereka menggunakan metode belajar yang menarik dan interaktif serta menyenangkan, tetapi tetap menerapkan disiplin yang tinggi sehingga para murid lebih aktif dan kritis dalam belajar.¹¹ Sebaliknya, sekolah negeri cenderung menggunakan sistem pengajaran satu arah. Pada banyak kasus di KSB, masalah metode pengajaran ini juga dipengaruhi oleh masih terbatasnya ketersediaan media belajar, seperti alat peraga dan LCD. Meski penggunaan LCD termasuk dalam metode yang disukai oleh murid, hasil FGD tingkat kabupaten menunjukkan bahwa tidak sedikit guru yang tidak bisa mengoperasikannya sehingga perangkat LCD yang tersedia sering kali dibiarkan tak terpakai.

Masalah lainnya adalah **penerapan K-13**. Sekolah dan guru tidak siap dalam melaksanakan kurikulum tersebut karena banyak menuntut guru untuk aktif melakukan penilaian terhadap murid dengan berbagai kriteria, menguasai berbagai ketentuan administrasi secara daring, mengajarkan murid untuk lebih aktif dalam belajar, dsb. Meski Dinas Dikbudpora hanya menargetkan 25% penerapan K-13 di KSB, masih ada keragu-raguan guru/sekolah dalam melaksanakannya. Hal ini disebabkan masih minimnya pelatihan terkait pelaksanaan K-13. Kalaupun ada pelatihan yang diberikan, hanya sebagian kecil guru yang terlibat dan mekanisme transfer pengetahuan di antara para guru tidak berjalan sehingga membuat sistem ini terasa lebih sulit untuk dilaksanakan.

Beberapa isu lain yang juga disebutkan oleh para pemangku kepentingan di kelompok ini adalah **kurangnya kualitas kepemimpinan kepala sekolah, masalah ketidaksesuaian latar belakang pendidikan guru, dan masalah pengelolaan pendidikan anak berkebutuhan khusus (ABK) yang belum maksimal, serta isu terkait keterpencilan/jarak sekolah yang menghambat proses pembelajaran murid**. Masalah rendahnya kualitas kepemimpinan kepala sekolah disampaikan oleh Bappeda. Hal ini terkait dengan masih minimnya fokus kepala sekolah pada upaya peningkatan kualitas guru dan siswa. Menurut Bappeda, masih banyak kepala sekolah yang lebih menekankan perannya pada fungsi administratif (dana BOS), mengurus proyek, dan lebih memikirkan sarana prasarana sekolah, sedangkan fungsi supervisi untuk pengembangan kualitas guru dan pembelajaran murid masih terbatas, padahal perkembangan sekolah sangat tergantung pada kualitas kepala sekolahnya.

Isu tentang masalah ketidaksesuaian latar belakang pendidikan guru disinggung oleh pihak setda. Hal ini karena sebagian guru tidak berpendidikan keguruan sehingga tidak mampu memahami kondisi psikologis dan karakter anak. Padahal, hal ini sangat diperlukan guru dalam melakukan pendekatan terhadap anak/murid sehingga mereka bisa melakukan pengajaran secara tepat dan murid bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Tidak jarang guru mengajar tanpa mempedulikan pemahaman murid tentang apa yang disampaikannya di depan kelas.

¹¹Anak informan bersekolah di sekolah swasta terpadu yang memadukan mata pelajaran umum dan agama, serta menggunakan sistem *full day school* (belajar sehari penuh). Di sekolah ini, guru bersifat sangat terbuka dan menggunakan metode yang interaktif saat mengajar.

Isu tentang belum maksimalnya pengelolaan pendidikan bagi ABK diungkapkan oleh Dinas Dikbudpora. Di KSB sudah ada sekolah yang menerapkan sistem pendidikan inklusi. Selain itu, sudah ada juga sekolah luar biasa (SLB) tingkat SD hingga SMA baik negeri maupun swasta. Akan tetapi, berdasarkan informasi dari Bappeda, dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Dikbudpora belum secara eksplisit membahas kebutuhan ABK. Hal ini berpengaruh pada bagaimana SLB memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Pada akhirnya, saat ini pihak SLB-lah yang memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Namun, beberapa bantuan dari Pemerintah Pusat, seperti uang tunai dari program PKH, serta kursi roda dan pakaian sekolah dari PNPM, sudah diterima oleh ABK di KSB.

Terkait dengan isu keterpencilan, Pemerintah KSB sudah membuka sekolah SMP satu atap (satap) sehingga isu ini tidak menjadi hal yang secara signifikan menghambat pembelajaran murid. Dari sisi ketersediaan fasilitas sekolah di lokasi terpencil, kebutuhan pembelajaran khususnya untuk tingkat SD sudah cukup terpenuhi, kecuali sarana perpustakaan yang masih perlu dibenahi dan dilengkapi. Untuk tingkat SMP, masih cukup banyak kebutuhan sekolah di lokasi terpencil yang masih harus dipenuhi.

b) Kelompok Pelaksana Kebijakan

Faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap hasil pembelajaran murid dan merupakan isu terbanyak yang dibahas dalam kelompok ini. Faktor lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan pergaulan. Faktor utama yang disebutkan terkait dengan **dukungan orang tua terhadap pendidikan anak**. Perhatian dan kepedulian orang tua dalam menunjang kebutuhan pendidikan anak masih tergolong rendah.

Para guru di SDN sampel menyatakan bahwa tidak sedikit murid yang ibunya bekerja sebagai TKW di luar negeri atau bekerja *totok batu* emas serta ayahnya yang bekerja sebagai pencari batu emas. Mereka harus bekerja sehari-hari hingga berbulan-bulan. Anak-anak mereka terpaksa tinggal dengan anggota keluarga yang lain, seperti bibi dan nenek, sehingga tidak sepenuhnya mendapatkan pendampingan yang baik untuk belajar. Dukungan orang tua yang rendah juga disebabkan kurangnya kesadaran orang tua akibat rendahnya latar belakang pendidikan mereka. Kondisi keluarga yang kurang harmonis (bercerai) pun menjadi penyebab para orang tua tidak bisa secara intensif mendampingi anak-anaknya belajar.

Faktor lingkungan yang juga disebutkan adalah **pengaruh perkembangan teknologi, seperti gawai, dan maraknya keberadaan rental PlayStation**. Anak-anak lebih tertarik untuk berlama-lama bermain gawai dan mengunjungi tempat penyewaan PlayStation daripada belajar atau membaca buku. Adanya keingintahuan anak yang besar terhadap sesuatu yang baru membuat mereka ingin mencoba hal baru tersebut. Selain itu, terkadang mereka melakukannya karena pengaruh teman. Faktor lingkungan lain yang berpengaruh terhadap rendahnya hasil pembelajaran murid khususnya literasi adalah bahwa **anak-anak lebih senang menggunakan bahasa daerah daripada bahasa Indonesia dengan teman-temannya di sekolah**. Hal ini diungkapkan oleh kepala sekolah dan para guru di salah satu SDN dan SMPN sampel. Kebiasaan ini membuat mereka kurang terlatih membuat kalimat dalam bahasa Indonesia yang merupakan bahasa pengantar dalam pendidikan mereka.

Isu berikutnya adalah **rendahnya motivasi belajar murid**. Salah satu wakil kepala sekolah di SMPN sampel mengatakan bahwa murid-murid lebih senang ribut atau berkeliaran di kelas pada saat guru tidak berada di kelas daripada mengerjakan tugas yang diberikan guru atau berinisiatif untuk belajar

sendiri. Selain itu, kepala/wakil kepala sekolah dan semua guru di SDN sampel juga menyatakan bahwa banyak murid tidak mengerjakan tugas atau PR. Mereka membawa kembali PR yang diberikan dalam keadaan kosong saat dikumpulkan di sekolah. Meski para guru merasa upayanya sudah cukup besar agar para murid semangat belajar, upaya ini belum secara signifikan berdampak pada peningkatan motivasi belajar murid. Beberapa bentuk upaya tersebut adalah menanyakan kepada murid tentang kesulitan yang dihadapi, memberikan pendampingan langsung pada saat jam istirahat/sebelum pulang sekolah, dan memanggil serta meminta orang tua mereka untuk mendampingi anaknya belajar di rumah.

Masalah rendahnya hasil belajar juga disebabkan oleh **masih rendahnya minat baca murid**. Hal ini ditunjang pula oleh **masih minimnya sarana dan prasarana**, khususnya buku pelajaran, buku bacaan, serta alat peraga di sekolah. Kedua faktor tersebut cukup banyak disebutkan oleh para pemangku kepentingan di kelompok ini. Namun, baik di SDN maupun SMPN sampel ditemukan adanya upaya para guru untuk meningkatkan minat baca murid. Di salah satu SD, para guru memaksimalkan fungsi perpustakaan dengan cara mewajibkan setiap murid untuk membaca buku bacaan pada pagi hari sebelum masuk ke ruangan kelas. Demikian juga halnya di kedua SMPN sampel yang beberapa gurunya memerintahkan murid untuk membaca di perpustakaan jika ada guru yang tidak hadir di sekolah.

Isu pembelajaran yang juga disinggung adalah masih **rendahnya kualitas guru**. Hal tersebut diakui oleh sebagian kecil pemangku kepentingan kelompok ini; salah satunya adalah pengawas sekolah. Kegiatan penunjang peningkatan kapasitas guru, seperti pelatihan, belum optimal yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya **kemampuan dan penguasaan guru dalam hal metode mengajar**. Hal ini diakui oleh para guru yang terutama menyoroti kurangnya penguasaan mereka terhadap fasilitas TI. Sebagian guru menganggap bahwa penggunaan LCD/PowerPoint untuk mengajar sangat diminati oleh para murid dan menarik perhatian murid untuk mengikuti pelajaran, tetapi guru-guru tersebut tidak memiliki kemampuan yang baik untuk mengoperasikannya.

Hal yang juga sering disebutkan oleh beberapa pemangku kepentingan adalah **adanya perubahan kurikulum dari KTSP ke K-13**. Menurut salah satu pengawas sekolah, perubahan ini membuat para guru kebingungan dan kesulitan dalam mengajar. Hal ini karena mereka masih kurang siap dalam menerapkan kurikulum yang baru (K-13), terutama dalam menggunakan TI dan internet. Sebagai akibatnya, seperti yang disampaikan oleh pengawas sekolah lainnya, meski K-13 ini telah dilaksanakan di semua sekolah (di satu hingga dua kelas), tetapi pada praktiknya masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.

Isu penting yang juga disebutkan oleh sebagian pemangku kepentingan ini adalah **masalah kepemimpinan dan kreativitas kepala sekolah**. Isu ini muncul dari hasil wawancara dengan pengawas sekolah, wakil kepala sekolah SMPN sampel, dan kelompok guru di salah satu SDN sampel. Pada intinya, mereka menyadari bahwa baik buruknya perkembangan sekolah sangat tergantung pada kepemimpinan kepala sekolahnya. Berdasarkan pengalaman para guru di SDN tersebut, akibat kepala sekolah yang memimpinnya tidak kreatif dan inisiatif, kondisi sekolahnya kini sangat tertinggal dibandingkan sekolah lain, baik secara fisik maupun kualitas. Selain itu, kepala sekolah juga tidak melaksanakan fungsi kepemimpinan dan supervisinya terhadap para guru padahal para guru merasa bahwa banyak permasalahan perlu diselesaikan untuk meningkatkan kualitas murid.

c) Kelompok Pendukung Kebijakan

Serupa dengan kelompok pelaksana kebijakan, sebagian besar pemangku kepentingan di kelompok pendukung juga menyebutkan bahwa **faktor dukungan dan perhatian orang tua yang rendah** menjadi penyebab utama rendahnya hasil pembelajaran murid. Kondisi ekonomi keluarga yang minim menuntut para orang tua, baik bapak maupun ibu, sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mayoritas masyarakat KSB yang bekerja sebagai petani (85%) bekerja dari pagi hingga sore hari baik saat musim tanam maupun memasuki masa panen. Tak jarang para ibu harus bekerja menjadi TKW di luar negeri sehingga tidak ada yang mengingatkan dan menemani anak-anak mereka belajar di rumah secara intensif. Faktor rendahnya pendidikan orang tua juga berimplikasi pada rendahnya kesadaran mereka akan pentingnya melakukan pendampingan anak dalam belajar. Mereka terkesan menyerahkan seluruh tanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya kepada sekolah. Salah satu ketua komite sekolah juga menyampaikan bahwa faktor kesibukan orang tua menyebabkan anak-anak tidak mendapatkan haknya untuk belajar dengan baik. Anak-anak tidak sempat sarapan pagi karena para orang tua sudah harus berangkat kerja ke sawah atau berdagang sejak pagi hari. Sebagai akibatnya, anak-anak tersebut sulit berkonsentrasi saat belajar di sekolah karena lapar.

Isu penting kedua adalah **masalah ketersediaan sarana belajar, khususnya buku pelajaran**. Idealnya, satu buku diakses oleh satu murid. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa satu buku diakses oleh dua hingga tiga murid. Hal ini sangat menyulitkan mereka untuk belajar, terutama saat mengerjakan PR di rumah, apalagi terkadang rumah para murid tidak berdekatan. Berdasarkan keterangan informan PGRI, ketersediaan buku pelajaran kurang karena sekolah membatasi alokasi dana BOS untuk tujuan ini. Sebenarnya, beberapa komite sekolah yang diwawancarai sangat antusias mengusulkan agar partisipasi orang tua murid yang selama ini hanya dalam bentuk fisik bangunan dialihkan ke pengadaan buku pelajaran. Namun, hal ini belum didengar oleh pihak sekolah. Sebagian orang tua pun merasa bahwa pengadaan buku adalah tanggung jawab sekolah sepenuhnya.

Minat baca murid yang rendah menjadi isu yang penting dilihat. Sebagian pemangku kepentingan memunculkan isu ini sebagai faktor penentu hasil belajar murid, khususnya terkait kemampuan literasi. Menurut informan PGRI, pembelajaran yang saat ini dilaksanakan belum berbasis perpustakaan. Selain itu, tenaga perpustakaan juga bersifat hanya sebagai pelengkap; fungsi vitalnya dalam menarik minat baca murid belum diperhatikan. Ketersediaan koleksi buku bacaan di perpustakaan juga terbatas dan pertambahannya sangat lambat. Jarangnya kegiatan perlombaan terkait literasi juga menyebabkan anak tidak memiliki saluran untuk mengembangkan kemampuan membacanya.

Budaya membaca di lingkungan keluarga pun masih rendah. Salah satu informan komite sekolah mencontohkan tidak adanya kebiasaan keluarga/kerabat yang membawa oleh-oleh berupa buku pada saat bepergian. Pihak LSM yang diwawancarai juga menyatakan bahwa meski lembaganya telah melakukan banyak upaya untuk meningkatkan minat baca murid, dampaknya tidak signifikan karena dukungan kepala sekolah untuk menyukseskan program tersebut rendah. Pihak sekolah terkesan lebih mengutamakan kuantitas murid yang lulus dibandingkan dengan kualitas murid (capaian SPM).

Masalah lainnya adalah **kemampuan anak yang rendah**. Salah satu informan komite sekolah menyatakan bahwa ada beberapa anak yang hasil belajarnya tetap rendah meski guru sudah banyak berupaya untuk mengatasinya. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya asupan gizi murid di masa lalu yang membuat daya pikir dan daya tangkap mereka lemah terhadap materi pelajaran

yang diberikan. Kondisi ini berkaitan erat dengan kondisi ekonomi keluarga yang menyebabkan orang tua mereka tidak mampu memberikan asupan makanan yang sehat dan bergizi.

Permasalahannya adalah murid-murid yang kemampuannya kurang tersebut sering kali juga merupakan **anak-anak yang malas dan sulit sekali diberi motivasi belajar oleh guru**. Menurut informan LSM, penyebab anak malas belajar adalah sekolah yang masih menjadi momok bagi anak-anak. Sekolah juga belum bisa menjadi tempat anak-anak bersekolah atas kesadaran sendiri. Anak-anak yang terus berkutat dengan banyak tugas dan metode pengajaran guru yang kurang menarik membuat para murid enggan belajar.

Perkembangan teknologi dan siaran di media televisi secara perlahan tetapi pasti sangat memengaruhi hasil pembelajaran murid. Hal ini juga disebutkan oleh para pemangku kebijakan. Keingintahuan anak terhadap berbagai perkembangan teknologi dan keinginan untuk mengikuti hal-hal yang dilakukan teman-temannya (tren) membuat mereka lalai untuk belajar. Hal tersebut terkait dengan maraknya permainan (*game*) berbasis teknologi melalui gawai maupun tempat persewaan PlayStation. Mereka berlama-lama berada di tempat rental PlayStation sehingga lupa untuk mengerjakan PR.

Hal yang juga tidak kalah penting dan cukup banyak disinggung oleh para pemangku kepentingan adalah **masalah masih rendahnya kualitas guru**. Berdasarkan informasi dari pihak media massa, sebagian sekolah terutama di wilayah perdesaan/terpencil di KSB masih didominasi oleh guru honorer dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan yang beragam. Ada yang berlatar belakang pendidikan lulusan SMA dan ada yang sudah lulus S-1 tetapi bukan berasal dari jurusan keguruan atau mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan pendidikannya. Kondisi ini menyebabkan pemahamannya terhadap materi pelajaran yang disampaikan terbatas. Selain itu, penguasaan terhadap metode pengajaran juga jauh dari yang diharapkan.

Menurut informan LSM, masalah kualitas guru juga berkaitan dengan sistem seleksi guru PNS yang belum optimal. Sistem seleksi ini tidak secara spesifik mempertimbangkan kelayakan seseorang menjadi guru. Masalah kualitas guru ini terlihat pula pada saat informan LSM melaksanakan program pendampingan guru (untuk pendampingan murid yang mengikuti lomba olimpiade sains). Para guru sangat kesulitan dalam menangkap materi yang disampaikan oleh para tutor, padahal guru yang mengikuti kegiatan tersebut adalah guru-guru pilihan yang telah lolos seleksi sebelumnya. Seorang informan mengatakan, "Jauh dari ekspektasi kami...[harapan kami] materi yg disampaikan oleh pendamping dari Unram itu bisa ditangkap dengan baik, kemudian diserap dengan baik dan harapan kami nanti ditularkan ke anak-anak. Tapi ternyata mereka kayaknya agak susah menangkap materi-materi itu." Penyebab lain rendahnya kualitas guru yang menjadi perhatian informan LSM adalah banyaknya kewajiban administratif, seperti mengurus dana BOS, persyaratan kenaikan pangkat, dan syarat sertifikasi, yang harus dipenuhi guru sehingga tugas utamanya menjadi terbengkalai.

Masalah yang juga dikeluhkan oleh para pemangku kepentingan ini adalah **masalah penerapan K-13**. Metode dalam kurikulum tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh semua guru sehingga menghambat proses pembelajaran. Selain itu, keterbatasan sarana penunjangnya, seperti media belajar (alat peraga) dan jaringan internet, masih menjadi hal yang cukup menghambat. Masalah lain yang juga disebutkan adalah **ketaklengkapan fasilitas sekolah, seperti sarana laboratorium IPA dan komputer; bahkan, masih ada sekolah yang masih kekurangan ruang kelas**.

d) Kelompok Sasaran Kebijakan

Terdapat beberapa isu yang dikemukakan oleh kelompok murid pada saat wawancara. Beberapa isu tersebut terkait dengan alasan bersekolah di sekolah tertentu, pelajaran yang disukai dan tidak disukai, cara guru mengajar yang disukai, cara belajar di sekolah, cara belajar di rumah, akses terhadap pelajaran tambahan/les, dan harapan terhadap kelanjutan pendidikan.

Alasan yang paling sering disebutkan oleh para murid untuk bersekolah di sekolahnya saat ini adalah kedekatan sekolah dengan tempat tinggal mereka. Mereka tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi yang besar. Mereka pun bahkan bisa berjalan kaki menuju sekolah. Alasan lainnya adalah adanya kakak/saudara dan teman di sekolah yang mereka tuju. Alasan ini banyak disebutkan oleh kelompok murid di tingkat SD. Beberapa alasan lain yang banyak disebutkan adalah sekolah yang termasuk dalam kategori sekolah favorit, adanya informasi tentang guru-guru yang baik dan berkualitas dalam mengajar, dan fasilitas sekolah yang lengkap (sarana olah raga, ekstrakurikuler, perpustakaan, laboratorium, dsb.). Ketiga alasan tersebut merupakan alasan yang cukup banyak dilontarkan oleh kelompok murid tingkat SMP. Beberapa alasan lainnya yang cukup sering disebutkan adalah kemauan orang tua, jarak yang dekat dengan rumah saudara, dan adanya kenalan salah satu guru di sekolah tersebut.

Terkait dengan mata pelajaran, para murid menyebutkan pelajaran yang disukai dan tidak disukai dengan berbagai alasannya. Pelajaran yang disukai dan paling banyak disebutkan adalah pelajaran Matematika baik oleh kelompok murid SD maupun SMP. Beberapa murid menyatakan bahwa mereka menyukai pelajaran Matematika karena cara mengajar guru “enak”/bagus, guru mau menjelaskan beberapa kali hingga murid mengerti, mereka suka berhitung, dan mereka bisa berlatih mengerjakan soal supaya bisa mengikuti perlombaan mata pelajaran, seperti olimpiade Matematika. Selain itu, mereka juga menyebutkan bahwa belajar Matematika bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, seperti menghitung uang kembalian, tidak dibohongi orang pada saat berjualan, serta menghitung pendapatan dan pengeluaran sehari-hari. Namun, Matematika juga merupakan pelajaran yang cukup banyak disebutkan sebagai mata pelajaran yang tidak disukai. Hal ini karena, antara lain, pelajaran Matematika dianggap sebagai pelajaran yang sulit dan murid harus menghafal rumus.

Pelajaran lainnya yang disukai dan sering disebutkan oleh para murid adalah Bahasa Indonesia. Mereka menyukai pelajaran tersebut karena bisa membuat puisi, suka membaca buku cerita, bisa belajar menulis, dan gurunya sering melakukan tes secara lisan. Pelajaran lainnya yang cukup disukai oleh murid adalah Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), terutama karena terdapat kegiatan praktik untuk mengenali organ tubuh manusia, serta penjelasan tentang lingkungan sekitar dan kesehatan. Mata pelajaran lainnya yang disebutkan oleh para murid sebagai pelajaran yang mereka sukai adalah IPS, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Agama Islam (PAI). Beberapa murid baik SD maupun SMP yang menyukai pelajaran PAI menyatakan bahwa mereka ingin melanjutkan sekolah ke sekolah agama/pesantren dan menjadi ahli agama (ustaz).

Selain Matematika, beberapa pelajaran yang banyak tidak disukai adalah Seni, Budaya, dan Keterampilan (SBK), terutama oleh murid SD. Beberapa alasan yang disebutkan adalah guru galak dan sering disuruh membuat prakarya seperti kerajinan dan gambar. Sebagian besar murid yang diwawancarai menyatakan tidak tertarik atau tidak mahir dalam membuat karya seni. Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) juga merupakan pelajaran yang kurang disukai oleh para murid SD karena mereka harus menghafal banyak hal-hal terkait kenegaraan. Beberapa murid SMP menyebutkan bahwa mereka kurang menyukai pelajaran Bahasa Inggris. Alasannya adalah guru yang galak dan kurang bagus dalam mengajar, serta kurang lengkapnya sarana penunjang pelajaran tersebut,

seperti kamus. Namun, meski beberapa pelajaran tersebut kurang disukai, hampir semua murid menyatakan bahwa nilai yang diperoleh atas mata pelajaran tersebut tergolong baik.

Para murid juga menyebutkan tentang cara mengajar guru yang disukai oleh murid. Beberapa murid menyatakan bahwa cara mengajar guru sangat menentukan suka atau tidaknya murid terhadap mata pelajaran yang diajarkan dan nilai mereka. Sebagian besar murid menyatakan bahwa mereka menyukai guru yang cara mengajarnya “enak”. “Enak” yang dimaksud adalah guru mengajar dengan cara bercerita, memberi contoh yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, dekat dengan murid, dan mau mendengarkan keluhan-keluhan murid. Selain itu, guru yang dianggap cara mengajarnya “enak” adalah guru yang bisa menyelengi pelajaran dengan guyonan sehingga murid tidak cepat merasa bosan pada saat belajar. Selain cara mengajar yang “enak”, para murid juga menyukai guru yang baik, seperti tidak suka marah/galak, jarang memukul/mencubit, dan sayang kepada murid. Para murid juga menyukai guru yang sabar dalam menjelaskan pelajaran meski harus berkali-kali melakukannya, terutama jika ada murid yang bertanya. Murid-murid menyukai pula guru yang sering memberikan latihan soal dan mengajar dengan cara berdiskusi sehingga para murid terbiasa berlatih dan cepat mengerti. Selain latihan soal, para murid juga senang jika sering diberi PR karena mereka bisa cepat menangkap pelajaran dan tidak selalu menonton televisi di rumah.

Bila guru utama/yang bertugas mengajar tidak hadir, guru tersebut atau pihak sekolah biasanya menugaskan guru lain untuk menggantikannya. Sebagian besar kelompok murid di sebagian besar sekolah sampel menyatakan bahwa guru penggantinya adalah guru dengan mata pelajaran yang sama atau serumpun. Namun, sering kali guru yang tidak hadir menitipkan tugas kepada guru lain untuk dikerjakan oleh murid. Jika tidak ada guru pengganti, biasanya murid disuruh membaca di perpustakaan atau bermain bola di halaman sekolah (terutama murid SD).

Di sekolah, jika murid menghadapi kesulitan dalam belajar, hal yang paling sering dilakukan murid adalah bertanya kepada temannya yang dianggap lebih pintar. Jika temannya tidak bisa menjawab, baru mereka bertanya kepada guru. Sebagian kecil lainnya lebih senang mencari referensi di perpustakaan (murid SMP) atau bertanya kepada orang tua/kakak di rumah setelah pulang sekolah. Di rumah, pihak yang sering membimbing belajar para murid adalah ibu dan/atau kakak. Ada juga yang dibimbing oleh ayahnya, bertanya kepada teman, atau belajar sendiri.

Sebagian besar murid mengaku bahwa mereka belajar di rumah jika ada PR atau tugas dari guru saja. Sebagian besar belajar pada malam hari, tetapi ada juga yang belajar pada siang atau sore hari sepulang dari sekolah atau tempat mengaji. Biasanya, mereka belajar selama 30 menit hingga 1 jam setiap hari.

Media komunikasi yang paling sering digunakan oleh para murid dalam belajar adalah bertemu langsung dengan teman, guru, atau pihak lain yang membimbing. Untuk murid SMP, sebagian menggunakan media telepon (telepon genggam) untuk berkomunikasi dengan teman-temannya ketika menanyakan pelajaran/PR dan menggunakan media internet untuk mendapatkan informasi terkait pembelajaran. Bahkan, di satu sekolah SMP sampel, para murid di salah satu rombongan belajar telah mengakses Quipper School untuk belajar, seperti melihat pembahasan soal.

Terkait dengan metode belajar kelompok, hampir semua murid menyatakan jarang belajar dalam kelompok. Mereka belajar dalam kelompok hanya jika ada tugas dari guru dan harus mengerjakannya secara berkelompok. Sementara itu, untuk pelajaran tambahan, hanya sebagian murid mengikuti pelajaran tambahan/les di luar sekolah. Murid di sekolah yang cukup jauh dari perkotaan menyatakan bahwa tidak ada lembaga pendidikan informal yang menyediakan program pelajaran tambahan di tingkat kecamatan. Hal ini menyebabkan para murid hanya bisa mendapatkan pelajaran tambahan dari guru sekolahnya atau guru dari sekolah lain. Alasan

sebagian murid mengikuti pelajaran tambahan adalah agar mereka cepat mengerti, mengikuti teman-temannya, lebih dekat dengan guru, dan lebih bisa berkonsentrasi. Sementara itu, murid yang tidak mengikuti pelajaran tambahan beralasan tidak berminat/lebih senang belajar sendiri, tidak ada lembaga pendidikan informal, atau karena sudah merasa cukup dengan bimbingan dari kakak/orang tua di rumah. Namun, semua murid menyatakan bahwa mereka membutuhkan pelajaran tambahan di luar sekolah.

Terkait dengan harapan untuk melanjutkan sekolah, semua murid yang diwawancarai berencana untuk melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Ada yang ingin melanjutkan ke sekolah umum, dan ada pula yang berminat melanjutkan pendidikan ke sekolah agama, seperti pesantren. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan sekolah pada jenjang berikutnya adalah, antara lain, kualitas sekolah, dorongan orang tua, fasilitas dan kegiatan ekstrakurikuler lengkap (ada drumben), ingin hafal Alquran, dan banyak teman yang ingin bersekolah di sekolah tersebut.

LAMPIRAN 2

Ringkasan Tiga Metode Komunikasi dan Umpan Balik yang Paling Sering Dilakukan untuk Setiap Kelompok Pemangku Kepentingan di KSB

a) Kelompok Pembuat Kebijakan

Metode komunikasi: tatap muka, telepon/*short message service* (SMS), Facebook

Komunikasi langsung melalui tatap muka merupakan metode yang paling banyak digunakan oleh para pemangku kepentingan di kelompok pembuat kebijakan di KSB. Metode ini berupa rapat, baik rutin maupun insidental/mendadak. Di lingkungan Dinas Dikbudpora, rapat rutin dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi sebulan sekali antara Dinas Dikbudpora dan berbagai jajaran di bawahnya, yaitu pengawas sekolah, UPTD, kepala sekolah, guru-guru sekolah inti, serta perwakilan komite sekolah dan wali murid. Sementara itu, pertemuan yang sifatnya insidental, seperti rapat sosialisasi dan rapat kegiatan, dilakukan dengan mengundang peserta.

Undangan bagi peserta, baik rapat rutin maupun insidental, dilakukan dengan menggunakan surat secara formal. Namun, SMS atau telepon terkadang tetap digunakan untuk memastikan para peserta menghadiri kegiatan tersebut. SMS sebagai media komunikasi juga sering digunakan di lingkungan internal Dinas Dikbudpora, terutama di antara para pegawai dengan jabatan yang setara atau yang ada di bawahnya. Sementara itu, komunikasi antara pegawai dan atasannya lebih sering dilakukan dengan cara bertemu langsung sebagai bentuk penghormatan/kesopanan.

Di lingkungan Bappeda, terdapat rapat koordinasi tiga bulanan (triwulan) dengan Dinas Dikbudpora, misalnya dalam membahas serapan anggaran kegiatan Dinas Dikbudpora, capaian SPM, dan peningkatan kapasitas pendidik. Selain itu, pertemuan langsung dilakukan Bappeda dengan mengundang pihak Dinas Dikbudpora untuk membahas strategi dan anggaran yang akan dimasukkan dalam kebijakan RPJMD. Hal ini dilakukan beberapa waktu lalu saat penyusunan RPJMD 2016–2021. Komunikasi juga dilakukan tidak hanya melalui surat undangan resmi sebagai pemberitahuan formal kedinasan, tetapi juga tetap menggunakan telepon atau SMS sebagai bentuk undangan informal.

Penggunaan surat resmi juga dilakukan oleh pihak setda, dalam hal ini di bawah Asisten Daerah Bidang Pemerintahan (Asda 1), untuk mengundang peserta dalam rapat koordinasi lintas sektoral, termasuk dengan Dinas Dikbudpora. Meski kegiatan yang dilaksanakan oleh Asda 1 tidak berkaitan langsung dengan hasil pembelajaran (berupa lomba sekolah sehat dan pemuda pelopor), tetapi komunikasi pihak Asda 1 dengan sekolah (kepala sekolah, guru, murid) cukup sering dilakukan terutama saat kunjungan untuk penilaian sekolah sehat. Kegiatan kunjungan juga dilakukan oleh pihak DPRD, misalnya, dalam melakukan klarifikasi terhadap laporan masyarakat terkait pendidikan kepada sekolah/Dinas Dikbudpora.

Selain berbagai pertemuan formal, komunikasi informal juga terjalin lintas sektoral di KSB. Hal ini cukup terstruktur terjadi sejak diberlakukannya kegiatan wajib sholat zuhur dan asar bersama bagi semua pegawai pemerintahan di KSB yang kemudian dilanjutkan dengan makan siang bersama (mulai 2016). Kegiatan ini sering kali dimanfaatkan untuk melakukan koordinasi informal. Hal ini, misalnya, diakui oleh Bappeda yang bertemu langsung dengan kepala Dinas Dikbudpora dan membicarakan hal terkait bidang pendidikan. Komunikasi informal melalui telepon juga cukup lancar terjadi karena pejabat di satu instansi KSB sering kali tergabung dengan organisasi bidang pendidikan lainnya. Misalnya, kepala bidang Sosial-Budaya Bappeda juga menjabat sebagai anggota

Dewan Pendidikan sehingga cukup intensif berkomunikasi dengan pengurus Dewan Pendidikan dengan cara bertemu langsung atau melalui telepon/SMS dan WhatsApp.

Sebagian pegawai Dinas Dikbudpora telah menggunakan surel untuk mengirim informasi ke instansi lainnya, terutama di lingkungan internal Dinas Dikbudpora. Terdapat pula komunikasi melalui grup Facebook¹². Grup Facebook ini merupakan inisiatif kepala seksi bidang pendidikan dasar Dinas Dikbudpora pada 2015. Grup ini digunakan sebagai media komunikasi, diskusi, dan berbagi para guru, misalnya berbagi pengalaman pembelajaran yang diperoleh saat KKG.

Selain komunikasi yang sifatnya antarinstansi atau pribadi, ada juga sarana komunikasi yang disediakan oleh Dinas Dikbudpora untuk masyarakat, yaitu unit pengaduan di Dinas Dikbudpora. Unit ini merupakan sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan/aduan terkait permasalahan pendidikan secara umum dan bagi Dinas Dikbudpora sangat berguna sebagai masukan untuk perbaikan ke depan.

b) Kelompok Pelaksana Kebijakan

Metode komunikasi: tatap muka, telepon/SMS, WhatsApp/surel/Facebook

Terdapat kegiatan rapat koordinasi sebulan sekali antara pengawas, UPTD, kepala sekolah, dan Dinas Dikbudpora. Komunikasi yang digunakan untuk kegiatan tersebut bersifat formal melalui surat undangan meski terkadang media telepon atau SMS tetap digunakan. Kedua media tersebut juga sering kali digunakan sebagai media undangan rapat yang sifatnya mendadak karena dianggap lebih praktis dan cepat diterima oleh pihak yang akan diundang.

Rapat yang juga menggunakan undangan resmi adalah rapat orang tua murid yang dilakukan setiap awal tahun ajaran baru. Pihak sekolah mengundang semua orang tua murid untuk membicarakan penggunaan dana dan kebutuhan sekolah, sekaligus merundingkan solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya, pihak sekolah menyosialisasikan hasil rapat melalui surat pemberitahuan yang dikirim kepada semua orang tua murid. Komunikasi melalui surat resmi juga dilakukan oleh semua sekolah sampel untuk mengundang orang tua datang ke sekolah karena anaknya bermasalah, misalnya karena kenakalan atau kemampuan yang kurang dalam belajar. Jika wali kelas sudah tidak bisa menangani kenakalan murid, wali kelas akan berkoordinasi dengan guru Bimbingan Penyuluhan (BP) untuk memanggil murid tersebut. Guru BP akan mengundang orang tua murid untuk membicarakan masalah si anak. Namun, ada juga sekolah sampel yang gurunya memanggil orang tua melalui murid tanpa menggunakan surat resmi.

Kegiatan pertemuan para kepala sekolah dan guru juga dilakukan melalui forum kelompok kerja kepala sekolah (K3S)/musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) dan KKG/MGMP. Namun, sebagian besar forum ini tidak aktif dan materi yang dibahas sering kali tidak terkait dengan hasil pembelajaran (terbatas pada pembuatan soal ujian). Di tingkat sekolah, ada juga kegiatan rapat internal antara kepala sekolah dan para guru satu hingga tiga kali per semester untuk membahas permasalahan dan rencana pembelajaran, serta pembagian tugas guru. Baik kegiatan para kepala sekolah/guru maupun di lingkungan internal sekolah, media komunikasi yang paling sering digunakan adalah telepon atau SMS. Media tersebut digunakan sekadar untuk mengingatkan para kepala sekolah/guru agar hadir dalam kegiatan K3S/MKKS atau KKG/MGMP yang memang sudah terjadwal selain untuk mentransfer informasi yang akan dibahas dalam forum-forum tersebut.

¹²Akun grup Facebook yang dimaksud bernama Pangkalan Data Pendidikan KSB.

Komunikasi melalui telepon atau SMS juga terjadi di antara para guru ketika berada di luar jam sekolah biasanya jika mereka ingin menanyakan atau menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan sekolah. Selain itu, ada juga komunikasi melalui telepon atau SMS antara UPTD dan kepala sekolah/guru serta antara guru dan orang tua. Di sekolah sampel, beberapa orang tua menghubungi guru karena beberapa alasan: anaknya belum tiba di rumah, padahal jam sekolah sudah selesai; anak tidak masuk sekolah karena sakit; dan orang tua ingin mengetahui kondisi anaknya saat ada kegiatan kunjungan belajar (*study tour*) ke luar daerah.

Beberapa pihak juga menggunakan metode tatap muka langsung (bukan rapat) untuk berkomunikasi. Para kepala sekolah sering kali datang langsung ke kantor Dinas Dikbudpora untuk menanyakan beberapa hal, misalnya, terkait dana BOS atau aktif mencari informasi tentang adanya program/bantuan. Demikian juga halnya dengan UPTD yang lebih memilih bertemu langsung dengan Dewan Pendidikan dan bahkan orang tua murid terutama karena karakter kepala UPTD yang senang bersosialisasi dengan banyak orang. Sementara itu, UPTD lebih sering bertemu dengan kepala sekolah dan guru secara langsung pada saat melakukan kunjungan ke sekolah atau saat pihak sekolah datang ke kantor UPTD untuk berkonsultasi atau menyerahkan laporan bulanan sekolah. Kunjungan langsung juga dilakukan oleh pengawas sekolah ke sekolah-sekolah binaannya.

Sebagian para pemangku kepentingan di kelompok ini sudah menggunakan surel untuk berkomunikasi. UPTD dan pengawas sekolah menggunakan surel untuk berkomunikasi dengan Dinas Dikbudpora, misalnya, untuk mengirim laporan tertentu. Guru juga menggunakan surel untuk berkomunikasi dengan para murid, terutama guru di SMPN sampel, untuk mengirim soal atau bahan/materi belajar. Demikian juga halnya dengan penggunaan media WhatsApp. Di lapangan, tidak ditemukan adanya grup WhatsApp di kalangan para pelaksana kebijakan ini dan penggunaannya lebih banyak antarindividu saja. Media Whatsapp juga sudah digunakan guru dan murid untuk kepentingan pembelajaran, seperti yang diungkapkan oleh salah satu wakil kepala sekolah SMPN sampel.

Selain itu, ada juga guru di salah satu SMPN sampel yang menggunakan aplikasi Quipper School. Sebenarnya, cukup banyak hal yang bisa dilakukan oleh guru dan murid melalui aplikasi ini, tetapi pada saat ini guru menggunakannya hanya untuk memberikan tugas, PR, ataupun ujian harian bagi para murid. Di sekolah, pada saat akan memberikan tugas melalui media ini, guru menyuruh semua murid datang ke laboratorium komputer dan mengakses soal melalui komputer dan jaringan internet sekolah. Di luar sekolah, tiap murid diminta untuk mengakses soal menggunakan jaringan internet pada telepon genggam ataupun di rental internet. Aplikasi ini memudahkan guru karena ia tidak perlu menuliskan atau memperbanyak soal untuk murid.

Terkait dengan media sosial, kepala UPTD, pengawas sekolah, dan sebagian besar guru di sekolah sampel telah memiliki akun Facebook pribadi. Di antara mereka, ada juga yang tergabung dalam grup Facebook Pangkalan Data Pendidikan KSB yang dikoordinasi oleh Dinas Dikbudpora KSB. Secara pribadi, kepala UPTD mengaku pernah menggunakan akun Facebook untuk menyampaikan informasi terkait pendidikan, seperti pelaksanaan lomba-lomba dan prestasi/hasil ujian murid di KSB. Sementara itu, baru sebagian kecil guru yang menggunakan Facebook untuk keperluan pendidikan.

c) Kelompok Pendukung Kebijakan

Metode komunikasi: tatap muka, telepon/SMS, WhatsApp/Blackberry Messenger (BBM)/Facebook

Sebagian besar forum KKG dan MGMP tergolong kurang aktif. Bahkan, ada KKG yang sudah tidak aktif sama sekali, seperti halnya yang terjadi di KKG gugus 2. Selain frekuensi pertemuan yang jarang dilakukan, materi yang dibahas juga hanya seputar pembuatan soal menjelang ujian. Hal ini cukup

dikeluhkan oleh beberapa guru yang diwawancarai karena mereka merasa tidak memiliki wadah untuk saling belajar dan berbagi pengalaman dengan para guru dari sekolah lain. Padahal, berdasarkan pengalaman salah satu informan yang pernah mengikuti KKG yang cukup aktif (saat masih bertugas di sekolah lain di luar KSB), forum KKG dirasa sangat membantu guru dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi di kelas. Kondisi tersebut mendorong salah satu SDN sampel untuk melaksanakan KKG di lingkungan internal sekolahnya. Namun, hal ini dirasa kurang efektif karena pengalaman dan permasalahan yang disampaikan terbatas pada lingkungan internal sekolah yang sama-sama dihadapi oleh guru.

Komunikasi antara sekolah dan orang tua/wali murid yang rutin dilakukan juga terbatas pada rapat yang dilaksanakan setahun sekali, yaitu pada awal tahun ajaran baru untuk membicarakan partisipasi mereka di sekolah. Selain itu, pertemuan kepala sekolah/guru dengan komite sekolah hanya bersifat formalitas dan terbatas untuk kepentingan administratif, terutama untuk pengesahan anggaran dana BOS, padahal beberapa komite sekolah yang diwawancarai terlihat memiliki kepedulian yang tinggi, tetapi belum sepenuhnya didengar oleh pihak sekolah. Kepedulian tersebut berupa, antara lain, munculnya ide-ide segar, seperti usulan pemberian pelajaran tambahan bagi murid, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, dan bantuan orang tua yang tidak terbatas pada pembangunan fisik tetapi berupa buku pelajaran. Di salah satu SDN sampel, komunikasi yang kurang baik antara sekolah dan komite sekolah telah menyebabkan kegiatan pertemuan orang tua murid di sekolah tersebut tidak terlaksana pada satu tahun terakhir. Hal ini tentu merugikan kedua belah pihak. Namun, ada juga komite sekolah SMPN sampel yang cukup sering datang ke sekolah untuk sekadar berkomunikasi secara informal dengan kepala sekolah dan para guru untuk membicarakan hal-hal terkait dengan sekolah, termasuk pembelajaran murid.

Komunikasi yang lebih strategis telah dilakukan oleh para pemangku kepentingan pendukung lainnya seperti Dewan Pendidikan, LSM, PGRI, media massa, dan PT NNT. Aksi mereka berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pembelajaran murid di sekolah. Meski kepengurusan Dewan Pendidikan yang terbaru baru saja terbentuk pada Juni 2016 (setelah Dewan Pendidikan sebelumnya menjabat dua periode), beberapa aksi telah dilakukan. Di antaranya adalah membentuk forum komite sekolah per kecamatan (Juli 2016) dan melakukan pemantauan ke sekolah-sekolah.

Forum komite sekolah beranggotakan lima orang per kecamatan dan bertugas mendampingi komite sekolah dalam memaksimalkan fungsinya. Forum ini melakukan pertemuan seminggu sekali, yaitu setiap Jumat. Di lapangan, salah satu komite sekolah yang diwawancarai mengaku cukup sering berkomunikasi dan berkonsultasi langsung dengan forum komite sekolah yang ada di kecamatannya. Komunikasi antara Dewan Pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya, seperti Dinas Dikbudpora, media, PT NNT, DPRD dan bahkan Bupati, juga terjalin cukup baik dan intensif baik melalui tatap muka, telepon, maupun SMS. Bahkan, beberapa di antaranya sudah terjalin melalui media WhatsApp.

Dalam menjalankan program terkait dengan minat baca murid, pihak LSM cukup intensif bertemu secara langsung dengan pihak sekolah saat kegiatan berlangsung dan dengan Dinas Dikbudpora khususnya saat penyerahan laporan kegiatan (sebulan sekali). Secara formal, PT NNT juga berpartisipasi langsung dalam kegiatan musyawarah dusun (musdus) hingga musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kabupaten dalam rangka menyinkronkan program PT NNT dengan kegiatan pembangunan Pemda KSB. Kegiatan pertemuan juga dilakukan oleh PGRI dengan para guru.

Sementara itu, komunikasi tidak langsung melalui telepon, SMS, dan Whatsapp serta surel juga cukup intensif terjalin di antara LSM dan pihak PT NNT karena dalam hal ini LSM tersebut mendapatkan dana dari PT NNT dalam melaksanakan programnya. Pihak media massa juga

menggunakan telepon, SMS, dan WhatsApp untuk mendapatkan pemberitaan dan melakukan komunikasi tatap muka langsung dengan berbagai narasumber, termasuk dengan bupati/DPRD.

Media sosial lainnya, seperti BBM dan Facebook, telah digunakan oleh para pemangku kepentingan di kelompok ini. Dewan Pendidikan telah memiliki akun Facebook sejak sebulan terakhir. Demikian juga halnya dengan pihak LSM Yayasan Nusa Tenggara Pratama (YNTP), perusahaan, dan media massa yang telah memiliki akun Facebook secara kelembagaan. Meski pemanfaatannya masih terbatas, media sosial bisa menjadi sarana yang baik untuk mengomunikasikan berbagai hal terutama yang terkait dengan pendidikan. Selain itu, PT NNT memiliki situs web yang dapat diakses oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui program-program yang sudah ataupun akan dijalankan.

Dalam skala yang lebih luas, di KSB terdapat forum PDPGR yang merupakan forum pertemuan antara masyarakat KSB dari berbagai kalangan (kepala desa, pemuda, dan tokoh masyarakat) dan para pemimpinya (bupati dan jajarannya serta pejabat lainnya). Forum ini dilaksanakan secara rutin setiap Kamis malam dan dimulai dengan salat Isya dan mengaji Surah Yasin bersama. Dalam forum ini, masyarakat dipersilakan mengungkapkan berbagai aspirasi atau masalah yang dihadapi di berbagai bidang yang kemudian akan direspons langsung oleh pejabat terkait untuk ditindaklanjuti. Selain berupa pertemuan langsung, forum PDPGR ini juga ada dalam bentuk grup WhatsApp. Grup ini beranggotakan lebih dari 100 orang dari berbagai kalangan masyarakat KSB, termasuk bupati dan pejabat lainnya. Masyarakat juga memiliki kebebasan untuk memberikan informasi ataupun pengaduan terkait pembangunan di KSB melalui grup WhatsApp tersebut.

d) Kelompok Sasaran Kebijakan

Metode komunikasi: tatap muka, telepon, WhatsApp/surel

Media komunikasi yang digunakan oleh para murid lebih sederhana daripada media komunikasi tiga kelompok pemangku kepentingan sebelumnya. Para murid lebih banyak berkomunikasi secara langsung melalui tatap muka, baik dengan sesama murid maupun dengan gurunya. Di sekolah, jika ada pelajaran yang kurang dimengerti, sebagian besar murid terlebih dahulu bertanya kepada teman yang dianggap pintar. Namun, jika temannya tidak bisa menjawab, mereka kemudian langsung bertanya kepada guru dengan mendatangi guru di mejanya—hal ini terkadang menyebabkan banyak murid berkumpul di meja guru (murid SDN sampel)—atau dengan mengangkat tangan untuk meminta guru mengulang penjelasannya hingga semua murid mengerti.

Di rumah, sebagian besar murid yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka bertanya langsung kepada orang tua atau kakaknya jika ada pelajaran yang kurang dimengerti atau saat kesulitan mengerjakan PR. Jarang sekali murid menyatakan bahwa mereka bertanya kepada teman baik secara langsung maupun melalui telepon. Hanya saat ada tugas kelompok, barulah mereka belajar secara bersama-sama. Bagi murid yang mengikuti pelajaran tambahan di luar sekolah, mereka menanyakan pelajaran yang kurang dimengerti kepada guru *les*-nya.

Komunikasi yang memanfaatkan jaringan internet sudah mulai banyak dilakukan oleh murid, terutama murid SMP. Murid di SMPN sampel berkomunikasi dengan guru melalui surel, misalnya untuk mengakses tugas atau PR yang diberikan guru. Selain itu, ditemukan pula murid SMPN sampel yang menggunakan Quipper School untuk mengakses soal tugas, PR, dan ujian harian dari guru Bahasa Inggris. WhatsApp juga digunakan sebagai media komunikasi di antara murid dan guru serta dengan sesama murid seperti terungkap pada saat wawancara dengan para orang tua murid di salah satu SMPN sampel.

Semua murid SMP yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka memanfaatkan mesin pencari Google sebagai jalan terakhir jika semua pihak yang dimintai bantuan tidak dapat memberikan solusi. Sementara itu, media sosial, seperti Facebook, jarang sekali digunakan murid untuk keperluan pembelajaran. Namun, ada murid SMPN sampel yang mengaku pernah menanyakan bahan PR kepada temannya melalui Facebook.

LAMPIRAN 3

Tabel A1. Daftar Mitra Potensial di Daerah untuk INOVASI dan Forum untuk Berdialog di KSB

No	Instansi/Kategori Informan	Jabatan Informan
1	Dinas Dikbudpora	- Kepala Seksi PTK
		- Sekretaris Dinas Dikbudpora KSB
2	Pengawas sekolah	- Pengawas SD 13 Taliwang
		- Pengawas SMP
		- Pengawas SD 6 Taliwang
3	Bappeda	- Kepala bidang sosial budaya/kepala subbidang sosial budaya
		- Sekretaris Bappeda KSB
4	Media massa	Kepala biro KSB: Lombok Pos
5	Organisasi nonpemerintah (ornop)	Direktur operasional: Yayasan Nusa Tenggara Pratama (YNTP)
6	Dewan Pendidikan	Ketua/sekjen
7	KKG	Ketua gugus 3
8	PGRl	Wakil ketua PGRl
9	Yayasan pendidikan/ornop	Ketua Nahdlatul Wathan
10	Perusahaan	<i>corporate social responsibility</i> (CSR) PT NNT
11	Lurah	- Lurah 1
		- Sekretaris Kelurahan 2
12	UPTD	Kepala UPTD Taliwang
13	Setda	Kepala subbagian pendidikan (bagian kesra-asisten daerah pemerintahan)
14	DPRD	- Wakil Ketua Komisi 1
		- Ketua Komisi 1 (Pendidikan)
15	SDN A	- Kepala sekolah/wali kelas 5
		- Enam orang guru
		- Enam orang tua murid
		- Enam murid laki-laki kelas 5
		- Tiga murid perempuan kelas 5
		- Ketua komite sekolah
16	SDN B	- Kepala sekolah
		- Enam orang guru
		- Enam orang tua murid
		- Enam murid laki-laki kelas 5
		- Enam murid perempuan kelas 5
		- Ketua komite sekolah
17	SMPN A	- Wakil kepala sekolah
		- Enam orang guru

No	Instansi/Kategori Informan	Jabatan Informan
		- Enam orang tua murid
		- Enam murid laki-laki kelas IX
		- Enam murid perempuan kelas IX
		- Ketua komite sekolah
18	SMPN B	- Wakil kepala sekolah
		- Enam orang guru
		- Enam orang tua murid
		- Enam murid laki-laki kelas IX
		- Enam murid perempuan kelas IX
		- Ketua komite sekolah
20	Mantan bupati periode 2005–2015	Mantan bupati periode 2005–2015
21	Mantan pengawas sekolah	Mantan pengawas sekolah
22	Kepala sekolah nonsampel	Kepala SMPN 6 Taliwang
23	Forum komite sekolah	Ketua forum komite sekolah tingkat kecamatan Jereweh
25	Pemerhati pendidikan	Pemerhati pendidikan/yayasan pendidikan swasta

LAMPIRAN 4

Tabel A2. Matriks Nilai Pemangku Kepentingan di KSB

Pemangku Kepentingan	Potensi untuk Berkontribusi (Tinggi/Menengah/Rendah)	Kemauan untuk Terlibat (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pengaruh Aktual terhadap Pembelajaran (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pentingnya Pemangku Kepentingan Tersebut Dilibatkan (Tinggi/Menengah/Rendah)
Kelompok Pembuat Kebijakan				
Dinas Dikbudpora (Kasi PTK)	<p>Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> Secara lembaga, Kasi PTK berperan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pendidik/guru Merupakan lembaga yang potensial melahirkan program/kebijakan untuk peningkatan hasil pembelajaran, misalnya, dengan mengadakan pelatihan dalam kerangka peningkatan uji kompetensi guru 	<p>Menengah</p> <ul style="list-style-type: none"> Informan mengaku tetap bekerja meningkatkan pembelajaran sesuai peran dan fungsinya Terlihat kurang antusias atau bersemangat saat menyampaikan program-program yang telah dilakukan 	<p>Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> Sering memfasilitasi guru melalui penyelenggaraan pelatihan peningkatan kapasitas guru Turun langsung melakukan bimbingan dan pembinaan di sekolah melalui pengawas sekolah Melakukan pemetaan sekolah yang kekurangan dan kelebihan guru (profil sekolah) 	<p>Menengah</p> <ul style="list-style-type: none"> Tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) berdampak langsung terhadap proses dan hasil pembelajaran di sekolah Informan terlihat kurang antusias pada saat menyampaikan program-program atau pemikiran-pemikirannya terkait pendidikan
Bappeda (kabid sosial budaya)	<p>Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> Bidang sosial-budaya Bappeda adalah bidang yang menangani sosial budaya termasuk pendidikan Bappeda memiliki tupoksi dalam fungsi koordinasi dan perencanaan penganggaran Berperan untuk mendorong peningkatan kondisi pendidikan melalui penganggaran 	<p>Tinggi</p> <p>Informan memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap pendidikan, terlihat dari pandangannya bahwa pembangunan pendidikan harus dimulai dari pembangunan karakter anak melalui program-program pemda: sekolah terpadu berbasis ikhlas jujur dan sungguh-sungguh (IJS)</p>	<p>Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan Dinas Dikbudpora terkait penyusunan RPJMD/P dan mengarahkan rencana strategis (renstra) (mendorong perencanaan anggaran untuk pembiayaan pelatihan guru, lomba-lomba, dsb.) Penguatan regulasi terkait pendidikan Mendorong komitmen dari semua pemangku kepentingan Kabid sosial-budaya Bappeda merupakan anggota Dewan Pendidikan 	<p>Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> Memiliki peran strategis dalam hal koordinasi, perencanaan, penganggaran, dan penguatan regulasi Informan memiliki ketertarikan yang besar terhadap pendidikan; salah satu bentuknya adalah menjadi pengurus Dewan Pendidikan
DPRD	<p>Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> Dukungan penganggaran melalui badan anggaran (banggar). 	<p>Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> Memperjuangkan anggaran melalui pembahasan di banggar 	<p>Tinggi</p>	<p>Tinggi</p> <p>Merupakan pemangku kepentingan yang berperan dalam</p>

Pemangku Kepentingan	Potensi untuk Berkontribusi (Tinggi/Menengah/Rendah)	Kemauan untuk Terlibat (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pengaruh Aktual terhadap Pembelajaran (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pentingnya Pemangku Kepentingan Tersebut Dilibatkan (Tinggi/Menengah/Rendah)
	<p>Misalnya, anggaran untuk fasilitas sekolah hanya akan disetujui ketika pembahasan di banggar sudah selesai</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontrol pelaksanaan anggaran. Misalnya, jika ada masalah, DPRD memanggil pihak yang bersangkutan, terutama kepala dinas 		<ul style="list-style-type: none"> Membahas secara keseluruhan tentang anggaran yang diajukan oleh SKPD, termasuk Dinas Dikbudpora Terus bersinergi dengan pemerintah Menganggarkan perpustakaan keliling (ke sekolah-sekolah) Memfasilitasi pemberlakuan kebijakan pendidikan gratis 	<p>penganggaran. Tanpa persetujuan pihak DPRD, kegiatan/program/kebijakan tidak akan berjalan</p>
Asda	<p>Rendah</p> <p>Fungsinya hanya bersifat koordinatif, berbagi, dan kegiatannya tidak berkaitan dengan pembelajaran (lebih ke perlombaan sekolah sehat dan pemuda pelopor)</p>	<p>Rendah</p> <p>Keterlibatan tidak langsung dengan pembelajaran. Namun, ada keinginan untuk menambah kegiatan di subbagian pendidikan, yaitu kegiatan iman dan takwa (imtak) untuk membentuk karakter anak, tetapi tidak bisa terwujud karena keterbatasan anggaran</p>	<p>Rendah</p> <ul style="list-style-type: none"> Kegiatannya tidak memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap pembelajaran Melakukan komunikasi langsung dengan pihak sekolah pada saat kunjungan untuk melakukan penilaian sekolah sehat dan hal ini dijadikan sebagai sarana berbagi dengan guru/murid tentang kondisi sekolah secara umum (tidak secara spesifik berkaitan dengan pembelajaran) 	<p>Menengah</p> <p>Fungsi koordinatif dan konsultasi pemangku kepentingan ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan hasil pembelajaran murid</p>
Kelompok Pelaksana Kebijakan				
UPTD	<p>Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan kepanjangan tangan Dinas Dikbudpora di tingkat kecamatan Fungsinya lebih ke administrasi dan pembinaan manajemen (tingkat TK dan SD) UPTD menilai kehadiran guru dan kesejahteraan guru UPTD membawahi sekolah-sekolah di Kecamatan Taliwang dan Brang Ene: 44 SD ada 39 	<p>Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> Memiliki keinginan untuk memajukan pembelajaran (merasa sudah banyak yang diperbuat melalui ide dan aktif dalam kegiatan yang terkait dengan pembelajaran) Melakukan kerja sama dengan pengawas sekolah Mencoba memberi masukan terkait program UPTD dalam DPA untuk memajukan kualitas pembelajaran 	<p>Menengah</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengawasan dan pembinaan per minggu: kunjungan ke sekolah berdampingan dengan pengawas sekolah UPTD tidak bisa masuk secara langsung ke dalam pembelajaran, hanya ke dalam kehadiran guru dan kesejahteraan guru Sudah berperan dalam hal membantu kesejahteraan guru (memberikan rekomendasi/usulan gaji, sertifikasi, tunjangan daerah) 	<p>Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> UPTD bisa berperan lebih besar dalam meningkatkan hasil pembelajaran melalui pengaktifan gugus dan peningkatan kegiatan perlombaan yang terkait dengan pembelajaran (informan berkemauan besar untuk melakukan hal ini) Pengaruh UPTD dalam pembelajaran melalui program,

Pemangku Kepentingan	Potensi untuk Berkontribusi (Tinggi/Menengah/Rendah)	Kemauan untuk Terlibat (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pengaruh Aktual terhadap Pembelajaran (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pentingnya Pemangku Kepentingan Tersebut Dilibatkan (Tinggi/Menengah/Rendah)
	TK dan pendidikan anak usia dini (PAUD)			pengawasan, dan pembinaan terhadap guru
Pengawas SD (salah satunya SDN B)	Tinggi <ul style="list-style-type: none"> Peran pengawas sekolah melakukan pembinaan langsung kepada pihak sekolah (guru, kepala sekolah, peserta didik) Informan membina dan mengawasi SD yang termasuk dalam gugus 4. KKG gugus 4 termasuk aktif karena mendapatkan bantuan dana dari PT NNT yang bekerja sama dengan Dinas Dikbudpora provinsi 	Tinggi <ul style="list-style-type: none"> Mendorong guru agar melakukan analisis hasil pembelajaran siswa Mendorong guru untuk membuat karya ilmiah 	Tinggi <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pendampingan KKG secara langsung Selain melalui KKG, berbagi via media sosial (Facebook) tentang pembelajaran di kelas Memberikan pemahaman kepada sekolah bahwa tidak ada perbedaan substansial antara K-13 dan KTSP Melakukan supervisi manajerial sekolah (kepala sekolah dan tenaga administrasi sekolah) 	Tinggi <ul style="list-style-type: none"> Informan aktif membina kepala sekolah dan guru Merupakan pengawas sekolah yang membina KKG gugus 4 yang termasuk aktif (mendapat bantuan dari PT NNT)
Pengawas SMP	Tinggi <p>Melakukan pengawasan, pembinaan, dan menjalankan tindak lanjut pembinaan</p>	Tinggi <ul style="list-style-type: none"> Informan memiliki kepedulian/ketertarikan yang besar dalam peningkatan kualitas pembelajaran Informan sangat menguasai peta masalah pembelajaran di KSB 	Menengah <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pembinaan dan pengawasan langsung terhadap sekolah Melakukan penggalian masalah di sekolah terkait proses pembelajaran. Setelah menemukan masalah, melakukan analisis. Setelah itu, baru menyusun program pembinaan dan pendampingan. 	Tinggi <ul style="list-style-type: none"> Memiliki dampak langsung terhadap proses dan hasil pembelajaran di sekolah, misalnya, dengan melakukan supervisi langsung terhadap guru terkait proses belajar mengajar di kelas Memiliki antusiasme yang cukup tinggi dalam mengatasi masalah pembelajaran di KSB
Pengawas SDN A	Menengah <p>Belum pernah mengenyam jabatan sebagai kepala sekolah sehingga saat menjalankan tugas sebagai pengawas sekolah dan menghadapi kepala sekolah yang senior, informan merasa segan</p>	Menengah <p>Kurang memiliki keberanian untuk menerapkan program pengawasan karena merasa belum memiliki pengalaman yang baik (belum pernah menjadi kepala sekolah)</p>	Menengah <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pembinaan dan supervisi manajerial tentang keuangan, administrasi, akademik (masuk ke kelas dan melihat proses belajar mengajar guru) Informan kesulitan menerapkan disiplin terhadap sekolah binaan karena 	Menengah <ul style="list-style-type: none"> Secara kelembagaan, pengawas sekolah merupakan pemangku kepentingan yang strategis karena mampu memberikan pengaruh langsung terhadap sekolah Informan kurang memiliki inisiatif dan keberanian untuk

Pemangku Kepentingan	Potensi untuk Berkontribusi (Tinggi/Menengah/Rendah)	Kemauan untuk Terlibat (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pengaruh Aktual terhadap Pembelajaran (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pentingnya Pemangku Kepentingan Tersebut Dilibatkan (Tinggi/Menengah/Rendah)
			terkendala rasa kekeluargaan antara ia dan pihak sekolah binaan	menetapkan program bagi sekolah binaan
Guru wali kelas 6 (mewakili wawancara kepala sekolah) SDN A	Rendah <ul style="list-style-type: none"> Kepala sekolah tidak melaksanakan tugas supervisi dan pembinaan terhadap guru, seperti cara mengajar guru di kelas Kurang aktif dan inisiatif dalam mencari informasi dari Dinas Dikbudpora 	Menengah <ul style="list-style-type: none"> Kepala sekolah sering sakit-sakitan (sedang mengurus administrasi pensiun) Kepala sekolah cenderung <i>cuek</i> dengan permasalahan pembelajaran di sekolah dan kurang memiliki inisiatif serta kreativitas untuk mendapatkan bantuan untuk sarana dan prasarana sekolah sehingga selama lima tahun menjadi kepala sekolah kondisi sekolah tidak meningkat secara signifikan 	Rendah <ul style="list-style-type: none"> Kepala sekolah kurang perhatian terhadap pemasalahan yang dihadapi guru di kelas. Jika ada permasalahan, kepala sekolah sering kali meminta informan untuk mengatasinya dengan cara informan sendiri Jika ada masalah, para guru hanya bisa berkomunikasi lancar dengan sesama guru, tetapi sungkan untuk berkonsultasi langsung dengan kepala sekolah sehingga masalah yang dihadapi kerap kali tidak terselesaikan 	Rendah <p>Perlu menggiatkan kembali peran kepala sekolah (para guru berharap mendapatkan kepala sekolah pengganti yang perhatian, inisiatif, dan kreatif)</p>
Kepala sekolah SDN B	Tinggi <ul style="list-style-type: none"> Sebagai tokoh sentral pelaksana pendidikan Kepala sekolah sebagai pembina dan pengawas proses pendidikan di sekolah Informan cukup kreatif untuk memunculkan ide-ide yang inovatif untuk mengatasi masalah pembelajaran di sekolahnya 	Tinggi <ul style="list-style-type: none"> Memiliki perhatian dan minat besar untuk meningkatkan hasil pembelajaran: supervisi rutin, inovasi KKG internal, dsb. 	Tinggi <ul style="list-style-type: none"> Mengadakan <i>les</i> dari sekolah dan biayanya (Rp300 ribu/bulan) dari dana BOS Melakukan supervisi dan penilaian kinerja guru dua kali (setiap awal dan akhir tahun pelajaran) Memprakarsai kegiatan KKG di lingkungan internal sekolah antarguru kelas karena KKG di tingkat gugus tidak aktif Sekolah meraih prestasi ujian nasional: urutan ke-9 sekabupaten pada 2015, dan urutan ke-19 dari 94 sekolah sekabupaten pada 2015/2016 	Tinggi <ul style="list-style-type: none"> Upaya yang dilakukan sangat berdampak langsung terhadap proses dan hasil pembelajaran di sekolah Informan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap guru dan murid-muridnya Memiliki ide-ide yang cukup inovatif untuk mengatasi masalah pembelajaran di sekolah
Wakil kepala sekolah SMPN A	-	Tinggi <p>Cukup intensif menyuarakan pentingnya minat baca anak</p>	Tinggi <p>Memberdayakan perpustakaan sekolah</p>	-

Pemangku Kepentingan	Potensi untuk Berkontribusi (Tinggi/Menengah/Rendah)	Kemauan untuk Terlibat (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pengaruh Aktual terhadap Pembelajaran (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pentingnya Pemangku Kepentingan Tersebut Dilibatkan (Tinggi/Menengah/Rendah)
Wakil kepala sekolah SMPN B	Tinggi <ul style="list-style-type: none"> • Sekolah selalu mempunyai target untuk mencapai hasil pembelajaran yang berkualitas • Guru-guru mempunyai kemampuan yang baik • Guru tidak tetap (GTT) yang akan mengajar di sekolah ini selalu dites pada saat rekrutmen • SMPN B mempunyai tenaga pengajar yang mencukupi: guru PNS, guru kontrak, dan guru sukarela 	Tinggi <ul style="list-style-type: none"> • Sekolah selalu mempunyai target untuk menghasilkan hasil pembelajaran yang berkualitas dan membentuk karakter anak • Secara pribadi informan (wakil kepala sekolah bidang akademik) sangat aktif: memantau perkembangan anak didik dari segi akademik, merangkap bendahara BOS, dan bendahara rutin sekolah 	Tinggi <ul style="list-style-type: none"> • Para guru mempunyai kemampuan yang baik: guru GTT yang akan mengajar di sekolah ini selalu dites/seleksi masuk • Sekolah memiliki <i>wifi</i> untuk memperlancar pembelajaran dengan menggunakan TIK • Meningkatkan kualitas guru dengan mengikutsertakan mereka dalam berbagai pelatihan (menjelang diberlakukannya lagi K-13) • Menerapkan kelas unggulan/mandiri dengan fasilitas lebih lengkap dan jam belajar lebih banyak 	Tinggi <p>Kepala sekolah cukup ketat dalam menerapkan tes seleksi masuk bagi guru honorer untuk mempertahankan kualitas hasil pembelajaran</p>
Guru SDN A	Tinggi <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah guru di SDN 06 sudah mencukupi dan rata-rata sudah memenuhi kualifikasi S-1, serta mengajar sesuai dengan bidangnya • Guru-guru bisa bekerja sama memecahkan masalah pembelajaran meski dengan berbagai keterbatasan (kepala sekolah sakit-sakitan/tidak aktif membimbing guru, fasilitas belajar kurang lengkap) 	Tinggi <ul style="list-style-type: none"> • Guru-guru mempunyai inisiatif tinggi dalam menangani anak yang berkemampuan kurang dalam literasi dan numerasi melalui pembinaan khusus 	Menengah <ul style="list-style-type: none"> • Para guru hanya bisa berkomunikasi lancar dengan sesama guru karena sungkan untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah terkait masalah murid (kepala sekolah kurang terbuka) • Untuk anak murid yang tidak pernah mengerjakan PR, guru memberikan buku tulis khusus untuk PR • Mempergunakan waktu istirahat untuk mengajari murid yang kemampuannya masih kurang 	Menengah <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki perhatian dan semangat yang tinggi untuk memajukan sekolah, khususnya terkait dengan murid, meski kurang mendapatkan dukungan yang baik dari kepala sekolah • Guru-guru mempunyai kriteria orang yang diharapkan untuk memimpin sekolah tetapi dinas yang menentukan
Guru SDN B	Menengah <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah guru di sekolah ini sudah mencukupi • Kegiatan KKG tidak aktif 	Tinggi <p>Memiliki kemauan yang tinggi untuk meningkatkan hasil pembelajaran, tetapi terkendala minimnya fasilitas sekolah: alat peraga, buku pelajaran kurang, jaringan internet (<i>wifi</i>) untuk penerapan K-13 tidak tersedia</p>	Menengah <p>Guru memetakan siswa menjadi 3 bagian: kurang, sedang, dan bagus. Murid dengan kategori “kurang” diberikan bimbingan khusus</p>	Menengah <p>-</p>

Pemangku Kepentingan	Potensi untuk Berkontribusi (Tinggi/Menengah/Rendah)	Kemauan untuk Terlibat (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pengaruh Aktual terhadap Pembelajaran (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pentingnya Pemangku Kepentingan Tersebut Dilibatkan (Tinggi/Menengah/Rendah)
Guru SMPN A	Menengah <ul style="list-style-type: none"> Kapasitas guru masih kurang, perlu untuk terus ditingkatkan Penguasaan guru terhadap metode pengajaran terbatas MGMP kurang aktif 	Tinggi <p>Memiliki keinginan untuk mengaktifkan kembali MGMP sebagai sarana berbagi untuk guru</p>	Menengah <ul style="list-style-type: none"> Mencoba berbagai metode belajar untuk menarik minat belajar murid: <ul style="list-style-type: none"> menggunakan InFocus/LCD dalam mengajar, tetapi LCD yang ada di sekolah masih terbatas, hanya ada dua menggunakan metode pembelajaran yang membuat murid aktif dan partisipatif; misalnya, guru banyak memberikan pertanyaan. Tujuannya adalah merangsang siswa untuk berpikir dan mencari tahu Ada selingan humor saat mengajar agar murid tidak mudah bosan 	Tinggi <p>Memiliki kemauan yang besar untuk meningkatkan kualitas diri. Guru di sekolah ini juga sangat menginginkan aktifnya MGMP karena akan sangat berguna bagi guru</p>
Guru SMPN B	-	-	Menengah <p>Mengajar tidak melulu menyampaikan teori, mengajar lebih kreatif dengan menyanyi</p>	-
Yayasan pendidikan Nahdlatul Wathan	Tinggi <ul style="list-style-type: none"> Mendekatkan pendidikan kepada masyarakat Tingkat pendidikan dasar beragam (sekolah dan madrasah) 	-	Menengah <ul style="list-style-type: none"> Program anak angkat daerah berdasarkan kriteria miskin Berkoordinasi dengan baik dengan Dewan Pendidikan dan Dinas Pendidikan Menjangkau ABK/miskin 	Menengah <p>Karena Nahdlatul Wathan memiliki lembaga pendidikan sendiri yang tersebar di beberapa wilayah di KSB</p>
Kelompok Pendukung Kebijakan				
YNTP (ornop)	Tinggi <p>Memiliki tujuan meningkatkan minat baca murid</p>	Tinggi <ul style="list-style-type: none"> Memiliki perhatian yang tinggi terhadap pendidikan, khususnya terkait dengan minat baca murid Memiliki keinginan untuk mengembangkan minat baca 	Menengah <ul style="list-style-type: none"> melaksanakan banyak program yang langsung berkaitan erat dengan minat baca murid (bantuan buku bagi sekolah, pendampingan perpustakaan, 	Tinggi <ul style="list-style-type: none"> Memiliki pengalaman dalam melaksanakan program pengembangan minat baca murid

Pemangku Kepentingan	Potensi untuk Berkontribusi (Tinggi/Menengah/Rendah)	Kemauan untuk Terlibat (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pengaruh Aktual terhadap Pembelajaran (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pentingnya Pemangku Kepentingan Tersebut Dilibatkan (Tinggi/Menengah/Rendah)
		<p>masyarakat dengan bercita-cita membangun kafe yang dilengkapi dengan perpustakaan</p> <ul style="list-style-type: none"> Mendirikan rumah baca di salah satu desa dampingan 	<p>pendampingan murid dan guru untuk persiapan olimpiade, rumah baca, dsb.)</p> <ul style="list-style-type: none"> Sekolah kurang merespons program yang dilaksanakan oleh YNTP Belum terlihat adanya peningkatan minat baca murid 	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki akses yang baik terhadap PT NNT untuk menunjang pendanaan
Dewan Pendidikan	<p>Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengurus beranggotakan orang-orang yang kompeten dari berbagai pemangku kepentingan yang berkaitan dengan bidang pendidikan (perwakilan media massa, LSM, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, pengusaha, pemerhati pendidikan, PNS, PGRI, Dinas Pendidikan, dsb.) Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rp700 juta untuk Dewan Pendidikan (pelatihan) Memiliki saluran yang strategis untuk memotivasi para orang tua agar mendukung/memperhatikan pendidikan anak-anaknya melalui forum komite sekolah yang telah dibentuk 	<p>Menengah</p> <p>Telah menyusun gagasan melalui serangkaian agenda dan program, serta optimistis bahwa kegiatannya mampu memberikan pengaruh nyata dalam pendidikan (meski tidak terkait langsung dengan pembelajaran)</p>	<p>Menengah</p> <ul style="list-style-type: none"> Telah melakukan konsolidasi dan pemantauan saat penerimaan siswa baru Telah mengoordinasi pembentukan forum komunikasi komite sekolah di tiap kecamatan Dewan Pendidikan periode 2005–2015 tidak aktif. Untuk periode 2016–2021, baru terbentuk pada Juni 2016 sehingga baru sedikit kegiatan yang telah dilaksanakan Belum ada aksi yang menasar pembelajaran secara langsung 	<p>Tinggi</p> <p>Meski baru terbentuk, pengurus memiliki semangat dan antusiasme yang besar dalam menjalankan peran dan program-program yang telah disusun. Dewan Pendidikan juga memiliki peran yang sangat strategis untuk memengaruhi kebijakan dan masuk ke dalam masyarakat untuk memengaruhi mereka agar memprioritaskan pendidikan</p>
PGRI	<p>Menengah</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebagai lembaga yang berorientasi profesi, selama ini PGRI hanya melakukan pembenahan internal, serta visi-misi bagaimana profesi guru ini terlindungi dan bermartabat, misalnya, terkait dengan tunjangan 	<p>Rendah</p> <p>Sekadar memberikan saran dan usulan terkait dengan upaya meningkatkan kompetensi guru karena kualitas guru akan memengaruhi hasil pembelajaran</p>	<p>Rendah</p> <p>PGRI tidak masuk ke dalam masalah teknis, hanya sebatas mengajak dan mengimbau kepada lembaga terkait supaya hak guru diperhatikan dan dilindungi agar tidak ada guru yang malas; guru yang berprestasi harus diberi penghargaan</p>	<p>Menengah</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan lembaga yang melindungi guru Perlu dilibatkan secara teknis, misalnya dalam memberikan pelatihan guru

Pemangku Kepentingan	Potensi untuk Berkontribusi (Tinggi/Menengah/Rendah)	Kemauan untuk Terlibat (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pengaruh Aktual terhadap Pembelajaran (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pentingnya Pemangku Kepentingan Tersebut Dilibatkan (Tinggi/Menengah/Rendah)
	<ul style="list-style-type: none"> Peran PGRI tidak ada yang langsung ke pembelajaran, hanya mendorong guru supaya mengajar dengan baik supaya hasil pembelajaran meningkat 			
Ketua gugus/KKG	<p>Menengah</p> <ul style="list-style-type: none"> KKG gugus 3 sudah terbentuk sejak dua tahun terakhir. Pertemuan dilaksanakan dua kali per bulan (bisa menjadi sarana berbagi bagi guru). Di KSB hanya dua KKG aktif 	<p>Menengah</p> <p>Ada keinginan untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi guru di tingkat gugus dengan mendatangkan pelatih berkualitas dari LPMP/universitas, tetapi masih terkendala masalah ketersediaan dana</p>	<p>Rendah</p> <ul style="list-style-type: none"> KKG tidak efektif karena lebih sering digunakan sebagai wadah pembuatan soal; belum ada kegiatan seperti pembahasan tentang pembelajaran murid KKG gugus 3 yang dibawah informan tidak aktif karena keterbatasan dana Ada KKG gugus 4 yang aktif karena mendapat sokongan dana dari PT NNT 	<p>Menengah</p> <ul style="list-style-type: none"> KKG tidak aktif Merupakan sarana berbagi terkait masalah pembelajaran di sekolah
Lurah 2	<p>Rendah</p> <ul style="list-style-type: none"> Kelurahan tidak menyentuh masalah pendidikan secara langsung Kelurahan lebih fokus kegiatan sosial, seperti posyandu dan sunatan massal. Kelurahan tidak masuk ke urusan sekolah. 	<p>Rendah</p> <ul style="list-style-type: none"> Belum pernah ada kontribusi pemerintah kelurahan ke sekolah karena alokasi anggaran kelurahan yang terbatas 	<p>Rendah</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemerintahan kelurahan belum pernah berkoordinasi dengan pihak sekolah Kelurahan memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam pembuatan surat keterangan tidak mampu (SKTM) untuk keperluan murid Ada perpustakaan kelurahan yang bisa diakses oleh masyarakat secara umum (2014), tetapi pemanfaatannya belum maksimal 	<p>Rendah</p> <ul style="list-style-type: none"> Pihak kelurahan tidak berfokus pada pendidikan, tetapi lebih pada permasalahan kemasyarakatan lainnya, seperti kesehatan dan pelayanan
Lurah 1	<p>Rendah</p> <p>Kelurahan tidak memiliki program terkait pendidikan yang bersentuhan langsung dengan pihak sekolah</p>	<p>Rendah</p> <ul style="list-style-type: none"> Pada 2010–2013, terdapat seksi pendidikan pada struktur kepengurusan kelurahan, tetapi diganti dengan seksi pemberdayaan masyarakat Kelurahan tidak pernah dilibatkan dalam rapat komite sekolah, 	<p>Rendah</p> <ul style="list-style-type: none"> Pihak kelurahan tidak dilibatkan atau tidak ada koordinasi dengan pihak sekolah Kelurahan tidak diberikan dana untuk pendidikan. Kelurahan hanya diberikan 	<p>Menengah</p> <ul style="list-style-type: none"> Perhatian/program terkait pendidikan bisa dilakukan jika besarnya anggaran DPA di kecamatan dinaikkan Bersama dengan LPM, kelurahan bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang wajib

Pemangku Kepentingan	Potensi untuk Berkontribusi (Tinggi/Menengah/Rendah)	Kemauan untuk Terlibat (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pengaruh Aktual terhadap Pembelajaran (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pentingnya Pemangku Kepentingan Tersebut Dilibatkan (Tinggi/Menengah/Rendah)
		padahal kelurahan ingin terlibat langsung melalui rapat-rapat	pos anggaran untuk pelayanan masyarakat dan operasional.	belajar 12 tahun dan memberitahukan jam bermain dan jam belajar
Perusahaan (PT NNT)	Tinggi <ul style="list-style-type: none"> Perusahaan memiliki dana CSR untuk membantu masalah pendidikan dasar Perusahaan memiliki rencana kerja tahunan. Rencana kerja tahunan ini disusun berdasarkan kebutuhan terkait pendidikan 	Tinggi <ul style="list-style-type: none"> CSR menjadi sarana untuk membantu masyarakat (lingkar tambang), termasuk pada bidang pendidikan 	Tinggi <ul style="list-style-type: none"> Melakukan sinkronisasi program dengan pemda (musdus, serta musrenbang kecamatan dan kabupaten); hadir langsung ke acara tersebut Memberikan bantuan pendidikan baik dari segi infrastruktur sekolah, kualitas guru, kualitas murid maupun sarana dan prasarana penunjang pembelajaran (khususnya di lingkaran tambang) Memiliki lembaga komunikasi di tingkat forum CSR (per kecamatan) Mendukung KKG Ada program dengan tujuan membentuk karakter anak 	Tinggi <ul style="list-style-type: none"> Memiliki kepedulian tinggi terhadap masyarakat terutama di lingkaran tambang Memiliki rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan kebutuhan terkait pendidikan Selalu mengikuti kegiatan musrenbang (dari tingkat dusun hingga kabupaten) untuk sinkronisasi dengan program perusahaan
Komite sekolah SDN A	Tinggi Komite sekolah memiliki pemahaman bahwa mereka tidak hanya berperan dalam pembangunan fisik sekolah tetapi juga dalam pembelajaran murid	Tinggi <ul style="list-style-type: none"> Pihak sekolah tidak membangun koordinasi dengan komite sekolah yang sebenarnya sangat siap untuk membantu sekolah Ketua komite sekolah merupakan tokoh yang sangat aktif di bidang pendidikan karena memiliki lembaga pendidikan, yaitu pesantren 	Rendah <ul style="list-style-type: none"> Komite sekolah hanya sebagai pelengkap syarat-syarat administrasi; misalnya, dalam penggunaan dana BOS, komite sekolah hanya diminta untuk menandatangani Sudah satu tahun terakhir tidak melakukan rapat komite (tidak ada undangan dari pihak sekolah) 	Tinggi Memiliki kemauan besar untuk membantu sekolah, hanya tinggal menunggu inisiatif sekolah untuk melibatkan komite sekolah secara aktif
Komite sekolah SDN B	Tinggi Komite sekolah memahami perannya dalam pembangunan	Tinggi <ul style="list-style-type: none"> Komite sekolah sangat menginginkan adanya rapat 	Rendah <ul style="list-style-type: none"> Komite sekolah ingin melakukan sesuatu, tetapi pihak sekolah tidak 	Menengah Komite sekolah memiliki ide agar kontribusi orang tua murid bisa

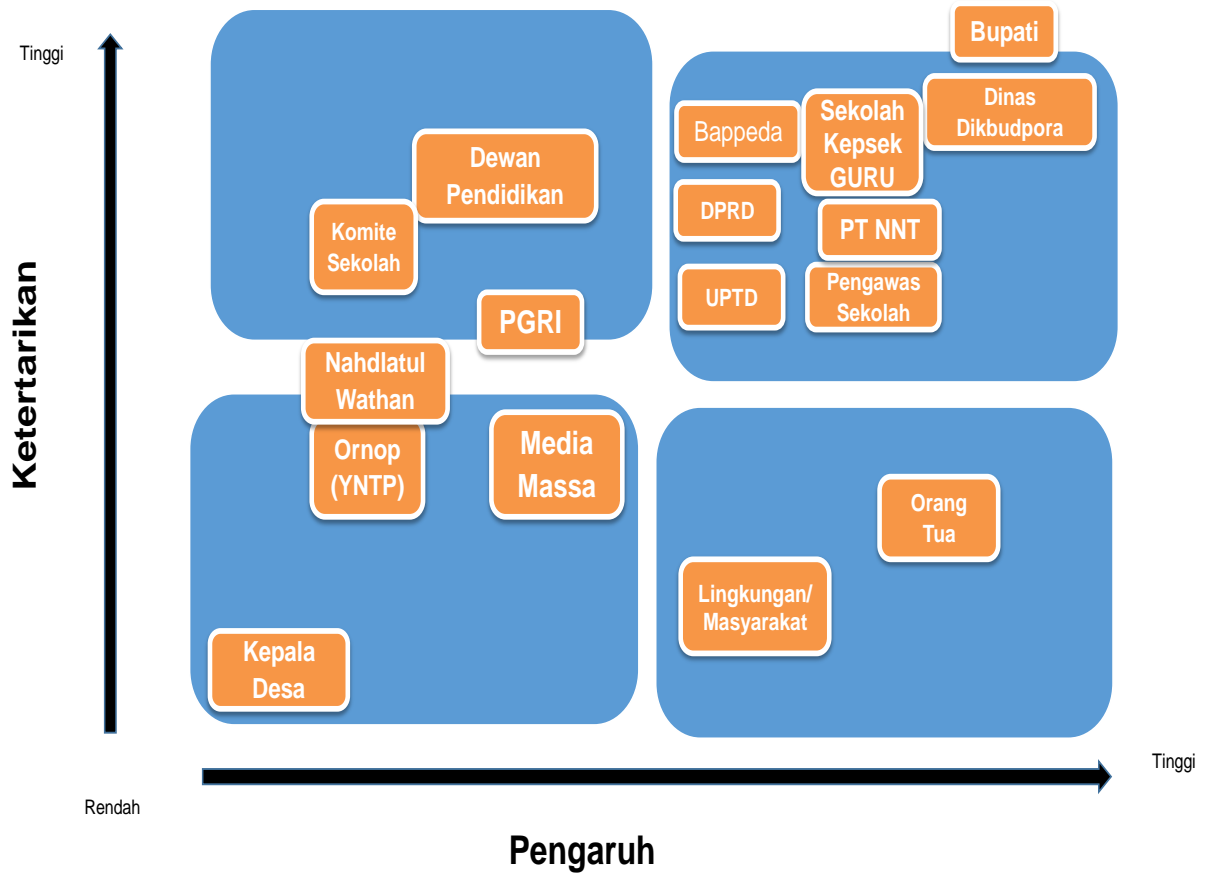
Pemangku Kepentingan	Potensi untuk Berkontribusi (Tinggi/Menengah/Rendah)	Kemauan untuk Terlibat (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pengaruh Aktual terhadap Pembelajaran (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pentingnya Pemangku Kepentingan Tersebut Dilibatkan (Tinggi/Menengah/Rendah)
	fisik sekolah dan pembelajaran murid	reguler tiga bulan sekali dengan pihak sekolah dan tidak hanya diminta datang untuk memberi tanda tangan pada saat pencairan dana BOS <ul style="list-style-type: none"> Berkemauan untuk memberikan berbagai masukan baik terkait pembangunan fisik maupun pembelajaran di sekolah 	terbuka dan tidak merespons usulan komite <ul style="list-style-type: none"> Dukungan dari pihak orang tua juga kurang. Bahkan, jika komite sekolah mempunyai ide yang maju, mereka justru malah dianggap “gila” 	diarahkan untuk pemenuhan buku di sekolah, peningkatan minat baca murid, dan peningkatan hasil pembelajaran murid; bantuan tidak selalu ditujukan untuk pembangunan fisik saja
Komite sekolah SMPN A	Tinggi Komite sekolah baru terpilih dua hingga tiga minggu, tetapi sudah menjalin komunikasi cukup intensif dengan pihak sekolah dan telah memberikan beberapa masukan-masukan baru kepada sekolah	Tinggi Banyak memiliki ide baru bagi pembelajaran (penambahan kegiatan ekstrakurikuler, jam belajar tambahan bagi murid/es)	Menengah <ul style="list-style-type: none"> Sering datang langsung ke sekolah dan berkomunikasi dengan guru terkait masalah sekolah Berkomunikasi dengan forum komite sekolah di tingkat kecamatan untuk mengonsultasikan masalah di sekolah Memberi masukan agar menambah uang saku murid yang mengikuti perlombaan olimpiade sains nasional (OSN) di Jakarta dari Rp300.000 menjadi Rp500.000 dari dana BOS 	Tinggi Memiliki kemauan yang besar untuk terlibat; hal ini terlihat dengan cukup banyaknya ide yang disampaikan ke sekolah termasuk ide yang terkait dengan pembelajaran (penambahan jam belajar dan kegiatan ekstrakurikuler)
Komite sekolah SMPN B	Tinggi Memiliki pemahaman yang baik dan kemauan yang cukup tinggi untuk mendukung dan terlibat dalam urusan sekolah	Menengah <ul style="list-style-type: none"> Komite sekolah tidak terlalu masuk ke dalam proses akademik; sifatnya hanya memberikan masukan/imbauan jika ada masalah di sekolah Komite lebih banyak terlibat dalam memenuhi hal-hal yang dibutuhkan sekolah untuk mencapai standar-standar (fisik) yang dibutuhkan 	Menengah <ul style="list-style-type: none"> Memberikan masukan dan imbauan jika ada masalah di sekolah, misalnya hasil belajar murid rendah dan masalah sarana Hanya mendukung secara moral dan keuangan Ketua komite sekolah juga merupakan pendidik (guru) Komite sekolah baru dibentuk dan belum ada kegiatan; SK-nya baru disusun 	Menengah Meski perannya masih belum maksimal, komite sekolah memiliki kemauan untuk mendukung kegiatan sekolah terkait pembelajaran

Pemangku Kepentingan	Potensi untuk Berkontribusi (Tinggi/Menengah/Rendah)	Kemauan untuk Terlibat (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pengaruh Aktual terhadap Pembelajaran (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pentingnya Pemangku Kepentingan Tersebut Dilibatkan (Tinggi/Menengah/Rendah)
Media massa (Lombok Pos)	Tinggi <ul style="list-style-type: none"> Lombok Pos juga menyediakan kolom pendidikan dalam rubriknya Memiliki pemahaman bahwa media massa bisa digunakan sebagai alat sosialisasi program pendidikan pemerintah 	Menengah <ul style="list-style-type: none"> Cukup antusias untuk mendapatkan pemberitaan terkait pendidikan, tetapi masih terkendala stigma media massa sebagai hantu/momok dari para guru/sekolah/pemerintah sehingga sulit untuk mendapatkan berita secara detail, terutama terkait hasil pembelajaran 	Menengah <ul style="list-style-type: none"> Mendapatkan berita (dari guru/sekolah) sering kali dengan cara menyembunyikan identitas diri sebagai wartawan Informan juga merupakan pengurus Dewan Pendidikan (wasekjen Dewan Pendidikan) dari unsur media massa Belum ada pengaruh signifikan karena pemberitaan lebih banyak bersifat seremonial saja (terkendala ketertutupan sekolah/guru) 	Tinggi <p>Bisa dijadikan sarana untuk menyosialisasikan program pemerintah terkait pendidikan</p>
Orang tua murid SDN A	Menengah <p>Karena orang tua murid merasa bahwa sekolah paling bertanggung jawab terhadap proses dan hasil pembelajaran anaknya</p>	Menengah <p>Kurang aktif dalam memberikan pendidikan kepada anak di rumah</p>	Rendah <p>Hanya terlibat dalam pertemuan komite sekolah yang terakhir diselenggarakan tiga tahun yang lalu</p>	Rendah <p>Karena orang tua siswa sebagai pendidik utama bagi anak</p>
Orang tua murid SDN B	Menengah <p>Karena orang tua murid merasa bahwa sekolah paling bertanggung jawab atas proses dan hasil pembelajaran anaknya</p>	Tinggi <p>-</p>	Tinggi <p>Terlibat aktif dalam membimbing anak jika ada PR dari sekolah</p>	Tinggi <p>Karena orang tua siswa sebagai pendidik utama bagi anak khususnya di rumah</p>
Orang tua murid SMPN A	Menengah <ul style="list-style-type: none"> Masih ada orang tua yang tidak mempunyai kepedulian terhadap pendidikan anak dan menyerahkan tanggung jawab pendidikan sepenuhnya kepada sekolah Ketika orang tua dipanggil untuk pertemuan dan diminta berpartisipasi, masih ada yang tidak memenuhinya 	Menengah <ul style="list-style-type: none"> Orang tua ingin agar sekolah mengadakan pelajaran tambahan di sekolah dan mereka bersedia membayar 	Menengah <ul style="list-style-type: none"> Ada yang sangat mendukung pembelajaran anak: anak didaftarkan /es, dibelikan laptop dan modem karena tuntunan pembelajaran menggunakan sistem daring Orang tua selalu mengingatkan anak untuk belajar, serta mengerjakan tugas dan PR. Namun, masih ada orang tua yang kurang perhatian terhadap pendidikan anaknya Peran orang tua yang dikoordinasi oleh komite sekolah: pembuatan pagar 	Menengah <ul style="list-style-type: none"> Ada orang tua yang mempunyai ide supaya diadakan kegiatan /es di sekolah Ada orang tua yang mempunyai harapan untuk menambah fasilitas sekolah, seperti toilet dengan air bersih, dengan cara iuran

Pemangku Kepentingan	Potensi untuk Berkontribusi (Tinggi/Menengah/Rendah)	Kemauan untuk Terlibat (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pengaruh Aktual terhadap Pembelajaran (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pentingnya Pemangku Kepentingan Tersebut Dilibatkan (Tinggi/Menengah/Rendah)
			sekolah, taman, dan area parkir (iuran Rp200.000/wali murid)	
Orang tua murid SMPN B	Tinggi Orang tua berpartisipasi aktif dalam mendukung kegiatan sekolah	Tinggi <ul style="list-style-type: none"> • Ada orang tua yang menginginkan agar ekstrakurikuler ditambah sehingga murid memiliki alternatif kegiatan positif yang banyak, seperti KIR dan Pramuka • Ada orang tua yang menyampaikan bahwa perlu ada <i>les</i> di sekolah. 	Tinggi <ul style="list-style-type: none"> • Sebagian orang tua senang anaknya masuk ke kelas mandiri meski harus menambah biaya bulanan Rp200.000 • Orang tua mengikutkan anak <i>les</i> mata pelajaran dengan gurunya • Orang tua aktif mengingatkan dan mendampingi anak belajar • Ada orang tua murid yang menanyakan tentang kapan kebijakan <i>full day school</i> diberlakukan karena anaknya menginginkan sekolah sampai sore hari • Ada orang tua yang <i>cuek</i> dengan pendidikan anak (di pedesaan/penduduk asli) 	Tinggi Orang tua aktif dan sangat mendukung berbagai kegiatan sekolah

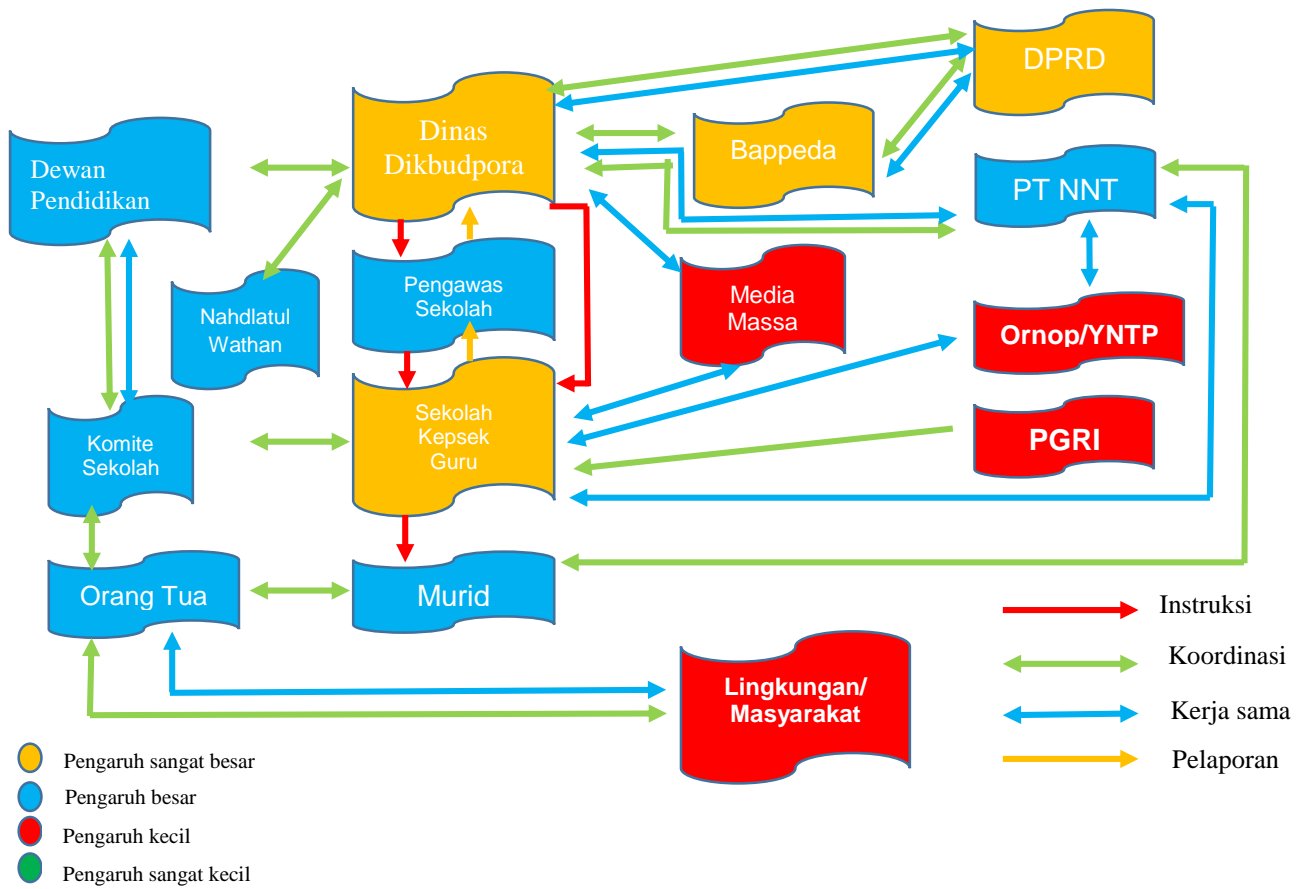
LAMPIRAN 5

Peta Pemangku Kepentingan di Kabupaten Sumbawa Barat
(Tingkat Pengaruh dan Ketertarikan)



LAMPIRAN 6

Analisis Jejaring Pemangku Kepentingan



LAMPIRAN 7

Tabel A3. Matriks Metode Komunikasi di Kabupaten Sumbawa Barat

No.	Kelompok Pemangku Kepentingan	Informan/Responden	Jenis Media Komunikasi	Saluran Komunikasi	Forum Keterlibatan
Kelompok Pembuat Kebijakan					
1	Dinas Dikbudpora	Kasi PTK	<ul style="list-style-type: none"> Komunikasi langsung: koordinasi, evaluasi Komunikasi tidak langsung: suara, media tertulis, media cetak 	<ul style="list-style-type: none"> Langsung: rapat/pertemuan Tak langsung: surel, surat/undangan, telepon, SMS, Facebook, media cetak (Radar Lombok, Gaung), surat laporan 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Komunikasi informal di masjid Pertemuan/tatap muka informal
2	Bappeda	Kabid sosbud	<ul style="list-style-type: none"> Komunikasi langsung: tatap muka Komunikasi tidak langsung: media tertulis, suara, internet 	Telepon, SMS, surel, surat undangan, rapat/pertemuan	<ul style="list-style-type: none"> Ada pertemuan rutin tiga bulanan Ada pertemuan insidental Ada komunikasi nonformal dengan SKPD lain di masjid setelah salat berjamaah; ini komunikasi informal tetapi efektif
3	Setda	Kasubag pendidikan bagian kesra	<ul style="list-style-type: none"> Komunikasi langsung Komunikasi tidak langsung: internet, suara 	<ul style="list-style-type: none"> Komunikasi langsung saat kunjungan Komunikasi melalui telepon, SMS, dan surel untuk lingkungan internal pegawai setda 	Komunikasi langsung dengan pihak sekolah saat ada kunjungan atau melalui rapat koordinasi lintas sektor
4	DPRD	Wakil Ketua Komisi I Bidang Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Komunikasi langsung: rapat Komunikasi tidak langsung: telepon, media tertulis 	Rapat, surat, undangan, telepon, SMS	<ul style="list-style-type: none"> Kunjungan ke dinas/sekolah Klarifikasi laporan masyarakat ke sekolah
Kelompok Pelaksana Kebijakan					
5	UPTD	Kepala UPTD Taliwang	<ul style="list-style-type: none"> Komunikasi langsung Komunikasi tidak langsung: suara, media tertulis 	Bertemu langsung, rapat, melalui telepon, SMS, surat undangan, dan laporan terutama ke Dinas Dikbudpora	<ul style="list-style-type: none"> Rapat dinas tidak terjadwal; kalau mendesak, langsung rapat dan kadang-kadang melalui SMS atau undangan resmi Komunikasi langsung dengan Dewan Pendidikan

No.	Kelompok Pemangku Kepentingan	Informan/Responden	Jenis Media Komunikasi	Saluran Komunikasi	Forum Keterlibatan
					<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi langsung dengan orang tua • Kepala sekolah atau guru sering komunikasi langsung dan biasa membahas prestasi anak anak; ini biasanya saat turun ke sekolah • Ada juga komunikasi melalui SMS atau telepon • Sudah menggunakan internet/surel tetapi hanya untuk laporan ke dinas • Komunikasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama dengan bertemu langsung • Penggunaan Facebook lebih untuk penyampaian informasi, misalnya, tentang pengusulan TKD dan rencana lomba polisi cilik • Komunikasi dengan ketua gugus bisa secara langsung; hal yang sifatnya resmi biasa melalui telepon atau SMS dan informasi bisa menyebar ke semua sekolah
6	Pengawas sekolah SD	Pengawas SDN A	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi langsung: koordinasi, rapat evaluasi guru • Komunikasi tak langsung: suara, media tertulis 	Rapat, telepon, SMS, Facebook, media Suara Sumbawa	<ul style="list-style-type: none"> • Kunjungan ke kepala sekolah • Supervisi terhadap kepala sekolah • SMS ke pengawas sekolah
7	Pengawas sekolah SMP	Pengawas SDN B	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi langsung: koordinasi, rapat evaluasi guru • Komunikasi tak langsung: suara, media tertulis 	Bertemu langsung, telepon, SMS, Facebook, Whatsapp	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan KKG (gugus 4), MGMP, K3S • Pengawas sekolah dan kepala sekolah bertemu langsung
8	Pengawas sekolah SMP	Pengawas SMP	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi langsung: pertemuan, rapat, koordinasi, evaluasi • Komunikasi tidak langsung: suara, media tertulis 	Pertemuan, rapat, koordinasi, evaluasi, Telepon, SMS	Menganalisis proses dan hasil pembelajaran dalam forum pertemuan MGMP (IPS dan PKN saja)

No.	Kelompok Pemangku Kepentingan	Informan/Responden	Jenis Media Komunikasi	Saluran Komunikasi	Forum Keterlibatan
9	Kepala sekolah	Kepala sekolah SDN A (diwakili oleh guru kelas 5)	<ul style="list-style-type: none"> Komunikasi langsung: tatap muka Komunikasi tidak langsung: media tertulis 	Bertemu langsung, surat undangan/pemberitahuan	<ul style="list-style-type: none"> Rapat guru-kepala sekolah per semester Undangan/pemberitahuan rapat dari Dinas Pendidikan ke sekolah. Rapat komite sekolah setiap tahun ajaran baru¹³
10	Kepala sekolah	Kepala sekolah SDN B	<ul style="list-style-type: none"> Komunikasi langsung: rapat Komunikasi tak langsung: media tertulis, undangan (sosialisasi ke wali murid) 	Undangan, rapat, telepon, SMS	<ul style="list-style-type: none"> Rapat dengan orang tua/wali murid Anak tidak masuk, orang tua disurati Guru diikutkan KKG dua kali sebulan Pertemuan komite sekolah setahun sekali
11	Kepala sekolah	Wakil kepala sekolah SMPN A	<ul style="list-style-type: none"> Komunikasi langsung: rapat koordinasi, rapat evaluasi Komunikasi tidak langsung: media tertulis 	<ul style="list-style-type: none"> Pertemuan guru, evaluasi, surat (paling sering), telepon, SMS (insidental) Penyebaran pamflet 	<ul style="list-style-type: none"> Mengikutkan siswa dalam berbagai lomba ilmiah Kepala sekolah dan guru bertemu langsung (rapat evaluasi, rapat rutin)
12	Kepala sekolah	Wakil kepala sekolah SMPN B	<ul style="list-style-type: none"> Komunikasi langsung: tatap muka Komunikasi tidak langsung: media tertulis, suara, internet 	Telepon, SMS, WhatsApp, Facebook, surel, surat undangan, laporan fisik, rapat/pertemuan	<ul style="list-style-type: none"> Ada rapat komite sekolah setahun sekali saat tahun ajaran baru dan mengundang orang tua murid melalui surat resmi Rapat rutin guru dan kepala sekolah Ada forum MGMP walaupun tidak begitu aktif Ada forum MKKS untuk kepala sekolah Pertemuan langsung dengan ketua komite sekolah lebih sering karena tergantung pada kebutuhan sekolah Laporan disampaikan ke dinas setiap bulan secara daring. Setiap tahun menyampaikan kepada Dinas Dikbudpora secara lisan dan tertulis tentang kebutuhan sekolah

¹³Komunikasi sekolah (kepala sekolah) dengan komite sekolah sudah tidak ada lagi. Rapat komite sekolah dengan para orang tua terakhir dilaksanakan pada tahun ajaran 2014/2015.

No.	Kelompok Pemangku Kepentingan	Informan/Responden	Jenis Media Komunikasi	Saluran Komunikasi	Forum Keterlibatan
13	Guru	Wawancara kelompok guru SDN A	<ul style="list-style-type: none"> Komunikasi langsung Komunikasi tidak langsung dengan menggunakan media sosial 	Bertemu langsung, telepon, SMS, Facebook, WhatsApp, surel	Rapat guru dengan kepala sekolah dilakukan setiap semester. Mengikuti KKG sebulan dua kali setiap minggu pertama dan minggu ketiga di gugus 2. Komunikasi langsung tiap hari dengan para guru, murid dan kadang dengan orang tua murid jika ada masalah
14	Guru	Wawancara kelompok guru SDN B	<ul style="list-style-type: none"> Komunikasi langsung: rapat Komunikasi tak langsung: suara, media tertulis 	Telepon, SMS	<ul style="list-style-type: none"> Rapat KKG khusus di SDN B Rapat komite sekolah
15	Guru	Wawancara kelompok guru SMPN A	<ul style="list-style-type: none"> Komunikasi langsung Komunikasi tidak langsung: media cetak 	Bertemu langsung, koran Radar Sumbawa.	<ul style="list-style-type: none"> Guru bertemu langsung dengan siswa untuk menyosialisasikan larangan menggunakan sepeda motor ke sekolah Pertemuan MGMP per tiga bulan
16	Guru	Wawancara kelompok guru SMPN B	<ul style="list-style-type: none"> Komunikasi langsung Komunikasi tidak langsung: media sosial, surat tertulis 	Bertemu langsung, Facebook, surat	<ul style="list-style-type: none"> Bertemu langsung dengan orang tua siswa, misalnya, jika ada siswa yang bermasalah di sekolah Mengirimkan surat bagi siswa yang bermasalah di sekolah Berbagi masalah pembelajaran di antara para guru setiap saat dilakukan melalui Facebook
17	Yayasan pendidikan/ormas	Nahdlatul Wathan	<ul style="list-style-type: none"> Komunikasi langsung Komunikasi tidak langsung: tertulis, suara, internet 	Bertemu langsung, Facebook, SMS, proposal, surat, situs web, WhatsApp, telepon	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Dinas Dikbudpora melalui pertemuan langsung Koordinasi dengan komite sekolah secara langsung dengan tatap muka Undangan rapat/pertemuan dari Dinas Dikbudpora sering disampaikan melalui SMS dan telepon

No.	Kelompok Pemangku Kepentingan	Informan/Responden	Jenis Media Komunikasi	Saluran Komunikasi	Forum Keterlibatan
Kelompok Pendukung Kebijakan					
18	Ornop	YNTP	<ul style="list-style-type: none"> Komunikasi langsung: tatap muka Komunikasi tidak langsung: media tertulis, suara, media massa, SMS 	Bertemu langsung, telepon, SMS, BBM, surel, Facebook, brosur, buletin, buku	<ul style="list-style-type: none"> Penyerahan laporan kegiatan/meminta info/data kepada Dinas Pendidikan dengan datang langsung (rata-rata sebulan sekali); jika ada rapat, Dinas Pendidikan mengundang YNTP melalui surat undangan tertulis Komunikasi antara YNTP dan perusahaan (donor) dilakukan melalui SMS/surel/WhatsApp (kalau ada informasi/undangan) YNTP dan sekolah bertemu langsung melalui koordinator program di tingkat sekolah YNTP menyebarkan informasi tentang program melalui buletin, brosur, buku, dan presentasi hasil pendampingan
19	Dewan Pendidikan	Ketua Dewan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Komunikasi langsung: tatap muka Komunikasi tidak langsung: media tertulis, suara, internet 	Telepon, SMS, grup WhatsApp, Facebook Dewan Pendidikan, surat undangan, rapat/pertemuan, pemberitaan di media Lombok Pos	<ul style="list-style-type: none"> Forum dialog di Sumbawa Barat dilakukan tiap Kamis malam di rumah Bupati yang tidak hanya membahas mengenai pendidikan tetapi juga sektor lain Dibentuknya forum komunikasi komite sekolah diharapkan komite sekolah bisa lebih aktif di sekolah dan menjalankan fungsinya
20	PGRI	Wakil ketua PGRI	<ul style="list-style-type: none"> Komunikasi langsung: tatap muka Komunikasi tidak langsung: media tertulis, suara 	Telepon, SMS, surat undangan dan pertemuan	Pertemuan dengan pengurus cabang PGRI tingkat kecamatan dengan tujuan: memberikan penguatan kepada guru dan memberi pendampingan langsung kepada guru yang mendapat masalah atau guru yang bermasalah
21	KKG	Ketua gugus 3 Kecamatan Taliwang	<ul style="list-style-type: none"> Komunikasi langsung Komunikasi tidak langsung: media tertulis, suara 	Bertemu/datang langsung, telepon, SMS	<ul style="list-style-type: none"> Ketua gugus/KKG langsung mendatangi kepala seksi, Dinas Pendidikan, jika ada masalah Ketua gugus/KKG mengundang anggota gugus untuk melakukan rapat melalui telepon dan SMS

No.	Kelompok Pemangku Kepentingan	Informan/Responden	Jenis Media Komunikasi	Saluran Komunikasi	Forum Keterlibatan
					<ul style="list-style-type: none"> • Ketua gugus/KKG berkomunikasi dengan UPTD melalui telepon atau SMS terkait program di tingkat kecamatan
22	Lurah/kepala desa	Sekretaris kelurahan 2	Komunikasi langsung: tatap muka	Bicara langsung dengan warga	Pihak kelurahan hanya melayani pembuatan SKTM dalam pengurusan Beasiswa Siswa Miskin (BSM). Kelurahan tidak pernah dilibatkan atau diundang dalam kegiatan sekolah
23	Lurah/kepala desa	Lurah 1	Komunikasi langsung	Komunikasi langsung dengan wali murid	<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan bertemu langsung dengan bupati: (misalnya, penyampaian informasi tentang program pemberian pakaian seragam sekolah melalui rapat koordinasi) • Kelurahan bertemu langsung dengan warga/orang tua murid (misalnya, warga menyampaikan langsung permasalahan yang dihadapi terkait pendidikan anaknya) • Kelurahan membantu pendataan warga sasaran penerima program pendidikan gratis
24	Perusahaan	CSR PT NNT	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi langsung • Komunikasi tidak langsung: media tertulis, suara, internet 	Bertemu langsung, telepon, SMS, surel, situs web, Facebook	<ul style="list-style-type: none"> • Forum CSR • Sinkronisasi program PT NNT dengan pemda melalui musdus hingga musrembang kabupaten • Publikasi program PT NNT melalui situs web yang dikelola oleh bagian <i>corporate communication</i>
25	Komite sekolah	Komite sekolah SDN A	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi langsung • Komunikasi tidak langsung: media tertulis, suara, internet 	Bertemu langsung, telepon, SMS, internet	<ul style="list-style-type: none"> • Komite sekolah bertemu langsung dengan pihak sekolah • Komite sekolah bertemu langsung dan berkomunikasi melalui telepon dengan orang tua siswa • Komite sekolah bertemu langsung dengan siswa

No.	Kelompok Pemangku Kepentingan	Informan/Responden	Jenis Media Komunikasi	Saluran Komunikasi	Forum Keterlibatan
26	Komite sekolah	Komite sekolah SDN B	Komunikasi tidak langsung: media tertulis	Surat	Surat undangan dari sekolah untuk rapat komite sekolah dan orang tua setiap awal tahun ajaran baru
27	Komite sekolah	Komite sekolah SMPN A	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi langsung • Komunikasi tidak langsung: media tertulis, suara, media sosial, forum 	Bertemu langsung, surel, Facebook, surat undangan, telepon, forum komite sekolah per kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Komite sekolah menemui pemerintah desa secara langsung • Komite sekolah berkomunikasi dengan perusahaan/lembaga-lembaga pemerhati pendidikan melalui surel dan Facebook • Komite sekolah bertemu langsung dengan orang tua di rumah atau berkomunikasi melalui telepon • Komite sekolah bertemu langsung dengan sekolah/guru atau berkomunikasi melalui undangan rapat dan telepon • Forum komunikasi sekolah bertemu langsung dengan pengurus komite sekolah
28	Komite sekolah	Komite sekolah SMPN B	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi langsung • Komunikasi tidak langsung: internet, CCTV 	Bertemu langsung, Facebook, BBM, SMS	<ul style="list-style-type: none"> • Komite sekolah bertemu langsung dengan pihak sekolah • Komite sekolah bertemu langsung dengan perusahaan atau melalui surat permohonan (misalnya, pengajuan proposal untuk penambahan fasilitas sekolah) • Komite sekolah bertemu langsung dengan orang tua (misalnya, ada program dari sekolah yang disosialisasikan kepada orang tua siswa)
29	Orang tua murid	Wawancara kelompok orang tua murid SDN A	Komunikasi langsung	Bertemu langsung	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat komite sekolah satu kali dalam setahun¹⁴
30	Orang tua murid	Wawancara kelompok orang tua murid SDN B	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi langsung 	Bertemu langsung, telepon, SMS, surat	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat komite sekolah melalui surat undangan

¹⁴Sudah lima tahun tidak pernah lagi ada rapat komite sekolah

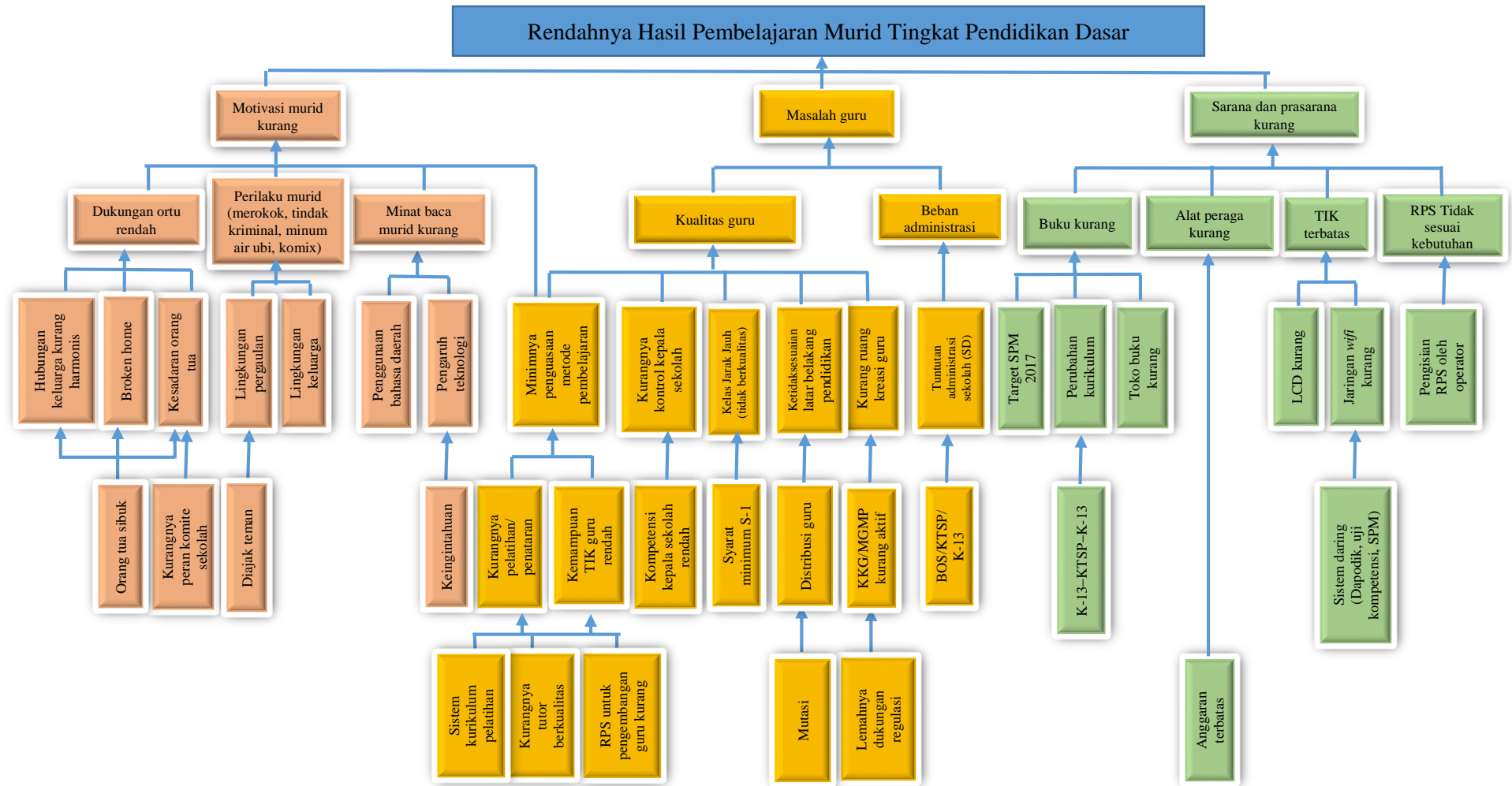
No.	Kelompok Pemangku Kepentingan	Informan/Responden	Jenis Media Komunikasi	Saluran Komunikasi	Forum Keterlibatan
			<ul style="list-style-type: none"> Komunikasi tidak langsung: suara, media tertulis 		<ul style="list-style-type: none"> Orang tua dipanggil ke sekolah melalui surat
31	Orang tua murid	Wawancara kelompok orang tua SMPN A	<ul style="list-style-type: none"> Komunikasi langsung Komunikasi tidak langsung: suara, media tertulis 	-	-
32	Orang tua murid	Wawancara kelompok orang tua SMPN B	Komunikasi tidak langsung: suara, media tertulis	Surat, WhatsApp, BBM, telepon, pemanggilan orang tua melalui anak	<ul style="list-style-type: none"> Pada rapat komite sekolah, orang tua murid diundang melalui surat undangan setahun sekali Orang tua berkomunikasi dengan guru melalui telepon Orang tua dipanggil ke sekolah melalui anak, misalnya, ketika anak bermasalah Sesama orang tua murid berkomunikasi melalui WhatsApp dan BBM
33	Media	Lombok Pos	<ul style="list-style-type: none"> Komunikasi langsung: tatap muka Komunikasi tidak langsung: suara, media tertulis, internet 	Bicara langsung, surel, WhatsApp, telepon	<ul style="list-style-type: none"> Bicara/datang langsung dengan pihak sekolah/Dinas Pendidikan Surel, WhatsApp, telepon langsung dengan sekolah atau bupati, dsb. Ada forum bupati (tiap Kamis malam) dan grup WhatsApp program PDPGR untuk mendapatkan informasi
Kelompok Sasaran					
34	Murid (laki-laki)	Wawancara kelompok murid SDN A (laki-laki)	<ul style="list-style-type: none"> Komunikasi langsung Komunikasi tidak langsung: suara 	Datang/bertemu langsung, telepon	<ul style="list-style-type: none"> Datang/bertemu langsung dengan teman di rumahnya untuk bertanya pelajaran, kadang kerja kelompok Telepon guru jika izin sakit Bertanya langsung kepada guru (di sekolah) dan orang tua atau kakak (di rumah)
35	Murid (laki-laki)	Wawancara kelompok murid SDN B (laki-laki)	Komunikasi langsung: tatap muka	Bertemu/datang langsung	<ul style="list-style-type: none"> Datang langsung ke rumah kepala sekolah/guru dan rumah teman

No.	Kelompok Pemangku Kepentingan	Informan/Responden	Jenis Media Komunikasi	Saluran Komunikasi	Forum Keterlibatan
					<ul style="list-style-type: none"> Bertanya langsung kepada ibu, kakak, sepupu
36	Murid (laki-laki)	Wawancara kelompok murid SMPN A (laki-laki)	<ul style="list-style-type: none"> Komunikasi langsung Komunikasi tidak langsung: internet, media sosial 	Bertemu langsung, internet, Facebook	<ul style="list-style-type: none"> Jika ada kesulitan dalam belajar sering mengakses internet Bertanya kepada teman tentang pelajaran di Facebook, atau datang ke rumah teman langsung untuk bertanya atau diskusi (berdua atau kelompok) Bertanya kepada guru atau langsung mencari buku di perpustakaan (di sekolah) Bertanya langsung kepada ibu atau kakak
37	Murid (laki-laki)	Wawancara kelompok murid SMPN Maluk (laki laki)	<ul style="list-style-type: none"> Komunikasi langsung Komunikasi tidak langsung: media tertulis, suara, internet 	Telepon, SMS, Facebook, WhatsApp, surel, internet (sekolah sudah ada <i>wifi</i>), Quipper School	<ul style="list-style-type: none"> Ada kelas mandiri dan kelas reguler yang setiap hari berkomunikasi langsung dengan guru dan murid lain Kelompok kerja murid Bertanya langsung kepada guru Bertanya kepada teman yang lebih mampu Bertanya kepada orang tua atau kakak Membuka internet Ada <i>les</i> mata pelajaran tertentu oleh guru mata pelajaran Menggunakan aplikasi Quipper School; murid disuruh membuka aplikasi ini karena guru sudah mengunggah sesuatu, baik soal atau cara mengerjakan soal
38	Murid (perempuan)	Wawancara kelompok murid SDN A (perempuan)	Komunikasi langsung	Bertemu langsung	<ul style="list-style-type: none"> Kelompok kerja murid Bertanya kepada guru Bertanya kepada teman Bertanya kepada orang tua atau saudara Bertanya kepada kepala sekolah

No.	Kelompok Pemangku Kepentingan	Informan/Responden	Jenis Media Komunikasi	Saluran Komunikasi	Forum Keterlibatan
39	Murid (perempuan)	Wawancara kelompok murid SDN B (perempuan)	Komunikasi langsung	Tidak menggunakan media dalam komunikasi (bertemu langsung)	<ul style="list-style-type: none"> • Proses kegiatan belajar mengajar (KBM) yang dilakukan enam hari dalam seminggu • Kelompok kerja murid • Bertanya kepada guru • Bertanya kepada teman • Bertanya kepada orang tua atau saudara • Bertanya kepada kepala sekolah
40	Murid (perempuan)	Wawancara kelompok murid SMPN A (perempuan)	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi langsung • Komunikasi tidak langsung 	Bertemu langsung, internet	<ul style="list-style-type: none"> • Bertanya secara langsung kepada guru • Belajar kelompok jika ada tugas dari guru • Bertanya langsung kepada ibu atau kakak jika ada kesulitan
41	Murid (perempuan)	Wawancara kelompok murid SMPN B (perempuan)	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi langsung • Komunikasi tidak langsung (internet) 	Bertemu langsung, internet	<ul style="list-style-type: none"> • Belajar kelompok jika ada tugas dari guru • Bertanya secara langsung kepada guru • Bertanya langsung kepada ibu atau kakak jika ada kesulitan • Kadang-kadang menggunakan internet untuk mencari referensi dalam menyelesaikan tugas sekolah

LAMPIRAN 8

Analisis Pohon Masalah Rendahnya Hasil Pembelajaran Murid Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumbawa Barat



LAMPIRAN 9

Tabel A4. Analisis Penyelesaian Masalah di Kabupaten Sumbawa Barat

Lembaga Berwenang	Dukungan Diperlukan	Kapasitas	
		Yang Tersedia	Yang Dibutuhkan
1. Guru	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan metode pembelajaran : PPT dan cara pengoperasiannya Penggunaan internet Keberlanjutan dan keaktifan pertemuan forum guru 	<ul style="list-style-type: none"> Metode pembelajaran monoton Hanya sebagian forum guru yang aktif (MGMP, KKG) Insentif dari bupati dan PT NNT untuk GTT 	<ul style="list-style-type: none"> Memaksimalkan sarana dan prasarana yang tersedia Diklat (TIK, metode pembelajaran) Pemerataan guru sesuai kompetensi Improvisasi dalam metode pembelajaran
2. Kepala sekolah	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan dari pihak pengawas sekolah Diperlukan keaktifan K3S/MKKS 	<ul style="list-style-type: none"> Sudah ada MKKS yang merupakan ajang berbagi bagi kepala sekolah Ada tes kepala sekolah Belum semua kepala sekolah mengoptimalkan fungsi manajerialnya 	<ul style="list-style-type: none"> Kualifikasi kepala sekolah terdiri atas lima jenis, tetapi yang dijalankan baru terkait manajerial (kepribadian, kewirausahaan, supervisi, sosial) Dukungan pihak komite sekolah untuk mendorong orang tua agar membimbing anaknya
3. Komite sekolah	<ul style="list-style-type: none"> Penegasan tupoksi komite sekolah Keterbukaan pihak sekolah terkait permasalahan dan kebutuhan sekolah Sosialisasi dan bimbingan/dorongan pengurus komite sekolah kepada para orang tua 	<ul style="list-style-type: none"> Sudah memiliki akses terhadap orang tua Pertemuan komite sekolah hanya satu tahun sekali Sudah terbentuk forum komunikasi komite sekolah per kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan peran komite sekolah secara utuh Mendorong orang tua untuk membimbing siswa di rumah (mediator) Mendorong partisipasi orang tua dalam menyediakan sarana yang berkaitan langsung dengan pembelajaran (buku, komputer, /es, dsb.)
4. Orang tua	<ul style="list-style-type: none"> Informasi dari sekolah mengenai kebutuhan dan perkembangan anak di sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> Pihak paling dekat dengan anak (membimbing, komunikasi, membentuk karakter) Dukungan sebagian orang tua terhadap pendidikan anak masih rendah (sekolah gratis) 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan peran orang tua terkait upaya menumbuhkan minat belajar anak Mendorong partisipasi orang tua dalam mendukung proses belajar di sekolah (materi-nonmateri) Peran aktif orang tua dalam menjalin komunikasi dengan komite sekolah Inisiatif orang tua dalam menjalin komunikasi dengan pihak sekolah
5. Dinas Dikbudpora	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan Pemerintah Pusat untuk penyediaan sarana dan prasarana dalam mengoptimalkan pelaksanaan K-13 Dukungan Pemerintah Pusat untuk semua pelaksana teknis pelaksanaan K-13 	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan, pembinaan, dan pendampingan teknis Sarana pendampingan melalui diklat dan kerja sama dengan berbagai lembaga, seperti perusahaan untuk perbaikan sarana Kerja sama dengan lembaga lain untuk memberikan pelatihan dan insentif bagi guru honorer Penyedia informasi (data: jumlah guru, dsb.) 	<ul style="list-style-type: none"> Memperluas cakupan kerja sama dengan lembaga-lembaga lain dalam penyediaan sarana, pelatihan, dan insentif bagi guru honorer serta memastikan keberlanjutannya Diperlukan keaktifan semua pelaksana teknis (pengawas sekolah, UPT, sekolah)

Lembaga Berwenang	Dukungan Diperlukan	Kapasitas	
		Yang Tersedia	Yang Dibutuhkan
		<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan kolom "SMS Pembaca" di media (Radar) • Keaktifan lembaga teknis Dinas Pendidikan yang beragam 	
6. Dewan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi yang intensif antara Dewan Pendidikan dan <ol style="list-style-type: none"> 1. pemda 2. DPRD 3. Dinas Pendidikan 4. komite-komite sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurus beranggotakan orang-orang yang kompeten di bidang pendidikan (perwakilan media massa, LSM, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, pengusaha, pemerhati pendidikan, guru PNS, PGRI, Dinas Pendidikan, dsb.) • Alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp700.000.000 • Sudah memiliki rencana program, seperti pelatihan • Sudah melakukan konsolidasi dan pemantauan saat penerimaan siswa baru • Telah mengoordinasikan pembentukan forum komunikasi komite sekolah tiap kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan dan kerja sama Dinas Pendidikan, pengawas sekolah, dan sekolah • Dukungan dan kerja sama dengan orang tua • Mengevaluasi kebijakan program penyelenggaraan dan keluaran pendidikan • Memberikan kriteria tutor yang berkualitas • Memberikan kriteria fasilitas pendidikan • Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pendidikan
7. PGRI	<ul style="list-style-type: none"> • Dorongan dari Dinas Dikbudpora dalam peningkatan kompetensi guru 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah menjalankan fungsinya dalam menjaga, memelihara, membela, serta meningkatkan harkat dan martabat guru dan tenaga kependidikan melalui peningkatan kesejahteraan serta kesetiakawanan anggota 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya peningkatan kesadaran dan sikap guru • Adanya peningkatan mutu dan kemampuan guru
8. Bappeda	Perencanaan dan penganggaran	Mendorong agar program pendidikan masuk ke dalam prioritas RPJMD, penuntasan SPM melalui alokasi anggaran	Mengoordinasikan penuntasan SPM dalam penganggaran APBD kabupaten, pemangku kepentingan untuk menerapkan RPJMD dan perencanaan anggaran
9. Media massa	<ul style="list-style-type: none"> • Data dan informasi dari sekolah serta Dinas Dikbudpora • Pemahaman terhadap keberadaan media • Keterbukaan informasi dari sekolah/Dinas Dikbudpora 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan kolom khusus pendidikan (Lombok Pos), tetapi masih sekadar berita terkait seremonial • Menyediakan kolom "SMS Pembaca" yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan (Radar) 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya inisiatif sekolah dan pihak terkait untuk memberikan informasi tentang pendidikan • Pelibatan media sebagai sarana sosialisasi program pemda terkait pendidikan
10. PT NNT	<ul style="list-style-type: none"> • Data dan informasi dari sekolah dan Dikbudpora • Kerja sama dengan perguruan tinggi • Identifikasi mata pelajaran muatan lokal yang positif • Dukungan pemda untuk mengoptimalkan peran 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada kepedulian terhadap masyarakat terutama yang berada di lingkaran tambang • Ada CSR untuk <i>community development</i> per kecamatan • Memiliki buletin untuk sosialisasi kepada masyarakat 	-

Lembaga Berwenang	Dukungan Diperlukan	Kapasitas	
		Yang Tersedia	Yang Dibutuhkan
	TK sebagai pondasi pembentukan karakter anak	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki renstra lima tahunan Sinkronisasi program PT NTT dengan pemda (musdus, musrenbang kecamatan, dan kabupaten) Memiliki lembaga komunikasi di tingkat forum CSR (per kecamatan) Memiliki <i>corporate communication</i> untuk komunikasi internal dan eksternal Memiliki situs web PT NNT Sudah melakukan kerja sama dengan lembaga/LSM yang bergerak di bidang pendidikan Mendukung KKG Ada program meracik karakter anak 	
11. Nahdlatul Wathan	-	<ul style="list-style-type: none"> Mendekatkan pendidikan kepada masyarakat Program anak angkat daerah berdasarkan kriteria miskin Tingkat pendidikan dasar beragam (sekolah dan madrasah) Terkoordinasi dengan lembaga pendidikan tingkat kabupaten Berkoordinasi dengan baik dengan Dewan Pendidikan dan Dinas Pendidikan Mengacu pada peraturan yang berlaku Tercakup dalam Perbup tentang Pendidikan Gratis 12 tahun Menjangkau ABK/miskin 	
12. Ornop (YNTP)	<ul style="list-style-type: none"> Partisipasi dan kerja sama pihak sekolah dalam meningkatkan minat baca siswa Intervensi Dinas Pendidikan terhadap kebutuhan program ke pihak donor Data dan informasi sekolah tentang kebutuhan siswa, seperti seragam Keberlanjutan dukungan dana dari pihak donor 	<ul style="list-style-type: none"> Banyak program yang sudah dilaksanakan di sekolah (pendampingan perpustakaan, pendampingan guru dan murid, pendampingan koperasi, lomba-lomba, <i>try out</i>, bantuan buku) Mendirikan rumah baca di desa 	<ul style="list-style-type: none"> Penambahan koleksi buku di perpustakaan sekolah dan rumah baca Advokasi kepada orang tua (minat baca dan perilaku anak)

Lembaga Berwenang	Dukungan Diperlukan	Kapabilitas	
		Yang Tersedia	Yang Dibutuhkan
13. Bupati		<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki visi dan misi di bidang pendidikan • Bupati tidak terlibat langsung dalam pembelajaran, tetapi dapat memengaruhi melalui berbagai kebijakan • Adanya pertemuan forum dialog bupati rutin (PDPGR) 	

LAMPIRAN 10

Tabel A5. Inovasi Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumbawa Barat

No.	Nama Kebijakan/ Inovasi	Sumber Kebijakan/ Inovasi	Sifat	Periode Pelaksanaan	Penggagas	Pelaksana	Cakupan	Dampak/Capaian
Inovasi Pemda								
1	Program pendidikan gratis (Perbup No. 11/2006)	APBD II	Modifikasi program pusat	2006–2014/2015	Bupati	Dinas Dikbudpora	Semua murid TK-PT	SD-SMP: APK>100%, APM=hampir 100%, banyak yang berkuliah
2	Program Subsidi Pendidikan tinggi	2007	Program pemerintah kabupaten (pemkab)	2007–n.a.	Bupati	Dinas Dikbudpora	Mahasiswa S-1 dan S-2	- Banyak lulusan SMA yang berkuliah - Banyak pegawai pemda/guru yang berkuliah S-1 hingga S-2 - Banyak munculnya perguruan tinggi baru di KSB - Meringankan beban orang tua
3	Wajib belajar 12 tahun	-	Program pemkab	2007–sekarang	Bupati	Sekolah	Jenjang SD–SMA	Semua anak sekolah minimal SMA
4	Pemberlakuan jam belajar malam	-	Program pemda	2014/ 2015	Bupati	Masyarakat & Dinas Dikbudpora	Masyarakat KSB (anak sekolah)	Program tidak berjalan, sulit dikontrol
5	Forum komunikasi komite sekolah (Pelaksanaan dari Permendiknas No. 44 Tahun 2002)	APBD II	Modifikasi program pusat (prakarsa Dewan Pendidikan)	2016	Dewan Pendidikan	Dewan Pendidikan & komite sekolah	Tiap kecamatan	Terjalannya komunikasi awal antara Dewan Pendidikan dan komite sekolah dengan forum
6	Program seragam gratis	APBD II	Program pemkab	2016	Bupati	Dinas Dikbudpora	Semua murid baru SD–SMA	Belum ada (program baru)
7	Peraturan jam kerja: kewajiban salat berjamaah (zuhur dan asar) bagi pegawai	APBD II	Program pemkab	2016	Bupati	Pegawai di lingkungan pemkab	Semua pegawai di lingkungan pemkab	Terjadi koordinasi nonformal antar-SKPD
8	PDPGR-IJS (Forum) (Perda No. 3/2016)	APBD II	Program pemkab	2016	Bupati	Pemkab dan masyarakat	Masyarakat KSB	Adanya akses masyarakat untuk menyampaikan aspirasi (forum <i>yasinan</i> rutin, grup WhatsApp)
9	Gerakan masyarakat mengaji (Perbup No. 22/2016)	APBD II	Program pemkab	2016	Bupati	Pemangku kepentingan dan masyarakat	Masyarakat	Belum ada (program baru)

No.	Nama Kebijakan/ Inovasi	Sumber Kebijakan/ Inovasi	Sifat	Periode Pelaksanaan	Penggagas	Pelaksana	Cakupan	Dampak/Capaian
Inovasi Non-Pemkab								
10	Program YNTP <ul style="list-style-type: none"> Pendampingan perpustakaan, majalah dinding, pendampingan guru-murid, koperasi, lomba Pendirian rumah baca Perlombaan (baca cerita, KIR, karikatur, dsb.) 	PT NNT Dana YNTP	Program YNTP	2007–2015 2012–sekarang (untuk program yang bersumber dari dana YNTP)	YNTP	YNTP	Sekolah di lingkaran luar tambang (Desa Dasar Anyar, Jereweh)	Belum mampu meningkatkan minat baca siswa
11	CSR PT NNT (fisik dan nonfisik) <ul style="list-style-type: none"> Pembebasan lahan untuk sekolah Bantuan sarana-prasarana Beasiswa Peningkatan kapasitas guru Program bibit unggul daerah (kerja sama PT NNT, Dinas Pendidikan, IPB, dan Universitas Brawijaya) 	PT NNT	Bantuan perusahaan	1998–sekarang	PT NNT	PT NNT melalui CSR	Sekolah di lingkaran tambang (Sekongkang, Jereweh, Maluku)	Sekolah memiliki lahan sendiri, sarana prasarana lengkap, meringankan beban orang tua siswa (beasiswa), ada peningkatan kapasitas guru, akses layanan pendidikan yang lebih tinggi
Inovasi Sekolah								
12	Pendampingan murid	Guru dan kepala sekolah	Kebijakan sekolah	2015	Guru kelas 3 dan kelas 5	Sebagian guru	Murid kelas 3 salah satu SDN sampel	Belum maksimal
13	Pelaksanaan kegiatan KKG di lingkungan internal sekolah	Kepala sekolah	Kebijakan sekolah	Sejak 2014	Kepala sekolah	Guru kelas	Semua guru di salah satu SDN sampel	Belum maksimal karena pengalaman yang diperoleh terbatas di lingkungan internal sekolah
14	Penggunaan Quipper School	Guru	Inisiatif guru	-	Guru	Guru	Guru-murid	Tidak perlu menuliskan/ memperbanyak soal karena langsung diakses dan dikerjakan secara daring (memudahkan guru)

LAMPIRAN 11

Tabel A6. Daftar Perolehan Data Sekunder Kabupaten Sumbawa Barat

No	Jenis Dokumen	Ketersediaan Data		
		Ada/Tidak	Penjelasan Ketersediaan Data	Keterangan
1	Kontak (lembaga/ individu) lain yang memengaruhi pembelajaran	Ada	Daftar terdapat di lampiran laporan kabupaten (Lampiran 3)	
2	Data 2005–2016:			
	a. Regulasi/kebijakan pendidikan (dokumen sidang terbentuknya suatu perda, rapat DPRD dan pemda, dsb.)	Ada	1. Perda No. 23/2008 tentang Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun di KSB	salinan digital
			2. Peraturan Bupati KSB tentang Program Pendidikan Gratis di KSB	salinan cetak
			3. Peraturan Bupati Sumbawa Barat No. 5/2007 tentang Pemberian Penghargaan kepada Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi di KSB	salinan cetak
			4. Keputusan Bupati KSB No. 97 Tahun 2004 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional	salinan cetak
			5. Peraturan Bupati Sumbawa Barat No. 22 Tahun 2016 tentang Gerakan Masyarakat Mengaji	salinan cetak
			6. Keputusan Bupati KSB No. 711 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan KSB Periode 2016–2021	salinan cetak
	b. Daftar program/proyek/kegiatan dan laporan pelaksanaannya	Ada	Data terdapat di Rencana Kerja (Renja) TA 2015	salinan digital dan cetak
	a. RPJMD dan renstra pendidikan	Ada	Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2011–2015	salinan digital
	b. Rencana kerja tahunan (SKPD)	Ada	1. Rencana Kerja TA 2015 2. RKA Perubahan TA 2016	salinan digital dan cetak salinan digital
	c. Laporan tahunan Dinas Pendidikan	Ada	1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (Lakip) TA 2015 2. Lakip TA 2014	salinan digital salinan cetak
	d. Statistik pendidikan setidaknya meliputi:	Ada	Data yang dibutuhkan terdapat di:	
	i. jumlah, karakteristik, dan sebaran sekolah		1. Lakip TA 2014 dan 2015	salinan digital dan cetak
	ii. jumlah, karakteristik, dan sebaran guru		2. Buku Saku TA 2011/2012 dan TA 2012/2013	salinan cetak
	iii. rasio guru-murid		3. Data APK dan APM dari Bappeda	salinan cetak
	iv. APK, APM		4. Data terdapat di NPD (Neraca Pendidikan Daerah) Tahun 2015	salinan digital
	e. Nilai rata-rata ujian nasional sekolah dasar (tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten)	Ada	Data rata-rata nilai ujian ada di Lakip TA 2014 dan 2015	

No	Jenis Dokumen	Ketersediaan Data		
		Ada/Tidak	Penjelasan Ketersediaan Data	Keterangan
	f. Nilai rata-rata ujian nasional sekolah menengah (tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten)	Ada	Data rata-rata nilai ujian ada di Lakip TA 2014 dan TA 2015 KSB	
	g. Tingkat kelulusan ujian nasional (tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten)	Ada	Data rata-rata nilai ujian ada di Lakip TA 2014 dan 2015 KSB	
	h. Hasil uji kompetensi guru tingkat kabupaten (untuk verifikasi)	Ada	Data terdapat di NPD (Neraca Pendidikan Daerah) Tahun 2015 Sumbawa barat.pdf	salinan digital
	i. Data hasil ujian akhir sekolah di sekolah sampel	Tidak ada		
3	Data dan dokumen terkait anggaran 2015–2016			
	a. Perda APBD 2016	Ada		salinan digital
	b. Perda APBD Perubahan 2015	Ada		salinan digital
	c. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2015	Tidak ada		
	d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Perubahan (DPA-P) Dinas Pendidikan 2015	Tidak ada		
	e. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan 2016	Ada		salinan cetak
	f. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Pendidikan 2015	Tidak ada		
4	Data lainnya yang tersedia:			
	a. Data KSB Dalam Angka	Ada	KSB Dalam Angka 2005–2015	
	b. RPJMD 2011–2015 Kabupaten Sumbawa Barat	Ada		salinan digital
	c. Rancangan Perda RPJMD 2016–2020 Kabupaten Sumbawa Barat	Ada		salinan digital

LAMPIRAN 12

Tabel A7. Diagram Proses Pemetaan Pemangku Kepentingan pada Survei Diagnostik Sistem Pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat

Tahap	Langkah-Langkah yang Diambil	Prasyarat	Tantangan	Antisipasi terhadap Tantangan	Hasil
1. Tahap Persiapan	Merancang penelitian: mencari metode yang tepat untuk menjawab tujuan penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Mengacu pada <i>terms of reference</i> (ToR) atau kerangka acuan kerja (KAK) - Pemilihan nama sekolah tepat waktu 	<ul style="list-style-type: none"> - Menunggu kepastian sekolah sampel program INOVASI - Menerjemahkan ToR ke dalam rancangan penelitian sehingga diperoleh metode pengumpulan dan analisis data yang tepat - Memilih pendekatan analisis yang paling tepat 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan komunikasi secara intensif dengan tim INOVASI - Melakukan rapat-rapat dengan semua anggota tim 	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar dan peta lokasi sekolah sampel - Tujuan penelitian disepakati - Metode pengumpulan data: wawancara mendalam, wawancara kelompok, dan FGD - Metode analisis data
	Menyusun instrumen	<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan penelitian yang jelas sudah dirumuskan - Metode penelitian (pengumpulan dan analisis data sudah disetujui bersama) - Pembagian tugas di antara anggota tim 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyamakan pemahaman tentang definisi kunci, misalnya hasil pembelajaran, kualitas, tolok ukur dsb. - Penyesuaian terhadap pertanyaan atau data yang ingin digali dengan waktu yang tersedia 	<ul style="list-style-type: none"> - Draf awal instrumen yang sudah dibuat oleh anggota tim didiskusikan kembali dalam rapat tim - Tiap anggota kembali memperbaiki instrumen berdasarkan hasil diskusi tim 	<ul style="list-style-type: none"> - Draf instrumen yang siap digunakan untuk pelatihan dan uji coba
	Pelatihan dan uji coba instrumen	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi dan jadwal uji coba harus ditetapkan sejak awal - Izin kunjungan sudah diterima dari pihak berwenang di lokasi uji coba - Mendapat daftar pemangku kepentingan dan nomor kontakannya - Penyiapan logistik yang relevan dengan kebutuhan: 	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan waktu pelaksanaan yang dapat dihadiri oleh semua anggota tim - Sebagian pemangku kepentingan yang dihubungi menginginkan pemberitahuan lebih awal - Sebagian pemangku kepentingan tidak merespons permohonan uji coba instrumen 	<ul style="list-style-type: none"> - Tim melakukan rapat untuk menyepakati lokasi dan jadwal uji coba - Mengirimkan anggota tim ke lokasi uji coba untuk menemui informan-informan kunci, menyepakati jadwal dan sekolah yang dijadikan uji coba 	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi uji coba: Purwakarta - Tim berhasil menyepakati jadwal dengan Dinas Dikbudpora Kabupaten Purwakarta. Pihak Dinas Dikbudpora bersedia mengontak dan mengatur jadwal wawancara mendalam dan wawancara

Tahap	Langkah-Langkah yang Diambil	Prasyarat	Tantangan	Antisipasi terhadap Tantangan	Hasil
		pengumpulan data, transportasi, komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Waktu untuk mengontak pemangku kepentingan yang dilibatkan terlalu singkat - Tantangan selama uji coba di lapangan: <ul style="list-style-type: none"> o Instrumen terlalu panjang sehingga memakan waktu lama untuk wawancara (khususnya wawancara mendalam) o Pemangku kepentingan banyak yang mengaitkan peningkatan pembelajaran dengan peningkatan karakter/akhlak murid o Informan wawancara kelompok rata-rata sangat aktif. Sekolah yang dipilih merupakan sekolah unggulan o Pengisian instrumen analisis masih membingungkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Diskusi bersama semua anggota tim 	<p>kelompok dengan informan yang dibutuhkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki instrumen pengumpulan data: mempertajam yang kurang jelas, mengurangi pertanyaan ganda - Perbaiki instrumen analisis dengan memberi keterangan sumber isian pada setiap kolomnya (berdasarkan jawaban dari setiap nomor pertanyaan)
2. Tahapan Pengumpulan Data di Lombok Tengah	<p>Menyusun daftar pemangku kepentingan dan nomor kontak</p> <hr/> <p>Mengontak informan kunci (<i>gate keeper</i>) – menjadwalkan wawancara</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan daftar hadir peserta sosialisasi program INOVASI di tingkat provinsi sebagai basis awal informasi kontak <hr/> <ul style="list-style-type: none"> - RR dan peneliti tamu mengontak informan kunci untuk meminta kesediaan dan jadwal wawancara sebelum tim turun ke lapangan - Peneliti datang langsung ke sekolah untuk menjelaskan kebutuhan wawancara di sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak semua informan yang dibutuhkan ada dalam daftar hadir yang tersedia <hr/> <ul style="list-style-type: none"> - Beberapa informan tidak menjawab ketika dikontak - Beberapa informan sedang berada di luar lokasi studi dalam waktu yang lama (tugas luar kota, kunjungan, pelatihan, dsb.) - Ada sekolah yang tidak segera memberikan kepastian kesediaan untuk dikunjungi dan beberapa pihaknya diwawancarai karena 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan metode <i>snowball</i> untuk mendapatkan informasi kontak pemangku kepentingan yang lain <hr/> <ul style="list-style-type: none"> - Terus mengontak informan selama proses di lapangan - Langsung mendatangi informan di rumah dan/atau kantornya (<i>go show</i>) - Meminta nama informan pengganti yang bisa diwawancarai (untuk informan utama yang tidak bisa diwawancarai) 	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar kontak pemangku kepentingan dapat dilengkapi <hr/> <ul style="list-style-type: none"> - Jadwal wawancara berhasil disepakati dengan setiap informan

Tahap	Langkah-Langkah yang Diambil	Prasyarat	Tantangan	Antisipasi terhadap Tantangan	Hasil
			kepala sekolah tidak hadir pada hari tersebut	- Mendatangi kembali sekolah yang sebelumnya tidak memberikan kepastian kesediaan untuk dikunjungi. Tim juga meyakinkan pihak sekolah tersebut bahwa jika kepala sekolah sudah mengizinkan kunjungan dari tim SMERU, kegiatan wawancara bisa dilaksanakan dan wawancara dengan kepala sekolah bisa diwakili oleh wakilnya	
	Melakukan wawancara kelompok dan wawancara mendalam)	<ul style="list-style-type: none"> - Jadwal wawancara yang disepakati dengan setiap informan - Informan mengisi lembar <i>informed consent</i> - Tim melakukan evaluasi harian untuk menghitung jadwal lapangan yang tersedia dengan jumlah wawancara yang harus dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> - Syarat wawancara: minimal harus dilakukan dua orang per informan/ kelompok informan - Masih ditemukan pertanyaan yang senada dalam instrumen - Beberapa wawancara harus dilakukan hingga dua kali pertemuan karena terpotong waktu salat zuhur/asar (ada kebijakan daerah tentang kewajiban solat berjamaah bagi pegawai pemda) - Penjadwalan ulang untuk wawancara lanjutan sulit disepakati karena kesibukan informan (informan yang diwawancarai hingga dua kali) - Ada kepala sekolah yang tidak bersedia direkam saat wawancara 	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanyaan yang senada tak lagi ditanyakan - Membuat janji baru untuk melakukan wawancara sambungan sesuai dengan kesediaan waktu informan - Meyakinkan informan (kepala sekolah) bahwa identitas informan akan dirahasiakan dan hasil wawancara berupa rekaman, notulen, foto, dsb. merupakan hal yang diperlukan tim sebagai bahan penyusunan laporan. Informan tersebut tetap tidak bersedia direkam, tetapi membolehkan 	Semua informan berhasil diwawancarai.

Tahap	Langkah-Langkah yang Diambil	Prasyarat	Tantangan	Antisipasi terhadap Tantangan	Hasil
				wawancaranya dicatat dan proses wawancara difoto)	
	Menyelenggarakan FGD	<ul style="list-style-type: none"> - Menyetujui jadwal dan tempat penyelenggaraan FGD dengan Bappeda - Menyetujui daftar peserta FGD dengan Bappeda - Tim menyiapkan bahan untuk dipresentasikan: <ul style="list-style-type: none"> o Analisis pohon masalah o Analisis penyelesaian masalah o Analisis pengaruh/ketertarikan pemangku kepentingan o Jaringan pemangku kepentingan o Kebijakan/inovasi yang dijalankan di kabupaten - Peserta memaparkan kondisi hasil pembelajaran murid, penyelesaian masalah, kondisi pengaruh/ketertarikan, jaringan pemangku kepentingan, dan kebijakan/inovasi yang dijalankan 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada informan yang dinominasikan oleh Bappeda sebagai peserta FGD, tetapi tidak begitu jelas mengapa peserta itu diundang - Menyusun strategi agar FGD bisa dilaksanakan dari pagi hingga siang hari sebelum waktu salat zuhur (ada peraturan wajib salat berjamaah bagi pegawai pemda)¹⁵. Ada kekhawatiran peserta tidak bersedia kembali mengikuti FGD lanjutan jika FGD terpotong waktu salat dan makan siang - Dalam FGD, pendapat peserta banyak diwarnai kepentingannya (peserta cenderung memberikan jawaban ideal, bukan aktual) - Diskusi pada bagian “Analisis Pohon Masalah” menyita waktu banyak 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyetujui kembali daftar peserta yang diundang dengan Bappeda - Peserta diminta hadir tepat waktu dan acara tetap dimulai tepat jam 9 meski belum semua peserta hadir (baru sekitar 10 orang dari 22 orang yang diundang) - Berdasarkan masukan dari pihak Bappeda, FGD dilaksanakan dua sesi, yaitu sesi presentasi temuan secara keseluruhan dan sesi diskusi tiap bagian temuan - Pandangan peserta diakomodasi setelah dikonfirmasi ke peserta yang lain 	<ul style="list-style-type: none"> - FGD selesai tepat waktu (sebelum waktu salat zuhur). Tidak ada tanggapan khusus dari peserta pada bagian pembahasan kebijakan/inovasi yang dijalankan. - FGD menyetujui: <ul style="list-style-type: none"> o Analisis pohon masalah o Analisis penyelesaian masalah o Analisis pengaruh/ketertarikan pemangku kepentingan o Jaringan pemangku kepentingan o Kebijakan/inovasi yang dijalankan di kabupaten
	Mengumpulkan data sekunder	<ul style="list-style-type: none"> - Ada daftar data yang dibutuhkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Walaupun daftar sudah diberikan, data belum sepenuhnya diperoleh karena dokumen hilang, orang yang bertanggung jawab terhadap data tidak di tempat, tidak ada data salinan digital (data salinan cetak sangat tebal per tahunnya) 	<ul style="list-style-type: none"> - Peneliti memperoleh sebagian data yang dibutuhkan dengan cara mencari sendiri di tumpukan dokumen Dinas Dikbudpora 	Sebagian besar data sekunder terkumpul dengan lengkap

¹⁵Berdasarkan pengalaman di Sumbawa, FGD dilaksanakan selama sekitar 5 jam.

Tahap	Langkah-Langkah yang Diambil	Prasyarat	Tantangan	Antisipasi terhadap Tantangan	Hasil
3. Tahapan analisis data	Entri data	<ul style="list-style-type: none"> - Catatan lapangan (catlap) sebagai data mentah - Tabel entri data sudah tersedia - Transkrip verbatim rekaman wawancara 	<ul style="list-style-type: none"> - Catlap tak bisa diselesaikan saat proses lapangan karena pendeknya waktu yang tersedia - Transkrip verbatim memerlukan sumber daya yang banyak dan waktu yang panjang untuk menyelesaikannya. Kualitas transkrip sulit disamakan karena banyaknya sumber daya. Kualitas transkrip, khususnya wawancara kelompok dan FGD, juga sulit dijaga karena dalam rekaman terdengar suara riuh dari luar ruangan wawancara kelompok dan FGD 	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagian entri data dilakukan oleh tim di Jakarta - Ada koordinator penggabungan entri data - Transkrip verbatim dialihdayakan, dan anggota tim tersebar di berbagai provinsi - Ada peneliti yang bertugas sebagai koordinator transkrip verbatim 	<ul style="list-style-type: none"> - Entri data diselesaikan di Jakarta - Transkrip verbatim dikumpulkan secara bertahap
	Analisis	<ul style="list-style-type: none"> - Entri data selesai dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> - Jadwal yang sempit untuk mengirimkan laporan kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> - Proses analisis untuk laporan kabupaten dilakukan dengan diskusi tim berdasarkan catatan buku 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Pointers</i> untuk setiap topik laporan disepakati
	Penyusunan laporan kabupaten dan sintesis	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh data selesai dianalisis - Kerangka laporan tersedia 	<ul style="list-style-type: none"> - Jadwal yang sempit untuk mengirimkan laporan kabupaten - Banyaknya lampiran yang menyertai laporan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembagian tugas di antara anggota tim untuk membuat laporan kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan kabupaten dikirim sesuai jadwal

The SMERU Research Institute

Telepon : +62 21 3193 6336

Faksimili : +62 21 3193 0850

Surel : smeru@smeru.or.id

Situs web : www.smeru.or.id

Facebook : @SMERUInstitute

Twitter : @SMERUInstitute

YouTube : The SMERU Research Institute

